

**KETIMPANGAN PENDAPATAN PETANI PADI
DI DESA COKROKEMBANG KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN PACITAN**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister**



Diajukan oleh :

RIA MISDIAN SYAHRI
21064020005

**PROGRAM STUDI MAGISTER AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA
2023**

TESIS

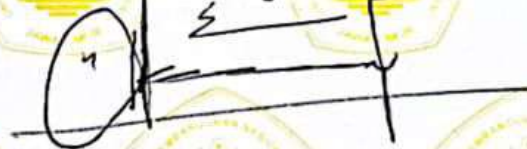
**KETIMPANGAN PENDAPATAN PETANI PADI
DI DESA COKROKEMBANG KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN PACITAN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

RIA MISDIAN SYAHRI
NPM : 21064020005

**Telah dipertahankan di depan Penguji
pada tanggal 31 Mei 2023 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk diterima**

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Ir. Syarif Imam Hidayat, MM
NIP. 19630218 198903 1002

Pembimbing Pendamping



Dr. Ir. Indra Tjahaja Amir, MP
NIP. 19581118 198903 1001

Mengetahui

Dekan Fakultas Pertanian



Dr. Ir. Wanti Mindari, MP
NIP. 19631208 199003 2001

**Koordinator Program Studi
Magister Agribisnis**



Dr. Ir. Mubarakah, M.TP
NIP. 19621114 198803 2001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain dan disebutkan dalam sumber kutipan dan pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Surabaya, 31 Mei 2023



RIA MISDIAN SYAHRI
NPM. 21064020005

ABSTRAK

KETIMPANGAN PENDAPATAN PETANI PADI DI DESA COKROKEMBANG KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN

Desa Cokrokembang merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dengan areal sawah terluas di antara desa-desa yang lain yakni sebesar 107,57 hektar. Namun demikian, telah terjadi penyempitan jumlah komoditas yang diusahakan akibat adanya pencemaran air sungai oleh limbah kegiatan tambang sebagai sumber pengairan utama. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi pendapatan petani yang saat ini hanya mengusahakan komoditas padi saja. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan diantaranya : 1) Untuk mengidentifikasi profil petani padi di Desa Cokrokembang; 2) Untuk menganalisis keragaman sumber pendapatan petani padi serta kontribusinya terhadap total pendapatan rumah tangga di Desa Cokrokembang; dan 3) Untuk menganalisis tingkat ketimpangan pendapatan petani padi di Desa Cokrokembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis penerimaan dan pendapatan, serta analisis rasio gini, kurva lorenz, dan kriteria World Bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia antara 56 - 60 tahun sebanyak 27%, jenis kelamin laki-laki sebanyak 97%, responden petani padi tidak mengenyam pendidikan sebanyak 38%, tidak memiliki tanggungan keluarga sebanyak 55%, luas lahan berkisar antara 0,06 sampai 0,10 hektar sebanyak 70%, kepemilikan lahan merupakan milik sendiri sebanyak 100%, dan modal usahatani berasal dari modal pribadi sebanyak 100%; keragaman sumber pendapatan petani antara lain berasal dari usahatani padi itu sendiri, usaha peternakan dan dari luar usahatani. Usaha peternakan antara lain mengusahakan rumput pakan ternak untuk dijual, dan menjual hewan ternak. Pendapatan di luar usahatani berasal dari pekerjaan sebagai tukang bangunan, pengrajin, dan buruh serabutan. Kontribusi pendapatan usahatani padi terhadap total pendapatan rumah tangga adalah sebesar 32,62%% termasuk dalam kategori kontribusi sedang. Ketimpangan pendapatan antar responden petani padi di Desa Cokrokembang menurut analisis rasio gini sebesar 0,68, kurva lorenz melebar pada kelompok pendapatan bawah, dan jumlah dari 40 persen penduduk berpenghasilan rendah adalah sebanyak 6,482% dari total responden petani padi. Hal ini menunjukkan ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan responden petani padi di Desa Cokrokembang termasuk dalam kategori ketimpangan tinggi (*high inequality*).

Kata Kunci : Ketimpangan Pendapatan, Petani Padi, Desa Cokrokembang

ABSTRACT

INCOME INEQUALITY OF RICE FARMERS IN COKROKEMBANG VILLAGE, NGADIROJO DISTRICT, PACITAN REGENCY

Cokrokembang Village is one of the villages in Ngadirojo District, Pacitan Regency, with the largest rice field area among the other villages, which is 107.57 hectares. However, there has been a narrowing in the number of commodities cultivated due to river water pollution by waste from mining activities as the main source of irrigation. This of course greatly affects the income of farmers who are currently only cultivating rice commodities. Therefore, this research was conducted with the following objectives: 1) To identify the profile of rice farmers in Cokrokembang Village; 2) To analyze the diversity of rice farmers' income sources and their contribution to total household income in Cokrokembang Village; and 3) To analyze the level of income inequality of rice farmers in Cokrokembang Village. The method used in this research is descriptive method with a quantitative approach. Data analysis used is descriptive analysis, acceptance and income analysis, as well as analysis of gini ratios, Lorenz curves, and World Bank criteria. The results showed that the majority of respondents aged between 56 - 60 years were 27%, male sex was 97%, rice farmer respondents were uneducated by 38%, did not have family dependents by 55%, land area ranged from 0.06 up to 0.10 hectares as much as 70%, land ownership is self-owned as much as 100%, and farming capital comes from personal capital as much as 100%; the diversity of sources of income for farmers, among others, comes from the rice farming itself, non-rice farming and from outside the farming business. Non-rice farming, among other things, sells fodder grass for sale, and sells livestock. Income outside of farming comes from work as construction workers, craftsmen, and casual laborers. The contribution of rice farming income to total household income is 32.62%, which is included in the moderate contribution category. According to the Gini ratio analysis, the income inequality between rice farmer respondents in Cokrokembang Village is 0.68, the Lorenz curve widens in the lower income groups, and the number of 40 percent of the low-income population is as much as 6.482% of the total rice farmer respondents. This shows the income inequality between the income groups of rice farmer respondents in Cokrokembang Village is included in the category of high inequality.

Keywords: Income Inequality, Rice Farmers, Cokrokembang Village

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga laporan tesis penelitian ini dapat diselesaikan. Penelitian akan dilaksanakan di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan dengan judul **“Ketimpangan Pendapatan Petani Padi di Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan”**. Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa pada Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur guna memperoleh gelar magister.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Ir. Syarif Imam Hidayat, MM selaku dosen pembimbing utama dan Dr. Ir. Indra Tjahaja Amir, MP selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama pra-pelaksanaan penelitian hingga selesainya penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyelesaian laporan tesis, antara lain :

1. Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MT selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Dr. Ir. Wanti Mindari, MP selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Dr. Ir. Mubarakah, M.TP selaku Koordinator Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Dr. Ir. Endang Yektiningsih MP dan Dr. Dona Wahyuning Laily, SP., MP selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan-masukan yang dapat menyempurnakan laporan penelitian ini;
5. Kedua orangtua yang selalu mengiringi perjalanan penulis dengan doa serta motivasi dan semangat yang tiada henti;
6. Teman-teman Magister Agribisnis 2021 yang telah memberikan semangat tiada henti dan senantiasa menjadi motivasi penulis agar laporan tesis ini terselesaikan dengan cepat dan tepat.
7. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap semoga laporan ini dapat mencapai kriteria yang diharapkan serta mampu menjadi khasanah ilmu bagi semua pihak yang membutuhkannya di masa mendatang.

Surabaya, Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
TESIS	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Batasan Penelitian	9
II. TELAAH PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori	18
2.2.1 Pertanian.....	18
2.2.2 Agribisnis	20
2.2.3 Petani.....	23
2.2.4 Padi.....	25

2.2.5	Faktor Produksi Usahatani Padi	27
2.2.6	Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi	31
2.2.7	Pendapatan Rumah Tangga Pertanian	36
2.2.8	Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)	39
2.2.9	Kemiskinan	41
2.2.10	Kesejahteraan.....	45
2.2.11	Analisis Deskriptif.....	49
2.2.12	Analisis Penerimaan dan Pendapatan.....	50
2.2.13	Analisis Rasio Gini	52
2.2.14	Kurva Lorenz.....	53
2.2.15	Ketimpangan Kriteria World Bank.....	54
2.3	Kerangka Penelitian	55
III.	METODE PENELITIAN	58
3.1	Jenis dan Desain Penelitian.....	58
3.1.1	Jenis Penelitian.....	58
3.1.2	Desain Penelitian	58
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	58
3.3	Penentuan Responden	59
3.4	Metode Pengumpulan Data	61
3.4.1	Sumber Data Primer	61
3.4.2	Sumber Data Sekunder	61
3.5	Analisis Data	62

3.5.1	Analisis Deskriptif.....	62
3.5.2	Analisis Pendapatan Rumah Tangga Pertanian	63
3.5.3	Analisis Rasio Gini, Kurva Lorenz dan Kriteria World Bank.....	64
3.6	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	69
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	73
4.1	Keadaan Umum Daerah Penelitian.....	73
4.2	Keadaan Penduduk.....	74
4.2.1	Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin	74
4.2.2	Keadaan Penduduk Menurut Usia	74
4.2.3	Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan	75
4.2.4	Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencarian	75
4.3	Keadaan Sarana dan Prasarana Pembangunan	76
4.4	Gambaran Usahatani Padi di Desa Cokrokembang	78
4.5	Hasil dan Pembahasan	80
4.5.1	Profil Responden Petani Padi di Desa Cokrokembang	80
4.5.2	Analisis Pendapatan Usahatani Padi di Desa Cokrokembang ..	84
4.5.3	Kontribusi Hasil Usahatani Terhadap Pendapatan Rumah Tangga di Desa Cokrokembang	94
4.5.4	Tingkat Ketimpangan Pendapatan Petani Padi di Desa Cokrokembang.....	107
4.5.5	Alternatif Solusi Untuk Mengurangi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Petani Padi di Desa Cokrokembang.....	118
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	132
5.1	Kesimpulan	132
5.2	Implikasi	133

5.3 Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN	143

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama Kabupaten Pacitan Tahun 2020 – 2022	4
Tabel 1.2	Luas Lahan Sawah Desa di Kecamatan Ngadirojo	4
Tabel 2.1	Mapping Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3.1	Populasi Petani Padi di Desa Cokrokembang.....	59
Tabel 3.2	Kriteria Rasio Gini.....	66
Tabel 4.1	Penduduk Desa Cokrokembang Menurut Jenis Kelamin.....	74
Tabel 4.2	Penduduk Desa Cokrokembang Menurut Usia	74
Tabel 4.3	Keadaan Penduduk Desa Cokrokembang Menurut Pendidikan	75
Tabel 4.4	Keadaan Penduduk Desa Cokrokembang Berdasarkan Mata Pencaharian.....	76
Tabel 4.5	Kelembagaan Desa Cokrokembang.....	77
Tabel 4.6	Sarana dan Prasarana Desa Cokrokembang.....	77
Tabel 4.7	Responden Berdasarkan Usia.....	80
Tabel 4.8	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	81
Tabel 4.9	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	81
Tabel 4.10	Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga.....	82
Tabel 4.11	Responden Berdasarkan Luas Lahan	82
Tabel 4.12	Responden Berdasarkan Kepemilikan Lahan	83
Tabel 4.13	Responden Berdasarkan Sumber Modal Usahatani Padi	84
Tabel 4.14	Rincian Luasan Lahan yang Dimiliki Responden	84
Tabel 4.15	Biaya Tetap (Fixed Cost) per Responden per Tahun.....	85
Tabel 4.16	Depresiasi Alat Usahatani Padi per Responden per Tahun	86
Tabel 4.17	Biaya Variabel (Variable Cost) per Responden per Tahun	86
Tabel 4.18	Total Biaya (Total Cost) per Responden per Tahun.....	93

Tabel 4.19 Rata-rata Penerimaan Usahatani Padi per Responden	94
Tabel 4.20 Analisis Rata-rata Pendapatan Responden dari Usahatani Padi	94
Tabel 4.21 Analisis Rata-rata Pendapatan Responden dari Usaha Peternakan.	97
Tabel 4.22 Analisis Rata-rata Pendapatan Responden dari Luar Usahatani	98
Tabel 4.23 Analisis Rata-rata Pendapatan Anggota Keluarga Responden.....	99
Tabel 4.24 Rata-rata Konsumsi Pangan Responden Petani Padi per Tahun ...	100
Tabel 4.25 Konsumsi Non Pangan Responden Petani Padi per Tahun.....	102
Tabel 4.26 Total Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Responden.....	105
Tabel 4.27 Analisis Pendapatan Rumah Tangga Responden per Tahun	106
Tabel 4.28 Hasil Analisis Rasio Gini.....	108
Tabel 4.29 Ketimpangan Pendapatan Responden Berdasarkan Kriteria World Bank.....	114
Tabel 4.30 Perbandingan Hasil Panen Padi Sebelum dan Sesudah Adanya Kegiatan Tambang.....	127

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 1.1	Grafik Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)	1
Gambar 2.1	Sistem Agribisnis.....	22
Gambar 2.2	Kurva Lorenz	54
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran Penelitian	57
Gambar 3.1	Langkah-langkah Analisis Rasio Gini.....	66
Gambar 3.2	Contoh Tabel Pendapatan Petani Padi (Petani).....	67
Gambar 3.3	Pembagian Data Menjadi Bagian Lebih Kecil	67
Gambar 3.4	Cara Menghitung Persentase Income	68
Gambar 3.5	Menentukan Titik Temu	68
Gambar 3.6	Contoh Hasil Kurva Lorenz.....	68
Gambar 4.1	Peta Desa Cokrokembang.....	73
Gambar 4.2	Padi Varietas Inpari 42	78
Gambar 4.3	Proses Pengolahan Lahan Sawah di Desa Cokrokembang.....	89
Gambar 4.4	Proses Pemanenan Padi di Desa Cokrokembang	91
Gambar 4.5	Proses Penjemuran Gabah	92
Gambar 4.6	Rokok Kretek Merk “Alami” Pacitan.....	101
Gambar 4.7	Kurva Lorenz Petani Padi di Desa Cokrokembang	113
Gambar 4.8	Kondisi Jalan Rusak di Desa Cokrokembang	128

DAFTAR LAMPIRAN

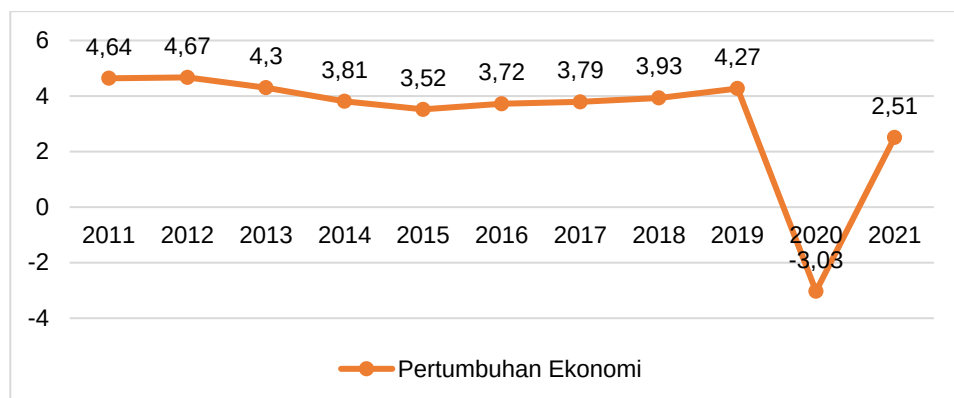
Lampiran 1	Data Umum Responden	143
Lampiran 2.	Luas Lahan Usahatani Padi, Lama Berusahatani, Kepemilikan Lahan, Awal Kepemilikan Lahan, dan Sumber Modal Responden Petani Padi	146
Lampiran 3.	Penerimaan Responden dari Usahatani Padi	149
Lampiran 4.	Pendapatan Responden dari Usaha Peternakan	154
Lampiran 5.	Pendapatan Responden dari Luar Usahatani	155
Lampiran 6.	Pendapatan Anggota Keluarga Responden	158
Lampiran 7.	Pengeluaran Usahatani Padi Dalam 1 (Satu) Tahun	163
Lampiran 8.	Pengeluaran Konsumsi Pangan Responden Petani Padi	168
Lampiran 9.	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan I Responden Petani Padi..	173
Lampiran 10.	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan II Responden Petani Padi.	178
Lampiran 11.	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan III Responden Petani Padi	183
Lampiran 12.	Tabungan Responden Petani Padi per Tahun	188
Lampiran 13.	Pendapatan Responden Berdasarkan Kriteria World Bank	191
Lampiran 14.	Kepemilikan Hewan Ternak Responden	192
Lampiran 15.	Keputusan Bupati Nomor 188.45/25/408.21/2009	195
Lampiran 16.	Kuisisioner Penelitian.....	198

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan suatu negara bisa dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi selalu dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari keberhasilan implementasi kebijakan makro ekonomi di suatu negara yang akan memberikan dampak pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran nyata dari dampak kebijakan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dan terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi, dimana laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat tercermin dari perubahan PDB (Produk Domestik Bruto) yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Berdasarkan indikator ini akan diperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara.

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan pertumbuhan ekonomi fluktuatif dari tahun ke tahun yang tentunya akan memberikan dampak di berbagai sektor, kehidupan masyarakat, dan perekonomian Indonesia.



Gambar 1.1 Grafik Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)
Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas, kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam rentang waktu 11 tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Kondisi perekonomian terbaik terjadi pada tahun 2012 yakni menunjukkan angka pertumbuhan sebesar 4,67% dan paling buruk pada tahun 2020 hingga mencapai -3,03% diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Namun, fakta yang menarik adalah sektor pertanian justru mengalami pertumbuhan positif saat era pandemi COVID-19. Menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2021), sektor pertanian berhasil meningkatkan pertumbuhan PDB sekitar 2,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi saat krisis dunia tahun 2008, sektor pertanian menjadi penyelamat perekonomian Indonesia dimana kontribusinya naik signifikan dari 13,7% pada tahun 2007 menjadi 14,4% pada tahun 2008 (Media Indonesia, 2019). Bukti kekuatan sektor pertanian lainnya ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi pada saat krisis moneter tahun 1998 menunjukkan nilai 0,26% padahal pertumbuhan ekonomi nasional sedang ambruk hingga mencapai nilai -13,10% (Media Indonesia, 2019).

Namun, di balik kokohnya sektor pertanian dalam menghadapi guncangan ekonomi dan posisinya sebagai sektor penting di Indonesia, sangat ironis bahwasanya di negeri yang kaya akan sumber daya alam, kehidupan masyarakat taninya masih jauh dari kata sejahtera. Arifin (2015) mengatakan bahwa 70% masyarakat miskin Indonesia saat ini adalah petani. Hal ini bertentangan dengan anggapan bahwa Indonesia merupakan negara agraris namun justru faktor fundamental agraria sebagian besar miskin. Petani yang miskin cenderung petani desa. Hal ini menyebabkan timbulnya adanya ketimpangan ekonomi pada dimensi distribusi pendapatan. Ketimpangan ekonomi pada dimensi distribusi pendapatan merupakan sebuah realita di tengah-tengah masyarakat, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan dan

masih menjadi salah satu isu penting untuk diatasi. Fenomena ini mengharuskan adanya evaluasi untuk dilakukan. Proses evaluasi akan menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan strategi perubahan ke depannya. Proses perbaikan kualitas kesejahteraan masyarakat diharapkan diikuti dengan perbaikan kualitas masyarakat secara utuh. Salah satunya dengan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat di berbagai golongan ekonomi.

Jawa Timur menempati urutan pertama dalam hal jumlah penduduk miskin menurut data Badan Pusat Statistik per Maret 2022 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 4.181 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2022). Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang merupakan daerah terisolasi dari sisi lokasi adalah Kabupaten Pacitan. Kabupaten Pacitan berada di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur, berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) di sebelah utara, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo di sebelah timur, Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) di sebelah barat dan Samudera Hindia di sebelah selatan. Keterisolasian ini mengakibatkan kerawanan atas kesejahteraan hidup masyarakat dari sisi ekonomi, terlebih lagi wilayah Kabupaten Pacitan hampir seluruh wilayahnya merupakan pedesaan yang identik dengan pertanian dan kemiskinan diakibatkan mayoritas masyarakatnya sebagai petani.

Kabupaten Pacitan menurut Noto (2012) termasuk dalam kategori VI yakni PDRB per kapita di bawah PDRB Provinsi Jawa Timur, ketimpangan rendah (indeks gini Kabupaten Pacitan di bawah indeks gini Provinsi Jawa Timur), dan kemiskinan Kabupaten Pacitan di atas kemiskinan Provinsi Jawa Timur. Salah satu penyebab terjadinya ketimpangan dan kemiskinan adalah jumlah angkatan kerja yang bekerja. Menurut data Badan Pusat Statistik (2022), jumlah penduduk

15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan kerja utama adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk 15 Tahun ke atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama Kabupaten Pacitan Tahun 2020 – 2022

Kategori Lapangan Usaha	Penduduk yang bekerja menurut lapangan kerja utama (Jiwa)		
	2020	2021	2022
Pertanian	211.179	212.493	98.013
Manufaktur	54.249	45.819	40.320
Jasa	92.518	102.956	53.432

Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Desa Cokrokembang sebagai salah satu desa di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan termasuk dalam kategori desa dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Desa Cokrokembang memiliki luas areal lahan persawahan paling luas diantara desa-desa yang ada di Kecamatan Ngadirojo.

Tabel 1.2 Luas Lahan Sawah Desa di Kecamatan Ngadirojo

No.	Desa	Luas Sawah (ha)
1.	Sidomulyo	55,00
2.	Hadiwarno	55,00
3.	Tanjung Puro	60,80
4.	Hadiluwih	52,50
5.	Pagerejo	87,45
6.	Wiyoro	42,00
7.	Ngadirojo	51,00
8.	Bogoharjo	19,02
9.	Cokrokembang	107,57
10.	Bodag	36,83
11.	Tanjunglor	60,78
12.	Nogosari	11,01
13.	Cangkring	22,05
14.	Wonodadi Kulon	30,44
15.	Wonodadi Wetan	7,98
16.	Wonokarto	35,38
17.	Wonoasri	32,07
18.	Wonosobo	31,56

Sumber : Kecamatan Ngadirojo (2022)

Desa Cokrokembang memiliki ketinggian tanah antara 5-150 meter di atas permukaan laut dan termasuk dalam zona iklim panas. Pada zona ini, suhu udara berkisar 22°C – 26,3°C dan tanaman yang cocok untuk dibudidayakan

adalah padi, tebu, coklat, dan jagung. Namun demikian, dalam 5 (tahun) terakhir, masyarakat pertanian di Desa Cokrokembang hanya mengandalkan tanaman padi sebagai tanaman yang dibudidayakan di sawahnya. Sebelumnya, masyarakat membudidayakan kedelai di sela – sela musim tanam padi. Namun, karena lahan pertanian yang selalu terendam banjir selama 5 (tahun) terakhir, diperparah dengan kondisi air sungai sebagai sumber pengairan utama yang tercemar limbah tambang, maka para petani padi di Desa Cokrokembang hanya mengusahakan komoditas padi.

Perubahan dalam pengusahaan komoditas pertanian oleh petani dari yang sebelumnya beraneka ragam hingga saat ini hanya komoditas padi ini perlu diteliti, untuk mengetahui bagaimana selama ini petani padi di Desa Cokrokembang bertahan hidup dengan kondisi alam yang sudah tidak sama lagi dengan kondisi sebelumnya. Fenomena ini sangat memungkinkan untuk terjadinya suatu ketimpangan atau kesenjangan pendapatan antar petani mengingat tidak semua wilayah di Desa Cokrokembang ini sungainya tercemar limbah tambang, padahal Desa Cokrokembang merupakan desa dengan luasan sawah paling besar diantara desa-desa yang lain, sehingga akan berpotensi menghasilkan pendapatan yang justru tidak sebanding dengan luasan lahan sawah yang dimiliki.

Adanya potensi persoalan ketimpangan distribusi pendapatan petani padi menyebabkan masalah yang besar baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Selain adanya ancaman dari sektor lain yang dapat menggoyahkan sektor pertanian di Desa Cokrokembang, terdapat juga bermacam-macam problematika, antara lain kenaikan tarif bahan bakar minyak, stabilitas politik menjelang Pemilu 2024, stabilitas politik dunia di tengah perang dingin beberapa negara, cuaca dan iklim yang ekstrim, serta resesi yang menghantui. Selain itu, permasalahan internal sektor pertanian juga sangat

kompleks, antara lain alih fungsi lahan, tingginya harga sarana produksi, kelembagaan pertanian yang masih belum terselenggara dengan baik, ditambah lagi dengan sifat-sifat khas produk primer pertanian dan kurangnya keahlian petani dalam memberikan nilai tambah dan lain sebagainya. Problematika-problematika tersebut sangat dikhawatirkan akan meningkatkan ketimpangan pendapatan masyarakat. Ditambah lagi dengan adanya ancaman dari sektor pertambangan di Desa Cokrokembang menjadi satu ancaman tersendiri bagi eksistensi pertanian disana. Sektor pertanian yang selama ini handal pun tidak terlepas dari bayang-bayang ketakutan atas berbagai problematika diatas, terlebih lagi kehidupan petani yang terjadi selama ini masih jauh dari kesejahteraan. Ketimpangan distribusi pendapatan ini merupakan suatu permasalahan yang penting untuk segera diselesaikan oleh daerah karena dampak yang akan terjadi bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga bisa dari segi sosial. ketimpangan dalam suatu daerah sudah menjadi masalah klasik yang dapat ditemukan dimana saja. Maka dari itu, ketimpangan ini bukan sesuatu yang dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa dikurangi sedikit demi sedikit sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar terjadi keselarasan dalam hal tersebut sehingga tetap terpelihara dalam proses pertumbuhannya (Linggar, 2011).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, perlu dilakukan suatu penelitian mengenai **“Ketimpangan Pendapatan Petani Padi di Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan”** untuk menghadapi tantangan ke depan supaya sektor pertanian khususnya petani padi di Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dapat tetap eksis di tengah banyaknya issue-issue pengembangan sektor lain dan kondisi alam yang tidak menentu termasuk namun tidak terbatas pada sektor pertambangan emas dan nikel. Petani harus dipastikan dengan benar mengenai ketimpangan

pendapatannya dan posisi kesejahteraannya sehingga dapat dirancang suatu program strategis yang dapat menyelamatkan petani dari jurang kemiskinan.

1.2 Perumusan Masalah

Saat ini kondisi perekonomian Indonesia khususnya Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan belum sepenuhnya kembali normal seperti sebelum pandemi COVID-19. Sektor pertanian sebagai sektor perekonomian yang handal dalam menghadapi berbagai guncangan ekonomi perlu dipastikan kembali keberadaannya pasca pandemi COVID-19 untuk memastikan apakah masyarakat yang bekerja di sektor pertanian masih cukup aman atau justru mengalami ketimpangan ekonomi yang meninggi dengan sektor lain. Adanya pengurangan komoditas yang ditanam dari sebelumnya padi, kedelai, dan tanaman lain hingga hanya menyisakan tanaman padi saja akan mengancam keberlangsungan dunia pertanian untuk Desa Cokrokembang, padahal dari sisi luas lahan sawah Desa Cokrokembang memiliki luasan paling besar diantara desa-desa yang lain di Kecamatan Ngadirojo. Hal ini menjadikan penelitian perlu dilakukan sebagai langkah awal untuk menentukan seberapa besar tingkat ketimpangan pendapatan petani sebagai mata pencaharian utama di Desa Cokrokembang sebagai desa yang telah mengalami penyempitan jenis komoditas yang diusahakan, selain itu juga Desa Cokrokembang sebagai desa yang terdampak langsung adanya kegiatan pertambangan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Harapannya dengan diidentifikasinya ketimpangan pendapatan ini dapat menjadi suatu langkah yang tepat bagi para *stakeholder* untuk mengambil kebijakan demi keberlangsungan dan eksistensi pertanian di Desa Cokrokembang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana profil petani padi di Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana keragaman sumber pendapatan petani padi serta kontribusinya terhadap total pendapatan rumah tangga di Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan?
3. Bagaimana tingkat ketimpangan pendapatan petani padi di Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut adalah :

1. Untuk mengidentifikasi profil petani padi di Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.
2. Untuk menganalisis keragaman sumber pendapatan petani padi serta kontribusinya terhadap total pendapatan rumah tangga di Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.
3. Untuk menganalisis tingkat ketimpangan pendapatan petani padi di Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Sebagai wahana bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan
2. Mampu membandingkan teori-teori yang telah diperoleh dengan kondisi di lapang
3. Mampu menguji sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori ilmu agribisnis secara praktis.

1.4.2 Bagi Perguruan Tinggi

1. Sebagai tambahan referensi yang dapat dijadikan bahan perbendaharaan ilmu dan pengetahuan utamanya bagi mahasiswa dan civitas akademika pada umumnya;
2. Sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah sejenis.

1.4.3 Bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan

Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menentukan kebijakan yang akan diambil selanjutnya khususnya dalam penanganan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat.

1.5 Batasan Penelitian

1. Penelitian ini pada awalnya dimaksudkan untuk pelaku agribisnis, yakni petani, buruh tani, peternak, pekebun, nelayan dan petani hutan. Namun demikian, karena data desa tidak dapat mengelompokkan secara jelas maka peneliti mengkhususkan kepada petani padi di Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, dengan pertimbangan bahwa Desa Cokrokembang memiliki luas areal lahan sawah paling besar di antara desa-desa lain yang ada di Kecamatan Ngadirojo dan komoditas yang diusahakan saat ini terbatas pada komoditas padi.
2. Data utama yang digunakan oleh peneliti merupakan data hasil kuisisioner dan wawancara berdasarkan pengalaman responden dalam berusahatani selama tahun 2022, selanjutnya apabila terdapat data di luar tahun 2022, maka data tersebut merupakan data pendukung.
3. Hal-hal yang tidak masuk dalam penelitian ini dianggap *ceteris paribus*.

II. TELAAH PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai ketimpangan pendapatan telah dilakukan. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul yang diangkat peneliti. Namun, peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Tabel 2.1 menyajikan berbagai penelitian ketimpangan serta analisis data yang digunakan.

Tabel 2.1 *Mapping* Penelitian Terdahulu

No. (1)	Peneliti (2)	Judul (3)	Tujuan (4)	Analisis (5)	Hasil (6)
1.	Heryanah (2017)	Kesenjangan Pendapatan di Indonesia : Studi Empiris Berdasarkan Susenas 2008, 2011 dan 2013	Melihat kondisi kesenjangan pendapatan di Indonesia berdasarkan data Susenas 2008, 2011 dan 2013	Analisis rasio gini	Secara umum tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 5 tahun termasuk kategori sedang dan cenderung naik dalam 10 tahun terakhir. Kesenjangan kategori Pendidikan merupakan penyumbang tertinggi terhadap kesenjangan pendapatan, disusul dengan kesenjangan antar perkotaan – pedesaan dan antar provinsi. Sedangkan kesenjangan gender, anggota rumah tangga dan kelompok usia bukan merupakan faktor terpenting dari kesenjangan secara keseluruhan.

2.	A'laa dan Sutikno (2018)	Pemodelan Faktor-faktor yang Memengaruhi Gini Rasio Pembangunan di Jawa Timur dengan Regresi Spasial	Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan	Regresi spasial	Ketimpangan yang terjadi termasuk dalam kategori sedang. Variabel yang signifikan adalah variabel yang berasal dari aspek sosial yakni kepadatan penduduk dan pengangguran terbuka.
3.	Saputri dan Suryowati (2018)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gini Ratio di Provinsi Papua dengan Model Spasial Data Panel	Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi gini ratio di Provinsi Papua	Regresi spasial data panel dengan pendekatan matriks <i>queen contiguity</i>	Model data panel yang terpilih adalah model <i>random effect</i> . Pada, model <i>autoregressive spastial</i> (SAR) berpengaruh signifikan terhadap gini ratio. Dari model SAR <i>random effect</i> (SAR-RE) yang terbentuk, lokasi yang berdekatan atau bertetangga berpengaruh positif terhadap gini ratio. Variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap gini ratio yaitu variabel Indeks Pembangunan Manusia (X1) dan luas panen palawija (X2)
4.	Maulana dan Julia (2022)	Pengaruh Indeks Pendidikan, Gini Rasio, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita terhadap Tingkat Kemiskinan di Enam Provinsi Indonesia Tahun 2015 – 2019	Untuk mengetahui pengaruh indeks pendidikan, gini rasio, jumlah penduduk dan pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan di enam provinsi indonesia tahun 2015 – 2019	Deskriptif kuantitatif dan analisis regresi data panel menggunakan model <i>fixed effect</i>	Variabel gini rasio secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Variabel indeks Pendidikan berpengaruh dengan probabilitas $\alpha = 20\%$ dan jumlah penduduk memiliki hubungan secara parsial negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan pendapatan perkapita tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

5.	Munandar , Karlina, Moechtar, Kasim, Setiawan, dan Prasetya (2021)	Penurunan Rasio Gini Provinsi Jawa Timur pada Masa Pandemi COVID-19 Sebagai Hasil dari Penerapan Program Bantuan Pangan Non Tunai	Untuk menghitung dan mendapatkan angka penurunan rasio gini sebagai hasil dari penerapan program BPNT di Provinsi Jawa Timur	Metode Counter Factual Analysis	Penerapan program BPNT pada 2020 dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur Indonesia yaitu mampu menurunkan Rasio Gini Provinsi Jawa Timur sebesar -1,10%.
6.	Hartati (2022)	Analisis Ketimpangan Ekonomi di Provinsi Papua	Untuk mengukur dan menganalisis analisis ketimpangan Ekonomi di Provinsi Papua	Deskriptif kuantitatif dengan pendekatan rasio gini	Ketimpangan tertinggi pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 0.398 (sedang), gini ratio perkotaan tertinggi tahun 2017 sebesar 0,322 dan gini ratio perdesaan tertinggi tahun 2021 sebesar 0,422. Distribusi pengeluaran kelompok 40% terbawah perkotaan tertinggi tahun 2021 sebesar 21,65 dan pengeluaran kelompok 40% terbawah perdesaan tertinggi tahun 2018 sebesar 16,00.
7.	Nina dan Rustariyuni (2018)	Determinan Kemiskinan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali	Menganalisis pengaruh gini rasio dan pengeluaran non makanan terhadap kemiskinan, kesejahteraan	Analisis jalur (<i>path analysis</i>)	Gini rasio tidak berpengaruh, pengeluaran non makanan berpengaruh positif dan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
8.	Widiasari, Zakiah, dan Sofyan (2019)	Analisis Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan	Mendeskripsikan distribusi pendapatan masyarakat Kecamatan Tapaktuan di Kabupaten Aceh Selatan.	Analisis Rasio Gini dan Kurva Lorentz	Mata pencaharian yang bervariasi: petani, pedagang, PNS, buruh dan nelayan. Nilai gini ratio untuk distribusi pendapatan tahun 2018 adalah sebesar 0,39 (kategori sedang).

9.	Febriaty dan Nurwani (2017)	Pengaruh Gini Ratio, PDRB Perkapita dan Tingkat Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara	Mengetahui pengaruh rasio gini, PDRB/ kapita dan tingkat inflasi terhadap tingkat kemiskinan, secara parsial dan simultan, dan variabel yang berpengaruh dominan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.	Analisis regresi linier berganda	Secara parsial gini ratio dan PDRB/Kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, sementara tingkat inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Secara simultan gini ratio, PDRB perkapita dan tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara
10.	Nuryuliani ngdyah (2022)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia	Menganalisis ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia	Analisis regresi linier berganda	Persamaan dan perbedaan karakteristik pada tiap provinsi yang berdekatan dapat menimbulkan peningkatan atau penurunan gini rasio/tingkat ketimpangan pengeluaran di Indonesia. Model Regresi SEM lebih baik dibandingkan model regresi OLS dalam penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pengeluaran di Indonesia karena terdapat dependensi spasial pada variabel dependennya. Pada model SEM, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap gini rasio adalah IPM, persentase penduduk miskin, dan investasi.

11.	Hamid dan Akram (2014)	Multi-dimensional Income Inequality in Pakistan	Untuk menganalisis secara rinci berbagai dimensi ketimpangan di tingkat nasional dan provinsi di Pakistan	Analisis Rasio Gini dan Kurva Lorentz	Kesenjangan Melebar dan meningkat dari tahun 2001 hingga 2008. Seperti tahun 2001-02, Gini rasio dihitung sebagai 0,27 dan pada 2007–08, mencapai 0,29. Itu juga telah diamati bahwa ketimpangan tertinggi di Sindh diikuti oleh Punjab, Khyber Provinsi Paktunkawa (KPK) dan Baluchistan
12.	Aizawa, Dekle dan Helble (2017)	Sources of Income Inequality : A Comparison of Japan and The United States	Untuk membandingkan sumber ketimpangan pendapatan di Jepang dan Amerika Serikat	Analisis Regresi	Ketimpangan diakibatkan perbedaan pendidikan dan status perkawinan. Di AS, disebabkan oleh pendidikan dan jam kerja Pendorong ketimpangan di Jepang adalah adanya penerapan pegawai tidak tetap. Di AS, diakibatkan oleh 5%–10% upah yang lebih rendah untuk orang Afrika-Amerika
13.	Sudswong, Pangprasopchoka, dan Amornbunhornvej (2021)	Occupational Income Inequality of Thailand: A Case Study of Exploratory Data Analysis beyond Gini Coefficient	Untuk mengetahui jenis ketimpangan di daerah pertanian dan non-pertanian	Analisis Koefisien Gini	Di provinsi pertanian, rasio gini rendah sementara provinsi non-pertanian rasio gini tinggi Selain itu, hasil juga menggambarkan besarnya kesenjangan pendapatan di antara jenis-jenis pekerjaan.
14.	Dang, Nguyen, dan Phung (2022)	Trends and Drivers of Inequality: Recent Evidence from Vietnam	Untuk mengetahui bukti tren dan pendorong ketidaksetaraan di Vietnam	Analisis dekomposisi dan regresi	Ketidaksetaraan antar provinsi menyumbang 22% dari ketimpangan, ketimpangan antar etnis menyumbang 15% dari total ketimpangan, Orang berpenghasilan tinggi lebih mungkin dapat profit dari pertumbuhan ekonomi

15.	Liu, Huo dan Chen (2022)	A Study of Household Income Inequality in China: Perspective of Educational Homogeneity Marriage	Untuk menganalisis struktur internal dari total pendapatan rumah tangga	Analisis Kepadatan Kernel	Pendapatan masyarakat meningkat, tingkat ketimpangan pendapatan RT berkembang. Distribusi total pendapatan rumah tangga berbeda signifikan dari sisi pendidikan kepala RT. Jumlah RT dengan tingkat pendidikan tinggi berpengaruh terhadap Pendapatan RT dengan kombinasi tingkat Pendidikan tinggi-rendah secara bertahap sedang ditingkatkan, sehingga proporsi pendapatan sosial terus meningkat.
16.	Sunesson (2022)	The Impact of Covid-19 on Income Inequality in Sweden Empirical Evidence Using Municipality Data	Untuk mengetahui dampak Covid-19 terhadap ketimpangan pendapatan	Pendekatan difference in difference	Covid-19 berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Sebagian besar kelompok masyarakat yang terpengaruh adalah yang berpenghasilan rendah.
17.	Hahm, Lee dan Park (2022)	Domestic and External Monetary Policy Shocks and Economic Inequality in The Republic of Korea	Untuk menyelidiki efek guncangan kebijakan moneter terhadap ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan di Republik Korea	Analisis Studi Panel Pendapatan	Guncangan kebijakan moneter domestik maupun eksternal terjadi efek <i>countercyclical</i> yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Untuk ketidaksetaraan kekayaan, efeknya berbeda. Guncangan kebijakan moneter domestik tidak signifikan, guncangan kebijakan eksternal diproksikan dengan fluktuasi arus modal bersih memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan kekayaan bersih.

18.	Niyimbani ra (2017)	Analysis of the Impact of Economic Growth on Income Inequality and Poverty in South Africa: The Case of Mpumalanga Province	Untuk menghitung dampak pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Provinsi Mpumalanga , Afrika Selatan	Model efek tetap dan regresi	Pertumbuhan ekonomi mengurangi kemiskinan tetapi bukan ketimpangan pendapatan. Temuan penelitian ini berimplikasi pada pembuat kebijakan untuk merancang strategi mengurangi ketimpangan pendapatan di Afrika Selatan. Studi ini diakhiri dengan mengusulkan langkah-langkah sosio-ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan manusia dalam ekonomi berbasis pengetahuan.
19.	Savoia (2020)	Income Inequality Convergence Across EU Regions	Mengetahui apakah telah terjadi konvergensi ketimpangan pendapatan di antara kawasan UE, Mengetahui sejauh mana kondisi awal daerah dan dana Kohesi Kebijakan mempengaruhi proses konvergensi.	Regresi konvergensi panel	Daerah NUTS2 konvergen ke tingkat ketimpangan pendapatan lebih tinggi, sehingga menjadi semakin tidak merata, Proses ini signifikan lebih cepat saat daerah memiliki karakteristik struktural yang sama, seperti tingkat kualitas tata kelola yang serupa, di daerah yang memenuhi syarat untuk Dana Kebijakan Kohesi kecepatannya konvergensi ketimpangan secara signifikan lebih cepat, karena itu menunjukkan bahwa mereka mungkin mendorong proses konvergensi

20.	Castillo dan Castillo (2020)	Economic Growth and Income Distribution in Peru	Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab distribusi pendapatan di Peru (IDP) selama periode 1985-2017.	Analisis Rasio Gini	PDB per kapita dan pertumbuhan yang melambat dan tidak berkelanjutan berdampak negatif terhadap IDP. Ini menunjukkan adanya hubungan kausal berbentuk W. Penulis memberikan rekomendasi : menyeimbangkan pasar-hubungan negara-masyarakat dengan pasar bebas dan kebijakan ekonomi non-penyewa, kebijakan investasi SDM, inovasi dan teknologi, dan memperkuat modal sosial, dari pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan.
-----	------------------------------	---	---	---------------------	--

Berdasarkan hasil *mapping* dapat diketahui beberapa penelitian sejenis telah dilakukan sebelumnya. Penelitian mengenai ketimpangan dilakukan untuk menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan, faktor-faktor yang mempengaruhi, dampak situasi terkini terhadap ketimpangan dan lain sebagainya. Beberapa analisis data dapat digunakan untuk menganalisis ketimpangan antara lain regresi panel, analisis gini rasio, dan analisis regresi berganda.

Keaslian (*novelty*) dari penelitian yang akan dilakukan terletak pada obyek dan topik penelitian yakni tentang ketimpangan pendapatan petani padi di Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan yang sebelumnya belum pernah diteliti. Adapun pembeda penelitian ini dari penelitian yang telah ada yakni dari tujuan dilakukannya penelitian antara lain untuk mengidentifikasi profil petani padi menggunakan analisis deskriptif; kemudian menganalisis

penerimaan dan pendapatan petani padi menggunakan analisis penerimaan dan pendapatan; dan menganalisis ketimpangan pendapatan petani padi menggunakan rasio gini dan kurva Lorenz; dimana tujuan-tujuan dalam penelitian ini belum pernah dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya di Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangan terhadap PDB, penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri (Latumaresa, 2015). Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Oleh karenanya sektor pertanian adalah sektor yang paling dasar dalam perekonomian yang merupakan penopang kehidupan produksi sektor-sektor lainnya seperti subsektor perikanan, subsektor perkebunan, subsektor perternakan (Putong, 2010).

Pertanian adalah suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan pada proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pertanian dalam arti sempit dinamakan pertanian rakyat. Sedangkan, pertanian dalam arti luas meliputi pertanian dalam arti sempit, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Secara garis besar, pengertian pertanian dapat diringkas menjadi empat komponen yang tidak terpisahkan. Keempat komponen tersebut meliputi: (1) proses produksi, (2) petani atau pengusaha pertanian, (3) tanah tempat usaha, dan (4) usaha pertanian (Soetriono et al., 2006).

Pembangunan di bidang pertanian adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena sebagian besar rakyat Indonesia mengkonsumsi beras

dan bekerja di sektor pertanian, sedangkan peranan penting dari sektor pertanian itu sendiri adalah dalam membentuk penyediaan kesempatan kerja dan berkontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto dan ekspor (Tambunan, 2006).

Sektor pertanian merupakan sektor yang dapat diandalkan dalam pemulihan perekonomian nasional, mengingat sektor pertanian terbukti masih dapat memberikan kontribusi pada perekonomian nasional walaupun badai krisis menerpa. Hal ini dikarenakan terbukanya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan tingginya sumbangan devisa yang dihasilkan (Badan Pusat Statistika, 2022).

Di Indonesia pertanian sangatlah bermacam-macam, ada berbagai golongan pertanian, antara lain (Badan Pusat Statistik, 2022):

1. Sawah adalah pertanian yang menggunakan lahan basah dan air yang digunakan dalam pertanian sangat banyak.
2. Tegalan adalah jenis pertanian yang menggunakan lahan sangat kering dan air yang digunakan hanya tergantung dengan air hujan saja, biasanya lahan ini tidak ditanami setiap tahun karena lahan yang kering dan musim hujan yang tidak datang setiap bulannya.
3. Pekarangan adalah jenis pertanian yang lahannya berada di dekat rumah biasanya berada di belakang atau samping rumah, lahan ini juga menggunakan air hujan.

Terdapat tiga alasan mengapa pembangunan pertanian Indonesia harus berkelanjutan yaitu: pertama, sebagai negara agraris, peranan sektor pertanian Indonesia dalam sistem perekonomian nasional masih dominan. Kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto adalah sekitar 20 persen dan menyerap 50 persen lebih tenaga kerja di pedesaan. Kedua, agribisnis dan agroindustri memiliki peranan yang sangat vital dalam mendukung pembangunan

sektor lainnya. Ketiga, pembangunan pertanian berkelanjutan menjadi keharusan agar sumberdaya alam yang ada sekarang ini dapat terus dimanfaatkan untuk waktu yang relatif lama. Sektor pertanian tetap menduduki peran vital yang mendukung kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia.

Pertanian sebagai suatu sistem yang merupakan perpaduan antara sub sistem fisik dan sub sistem manusia. Yang termasuk kedalam sub sistem fisik yaitu tanah, iklim, hidrologi, topografi dengan proses alamiahnya. Sedangkan yang termasuk pada sub sistem manusia antara lain tenaga kerja, kemampuan ekonomi, serta kondisi politik daerah setempat. Pertanian di Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Hak milik lahan pertanian para petani umumnya sempit kurang dari 0,5 ha.
2. Pengolahan tanah di daerah yang padat penduduknya dilakukan secara intensif sedangkan di daerah yang jarang penduduknya dilakukan secara ekstensif.
3. Merupakan pertanian sub sisten dengan modal yang kecil serta alat dan sistem pertanian yang masih sederhana.

Sebagai suatu usaha, pertanian memiliki dua ciri penting : selalu melibatkan barang dalam volume besar dan proses produksi memiliki risiko yang relatif tinggi. Dua ciri khas ini muncul karena pertanian melibatkan makhluk hidup dalam satu atau beberapa tahapnya dan memerlukan ruang untuk kegiatan itu serta jangka waktu tertentu dalam proses produksi. Beberapa bentuk pertanian modern (misalnya budidaya alga, hidroponika) telah dapat mengurangi ciri-ciri ini tetapi sebagian besar usaha pertanian dunia masih tetap demikian.

2.2.2 Agribisnis

Davis dan Goldberg (1957) dalam Krisnamurthi (2020) mendefinisikan agribisnis sebagai berikut:

“The sum total of all operations involved in the manufacture and distribution of farm supplies; production operations on the farm; and the storage, processing, and distribution of farm commodities and items made from them”

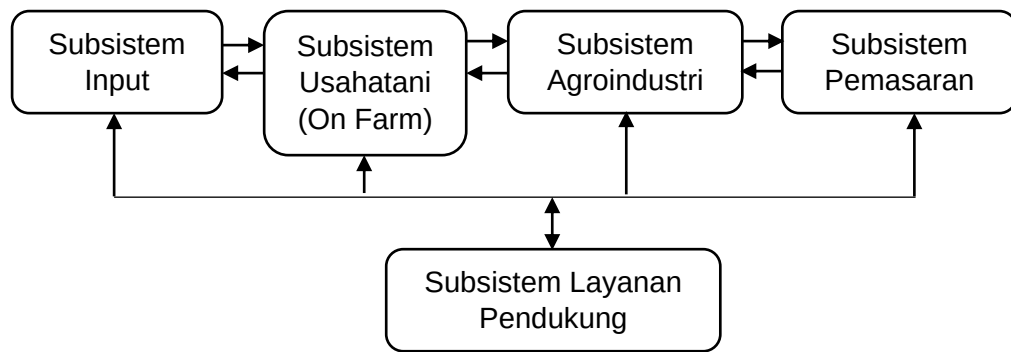
(Agribisnis adalah penjumlahan total dari seluruh kegiatan yang menyangkut manufaktur dan distribusi dari sarana produksi pertanian, kegiatan yang dilakukan usahatani, serta penyimpanan, pengolahan, dan distribusi dari produk pertanian; serta produk-produk lain yang dihasilkan dari pertanian).

Pendefinisian yang komprehensif juga memberikan gambaran pengertian agribisnis yang luas, sebagaimana yang dituliskan oleh Harling (1995) dalam Krishnamurti (2020) sebagai rangkuman atas sejumlah tulisan, termasuk tulisan Davis dan Goldberg tersebut.

“Agribusiness included all operations involved in the manufacture and distribution of farm supplies; production operations on the farm; the storage processing and distribution of form commodities made from them, trading (wholesaler, retailers), consumers to it, and all non farm firms and institution serving them.”

(Agribisnis mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan produksi, distribusi, dan pasokan input pertanian, seperti bibit, pupuk, alat, dan mesin); kegiatan produksi usahatani; penyimpanan, pengolahan, dan distribusi produk pertanian yang dihasilkan; perdagangan termasuk grosir pedagang besar atau eceran; kegiatan usaha untuk mengonsumsi produk pertanian seperti restoran, pasar, dan supermarket; serta seluruh perusahaan dan lembaga non pertanian yang melayani kegiatan-kegiatan itu).

Definisi agribisnis menjelaskan bahwa agribisnis memiliki lingkup yang jauh lebih luas dari sekedar pengertian bertani, bercocok tanam, atau pertanian primer. Agribisnis adalah sejumlah usaha yang terangkai dalam suatu sistem dan terdiri atas beberapa subsistem. Sistem agribisnis mencakup empat subsistem sebagai berikut (Krisnamurthi, 2020):



Gambar 2.1 Sistem Agribisnis

1. Subsistem input (hulu) atau *off-farm up-stream*, yaitu subsistem pengadaan sarana produksi pertanian. Subsistem tersebut mendukung kegiatan *on-farm* (pertanian primer) dengan menyediakan faktor produksi yang dibutuhkan untuk kegiatan pertanian primer. Contohnya adalah industri pupuk, industri pakan, industri peralatan dan mesin pertanian, industri obat-obatan dan vaksin, serta bibit atau benih.
2. Subsistem *on-farm* (pertanian primer/ budidaya), yaitu subsistem yang melakukan usaha tani atau proses budidaya untuk menghasilkan produk pertanian primer (komoditi pertanian). Contohnya adalah usahatani tanaman pangan, usaha ternak, budidaya tanaman hias, budidaya perikanan dan budidaya tanaman perkebunan.
3. Subsistem pengolahan dan pemasaran (*off-farm down stream*) atau subsistem hilir. Subsistem ini yang melakukan aktivitas bisnis pengolahan dan pemasaran produk agribisnis.
 - a. Subsistem pengolahan, yakni subsistem yang melakukan penanganan (*handling*), pengemasan, pengepakan dan pengolahan produk pertanian primer menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Industri florikultur, tepung tapioka, kecap, dan sebagainya.

- b. Subsistem pemasaran, yakni subsistem yang melakukan aktivitas pemasaran produk pertanian primer maupun produk olahan hasil pertanian.
4. Subsistem penunjang (*supporting system*). Subsistem ini merupakan subsistem yang mendukung semua aktivitas dari semua subsistem primer utama dari mulai hulu, *on-farm* dan hilir. Contoh subsistem penunjang antara lain kebijakan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, kelembagaan pertanian, lembaga keuangan untuk menunjang usaha agribisnis dan lembaga penelitian dan perguruan tinggi.

Gambar 2.1 tersebut, menunjukkan saling keterkaitan antara subsistem-subsistem dalam sistem agribisnis. Keterkaitan subsistem-subsistem ini bersifat timbal balik atau simultan yang saling mempengaruhi (*forward and backward linkage*). Sebagai contoh, subsistem *input* pertanian harus terkait dengan subsistem usahatani atau sebaliknya, demikian pula dengan subsistem pemasaran produk harus terkait dengan subsistem-subsistem sebelumnya, yaitu pengolahan dan juga dengan subsistem sarana penunjang.

Pengertian keterkaitan, mempunyai implikasi hubungan yang sinergis di antara sub-sub sistem tersebut, apa yang diperlukan harus sesuai dengan yang diperlukan oleh masing-masing subsistem, untuk memenuhi keinginan konsumen/pelanggan yang mau dituju dalam subsistem pemasaran.

2.2.3 Petani

Petani adalah orang yang mengusahakan pertanian dan mengelola tanah untuk menanam dan memelihara tanaman seperti padi, bunga, dan buah-buahan. Petani menginginkan mendapatkan hasil dari tanaman tersebut yang dapat digunakan sendiri ataupun dijual kepada orang lain. Petani juga dapat menyediakan bahan baku industri seperti serelia untuk minuman beralkohol,

buah untuk jus, kapas atau wol untuk tekstil, serta masih banyak lagi yang lainnya (Nuraini, Saputro, dan Helbawanti, 2021).

Menurut Arifin (2015), 70% masyarakat miskin Indonesia adalah petani. Hal ini bertentangan dengan anggapan bahwa Indonesia merupakan negara agraris tapi justru faktor fundamental agraria sebagian besar miskin. Petani yang miskin cenderung petani desa. Ada beberapa faktor utama penyebab semakin terpuruknya kondisi ekonomi masyarakat desa itu (petani, nelayan, perajin, peternak dan buruh), sebagai berikut :

1. Kuatnya posisi pedagang perantara yang didukung oleh birokrat perdesaan yang juga turut menikmati sebagian keuntungana dari mekanisme pasar yang tidak berpihak pada petani
2. Seluruh pasar baik lokal, regional maupun ekspor umumnya telah dikuasai pedagang dengan distribusi pendapatan yang semakin tidak adil bagi produsen di perdesaan.
3. Bantuan-bantuan pemerintah seperti Jaring Pengamanan Sosial (JPS) sangat kecil yang benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi target.
4. Tingkat pendidikan masyarakat desa yang relatif rendah sehingga tidak mampu menerima modernisasi dalam upaya meningkatkan teknologi untuk mengefisiensikan kegiatan ekonomi mereka.

Ciri-ciri kehidupan petani (Nuraini, Saputro, dan Helbawanti, 2021) adalah sebagai berikut:

1. Kehidupan petani masih berhubungan dengan warga lain. Petani saling mengenal dan juga bergaul antara satu dengan yang lainnya.
2. Petani biasanya memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil pertanian.
3. Petani berusaha untuk mempertahankan tradisi yang sudah berjalan dari nenek moyang. Petani memegang teguh pedoman yang sudah ada.

4. Dalam kegiatan pertanian, tidak ada pembagian kerja berdasarkan dengan keahlian yang ada. Namun biasanya didasarkan dengan usia dan jenis kelamin.

2.2.4 Padi

Padi merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun yang berasal dari dua benua yaitu Asia dan Afrika Barat tropis dan subtropis. Penanaman padi sendiri sudah dimulai sejak Tahun 3.000 sebelum masehi di Zhejiang, Tiongkok (Purwono dan Purnamawati, 2007). Hampir setengah dari penduduk dunia terutama dari negara berkembang termasuk Indonesia sebagian besar menjadikan padi sebagai makanan pokok yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan pangannya setiap hari (Rahmawati, 2006). Hal tersebut menjadikan tanaman padi mempunyai nilai spiritual, budaya, ekonomi, maupun politik bagi bangsa Indonesia karena dapat mempengaruhi hajat hidup banyak orang (Utama, 2015). Padi sebagai makanan pokok dapat memenuhi 56 – 80% kebutuhan kalori penduduk di Indonesia (Syahri dan Somantri, 2016).

Kegiatan pembudidayaan tanaman padi dimulai dari persemaian, persiapan dan pengolahan lahan sawah, penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen.

a. Persemaian

Membuat persemaian merupakan langkah awal bertanam padi. Pembuatan persemaian memerlukan suatu persiapan yang sebaik-baiknya, sebab benih di persemaian ini akan menentukan pertumbuhan padi di sawah, oleh karena itu persemaian harus benar-benar mendapat perhatian, agar harapan untuk mendapatkan bibit padi yang sehat dan subur dapat tercapai.

b. Persiapan dan Pengolahan Lahan Sawah

Pengolahan tanah bertujuan mengubah keadaan tanah pertanian dengan alat tertentu hingga memperoleh susunan tanah (struktur tanah) yang

dikehendaki oleh tanaman. Pengolahan tanah sawah terdiri dari beberapa tahap, diantaranya pembersihan, pencangkulan, pembajakan, penggaruan dan perataan.

c. Penanaman

Bibit di persemaian yang telah berumur 17-25 hari (tergantung jenis padinya, genjah/dalam) dapat segera dipindahkan ke lahan yang telah disiapkan. Dalam menanam bibit padi, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sistem larikan (cara tanam), jarak tanam, jumlah tanaman tiap lubang, kedalaman menanam bibit dan cara menanam.

d. Pemeliharaan

Dalam pemeliharaan tanaman padi ada beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya meliputi, penyulaman dan penyiangan, pengairan, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit.

e. Panen dan Pasca Panen

Panen dilakukan jika bulir padi 80 % menguning dan malainya menunduk. Alat yang digunakan untuk memanen adalah ketam atau sabit. Setelah padi dipanen maka segera dirontokkan dari malainya dengan perontok mesin atau tenaga manusia dan hasil perontokan padi disebut dengan gabah. Selanjutnya dilakukan pengeringan gabah dengan sinar matahari hingga 2-3 hari. Setelah gabah kering lalu digiling untuk memisahkan gabah dari kulit bijinya. Gabah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bulir padi yang telah dipisahkan dari tangkainya (jerami) Dalam perdagangan komoditi, gabah adalah tahap yang penting dalam pengolahan padi sebelum dikonsumsi karena perdagangan padi dalam partai besar dilakukan dalam bentuk gabah. Dalam definisi teknis perdagangan untuk gabah, yaitu hasil tanaman padi yang telah dipisahkan dari tangkainya dengan cara perontokan. Gabah Kering Panen (GKP) adalah gabah yang mengandung kadar air lebih besar dari 18%, hampa/kotoran

lebih besar dari 6%, butir hijau/mengapur lebih besar dari 7%, butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir merah maksimal 3%. Gabah Kering Simpan (GKS), adalah gabah yang mengandung kadar air lebih besar dari 14%, kotoran/hampa lebih besar dari 3%, butir hijau/mengapur lebih besar dari 5%, butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir merah maksimal 3%. Gabah Kering Giling (GKG), adalah gabah yang mengandung kadar air maksimal 14%, kotoran/hampa maksimal 3%, butir hijau/mengapur maksimal 5%, butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir merah maksimal 3%.

2.2.5 Faktor Produksi Usahatani Padi

Kegiatan produksi usahatani padi sawah tidak akan memberi hasil produksi yang optimal tanpa didukung oleh penggunaan faktor produksi yang baik. Penggunaan faktor produksi berupa, lahan, benih, pupuk dan tenaga kerja dapat memberikan hasil produksi yang baik bagi usahatani padi sawah (Soekartawi, 2003) Dalam usahatani, produksi diperoleh melalui suatu proses yang cukup panjang dan penuh resiko. Panjangnya waktu yang dibutuhkan tidak sama tergantung pada jenis komoditas yang diusahakan. Tidak hanya waktu, kecukupan faktor produksi pun ikut sebagai penentu pencapaian produksi. Proses produksi baru bisa berjalan bila persyaratan ini yang dibutuhkan dapat dipenuhi. Persyaratan ini lebih dikenal dengan nama faktor produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dalam usahatani yaitu sebagai berikut:

a. Luas Lahan

Tanah merupakan faktor produksi terpenting dalam pertanian karena tanah merupakan tempat dimana usahatani dapat dilakukan dan tempat hasil produksi dikeluarkan karena tanah tempat tumbuh tanaman. Tanah memiliki sifat tidak sama dengan faktor produksi lain yaitu luas relatif tetap dan permintaan akan lahan semakin meningkat sehingga sifatnya langka (Mubyarto, 1997).

Menurut Hernanto (1996) dalam (Jamil dkk, 2002), bahwa terdapat empat golongan petani berdasarkan luas lahan yang diusahakan yaitu :

- (1) Golongan petani luas (lebih dari 2 hektar)
- (2) Golongan petani sedang (0,5-2 hektar)
- (3) Golongan petani sempit (kurang dari 0,5 hektar)
- (4) Golongan buruh tani tidak bertanah

Luas penguasaan lahan pertanian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses produksi ataupun usahatani dan usaha pertanian. Semakin luas lahan yang digarap/ditanami, semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut. Ukuran lahan pertanian dapat dinyatakan dengan hektar (Ha). Di pedesaan petani masih menggunakan ukuran tradisional. Misalnya patok dan jengkal (Rahim dan Hastuti, 2007). Faktor produksi tanah tidak hanya dilihat dari segi luas atau sempitnya saja, tetapi juga dilihat dari segi lain seperti produktivitas tanah yang bergantung pada (jenis tanah, macam penggunaan lahan seperti sawah, keadaan pengairan, sarana prasarana), topografi (tanah dataran tinggi, dataran rendah atau daerah pantai), kepemilikan tanah, nilai tanah serta fragmentasi tanah. Jenis tanah mengarahkan petani kepada pilihan komoditas yang sesuai, pilihan teknologi, serta pilihan metode pengolahan tanah. Selain itu juga mempengaruhi petani dalam pemilihan tanaman, pilihan waktu bertanam dan cara bercocok tanam.

b. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah suatu alat kekuatan fisik dan otak manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari manusia dan ditujukan pada usaha produksi. Setiap usaha pertanian yang akan dilaksanakan pasti memerlukan tenaga kerja. Oleh karena itu dalam analisa ketenagakerjaan dibidang pertanian, penggunaan tenaga kerja dinyatakan oleh besarnya curahan tenaga kerja yang dipakai adalah besarnya tenaga kerja efektif yang dipakai. Skala usaha akan mempengaruhi besar

kecilnya berapa tenaga kerja yang dibutuhkan dan pula menentukan macam tenaga kerja yang bagaimana diperlukan (Soekartawi, 2003).

Tenaga kerja dalam pertanian adalah pencurahan tenaga kerja dalam proses pertanian yang ditujukan untuk menghasilkan produksi pertanian. Pencurahan tenaga kerja usahatani dimaksudkan agar proses produksi dapat berjalan maka pada tiap tahapan kegiatan usahatani diperlukan masukan tenaga kerja yang sepadan. Dengan adanya masukan tenaga kerja yang sepadan diharapkan proses produksi akan berjalan lebih optimal sehingga produksi pertanian meningkat. Jenis tenaga kerja dalam kegiatan usahatani meliputi:

- (1) Tenaga kerja manusia, dapat diperoleh dari dalam keluarga atau dari luar keluarga. Tenaga kerja manusia dibedakan atas tenaga kerja pria, wanita, dan anak-anak. Tenaga kerja manusia dapat mengerjakan semua jenis pekerjaan usahatani berdasarkan tingkat kemampuannya.
- (2) Tenaga kerja ternak, digunakan untuk pengolahan tanah dan untuk pengangkutan.
- (3) Tenaga kerja mekanik/mesin, tenaga kerja mekanik bersifat substitusi pengganti ternak dan atau manusia.

c. Benih

Menurut Suparyono (1997) bibit yang bermutu adalah bibit yang telah dinyatakan sebagai bibit yang berkualitas tinggi dengan jenis tanaman unggul. Bibit yang berkualitas tinggi memiliki daya tumbuh lebih dari 90%, adapun sifat-sifat yang dimiliki bibit unggul pada umumnya adalah: (1) Daya hasil tinggi (2) Tahan terhadap gangguan serangga dan penyakit (3) Tahan roboh atau tumbang (4) Umur yang pendek (5) Respon yang tinggi untuk penggunaan pupuk dalam jumlah yang tinggi

Bibit atau benih merupakan salah satu faktor produksi yang habis dalam satu kali pakai proses produksi. Oleh karena itu petani harus berhati-hati dalam

setiap memilih benih sehingga diperoleh benih yang baik dan bermutu yang dapat menunjang produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sumber benih yang digunakan hendaknya dari kelas yang lebih tinggi. Untuk mengetahui keadaan benih yang baik dapat dilihat dari keadaan fisik benih dan kemurnian benih. Benih yang bersertifikat atau berlabel dapat diperoleh pada kios-kios atau toko pertanian maupun penyalur benih. Benih tersebut merupakan benih sebar (*extension seed*) yang dihasilkan dan disebar oleh para penangkar benih atau kebun-kebun benih. Varietas yang ditanam hendaknya selain disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, memperhatikan pula aspek kecocokan lahan, umur tanaman dan ketahanan terhadap hama serta penyakit (AAK, 2003).

d. Pupuk

Pupuk adalah zat atau bahan makanan yang diberikan kepada tanaman dengan maksud agar zat tersebut dapat diserap oleh tanaman. Pupuk merupakan zat yang berisi satu atau lebih nutrisi yang digunakan untuk mengembalikan unsur-unsur yang habis terhisap tanaman dari tanah. Dalam pemberian pupuk harus dengan dosis yang tepat serta waktu yang tepat pula agar keseimbangan zat mineral dapat dipertahankan sehingga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian.

e. Alat dan Mesin Pertanian

Alat dan mesin pertanian adalah berbagai alat dan mesin yang digunakan dalam usaha pertanian, dan juga berguna untuk mempermudah budidaya serta peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Pengelompokan penggunaa istilah alat dan mesin pertanian dapat diketahui dari kriteria-kriteria seperti bentuk mekanisme yang digunakan, tenaga penggerak, dan jumlah prosesnya. Bentuk mekanisme yang digunakan oleh alat lebih sederhana, sedangkan mesin menggunakan mekanisme yang lebih kompleks. Tenaga penggerak yang digunakan oleh alat umumnya manual, sedangkan mesin menggunakan mesin.

Jumlah proses yang digunakan oleh alat sedikit, sedangkan mesin menggunakan proses yang banyak.

Alat pertanian umumnya bersifat tradisional seperti sprayer tipe gendong dan alat penanam padi (transplanter). Mesin pertanian umumnya bersifat modern, seperti traktor roda dua, mesin penggiling dan mesin pemanen padi. Alat dan mesin pertanian terbagi menjadi dua yaitu, (1) alat dan mesin bersifat tradisional, (2) alat dan mesin bersifat modern. Alat dan mesin pertanian adalah alat yang digunakan untuk produksi tanaman. Alat dan mesin pengolahan hasil pertanian adalah alat dan mesin yang digunakan untuk menangani atau mengolah hasil tanaman contohnya antara lain mesin pengering, mesin sortasi dan sebagainya

2.2.6 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan *output* perkapita yang berlangsung terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai kenaikan jangka panjang kemampuan suatu negara dalam meningkatkan ketersediaan barang-barang ekonomi penduduknya. Kemampuan ini tumbuh mengikuti kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukannya. Kondisi ini merupakan satu indikator pertumbuhan ekonomi. Kondisi daerah yang secara geografis dan sumber alam yang berbeda, menimbulkan kondisi ada daerah yang lebih makmur dan lebih maju dibandingkan daerah lain (Purba, 2021).

Pendapat lain menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (Adisasmita, 2013). Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut

dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada (Todaro, 2006).

Menurut Sukirno (2015), pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses penambahan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat sehingga perekonomian dapat mengalami perkembangan. Untuk menghitung nilai barang dan jasa terdapat tiga cara perhitungan, yaitu:

1. Cara pengeluaran : dengan menghitung jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh negara tersebut
2. Cara produksi atau cara produk netto : cara ini menghitung jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh beberapa sektor menurut lapangan usaha di suatu perekonomian negara
3. Cara pendapatan : diperoleh dengan menghitung jumlah pendapatan yang ditetapkan oleh faktor produksi.

Terdapat rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2022):

$$\text{Laju Pertumbuhan PDB} = \frac{\text{PDB}_t - \text{PDB}_{t-1}}{\text{PDB}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

PDB_t = PDB tahun lalu

PDB_{t-1} = PDB tahun sebelumnya

Adanya perkembangan dalam kegiatan perekonomian tersebut akan menyebabkan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi seringkali disamakan dengan pembangunan ekonomi, namun sebenarnya keduanya memiliki arti yang berbeda walaupun keduanya sama-sama menekankan pada aspek kenaikan PDB. Pertumbuhan ekonomi hanya melihat dari peningkatan PDB tanpa membandingkannya dengan laju pertumbuhan penduduk. Kemudian dalam pembangunan ekonomi dapat dikatakan ada

peningkatan apabila laju peningkatan PDB dapat melebihi laju pertumbuhan penduduknya. Perbedaan lainnya adalah penekanan pertumbuhan ekonomi hanya pada peningkatan kondisi yang ada, namun tidak meninjau apa dampaknya. Sedangkan pada pembangunan ekonomi, perbaikan lain dilakukan selain hanya secara fisik, seperti perbaikan pada kondisi ekonomi, kelembagaan, struktur yang

ada serta sikap sehingga perbaikan akan lebih menyeluruh dan dapat mempunyai nilai guna yang lebih.

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini dilakukan dengan cara pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan hubungan ekonomi regional melalui pergeseran aktifitas ekonomi yang sebelumnya sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Pada akhirnya, arah pembangunan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga pemerataan akan menjadi lebih baik (Badan Pusat Statistik, 2022).

Pembangunan ekonomi merupakan usaha yang dilakukan untuk mengubah suatu perekonomian yang kurang maju, sangat tradisional dan berpendapatan rendah menjadi suatu perekonomian yang modern serta mencapai taraf kemakmuran yang tinggi, pembangunan ekonomi ini dapat terwujud apabila apabila pendapatan per kapita masyarakat terus menerus bertambah pada tingkat yang cukup cepat. Kemakmuran masyarakat merupakan suatu ukuran yang menunjukkan taraf kehidupan rata-rata yang sudah yang dicapai oleh masyarakat dalam suatu negara , pendapatan per kapita selalu digunakan sebagai ukuran kasar untuk menunjukkan taraf kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat, sedangkan pendapatan per kapita merupakan

pendapatan rata-rata yang diperoleh masyarakat di suatu negara (Sukirno, 2015).

Para ahli ekonomi telah banyak membuat analisis untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat usaha pembangunan ekonomi, beberapa masalah tersebut adalah (Sukirno, 2015) :

- a. Pertanian tradisional. Kekurangan pengetahuan, modal, infrastruktur pertanian, serta kurangnya aplikasi peralatan modern dalam kegiatan pertanian, sehingga produktifitas petani masih rendah.
- b. Kekurangan dana modal dan modal fisik. Salah satu cara untuk pengembangan suatu perekonomian adalah dengan mewujudkan modernisasi dalam segala bidang ekonomi, seperti kegiatan pertanian, kegiatan industri, modernisasi dalam pemerintahan, sektor perdagangan dan jasa, hal ini diperlukan dua faktor penting yang sangat terbatas di negara berkembang yaitu modal dan tenaga ahli.
- c. Peranan tenaga terampil dan berpendidikan. Dalam pembangunan ekonomi selain diperlukan dana modal juga diperlukan peranan tenaga terampil dan berpendidikan yang berperan sebagai pelaksana pembangunan perekonomian, namun di negara berkembang tersedia dalam jumlah yang terbatas.
- d. Perkembangan penduduk pesat. Pada negara berkembang pertumbuhan penduduk di beberapa negara berkembang jumlah penduduknya besar dan pertumbuhan penduduk cepat, yang terjadi adalah di satu pihak negara tersebut memiliki sumber-sumber dan kemampuan yang terbatas dalam melakukan pembangunan, namun mereka harus mewujudkan kesempatan kerja dan berusaha menaikkan tingkat kemakmuran untuk sebagian besar penduduk yang bertambah.

- e. Masalah institusi, sosial, kebudayaan dan politik. Pada negara maju faktor-faktor ini tidak lagi menjadi penghambat pembangunan ekonomi, namun di negara berkembang masih menjadi faktor yang menghambat pembangunan ekonomi, yang mana pembangunan ekonomi memerlukan situasi politik yang stabil, cara hidup dan cara berfikir yang tradisional seringkali menyebabkan masyarakat bertindak tidak rasional, perubahan institusi juga berperan penting untuk mempercepat proses serta menambah efisiensi pembangunan ekonomi, seperti institusi keuangan (perbankan), institusi pendidikan, proses administrasi pemerintah.

Menurut Sukirno (2015) terdapat beberapa kebijakan-kebijakan yang bisa diterapkan pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi, diantaranya yaitu:

- a. Kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi. Biasanya negara dengan produktivitas yang rendah memiliki tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, dengan demikian negara perlu melakukan diversifikasi dengan cara melakukan pembaharuan pada kegiatan ekonomi yang masih tradisional kearah yang lebih modern, serta mengembangkan kegiatan ekonomi yang baru yang dapat mempercepat transformasi kegiatan perekonomian kearah yang modern.
- b. Mengembangkan Infrastruktur Modernisasi ekonomi juga harus didukung dengan infrastruktur yang modern pula, karena kegiatan perekonomian memerlukan infrastruktur untuk berkembang, seperti jalan, jembatan, pelabuhan laut, bandara, kawasan irigasi, penyediaan air, listrik, jalur telekomunikasi, kawasan industri, dan sebagainya yang mana akan diperlukan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan efisiensinya.
- c. Meningkatkan tabungan dan investasi. Rendahnya pendapatan masyarakat menyebabkan rendahnya nilai tabungan yang dimiliki masyarakat,

sedangkan pembangunan memerlukan tabungan yang besar untuk membiayai investasi yang dilakukan, kekurangan investasi ini juga menjadi penghambat pembangunan ekonomi, dalam hal ini langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menarik investor luar negeri untuk bekerjasama dibidang investasi sehingga bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan.

- d. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Pendidikan merupakan hal penting dalam pembangunan ekonomi karena dengan pendidikan akan meningkatkan pengetahuan, pengalaman, ilmu serta keahlian masyarakat, sehingga bisa ikut berperan dalam pembangunan.
- e. Mengembangkan institusi yang mendorong pembangunan. Pembangunan ekonomi harus diimbangi pula dengan pengembangan intitusi yang bisa berperan untuk mempercepat atau mendukung proses pembangunan, seperti institusi keuangan, pendidikan, administrasi pemerintah daan lain sebagainya.
- f. Merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi. Pada tahap permulaan proses pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan harus dirumuskan, sehingga dari perencanaan tersebut bisa dilakukan penyeselarasan dengan program jangka panjang, sejauh mana investasi swasta dan pemerintah perlu dilakukan, jumlah pembelanjaan dan sumber keuangan yang digunakan, dan lain sebagainya.

2.2.7 Pendapatan Rumah Tangga Pertanian

Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan baik yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari balas jasa faktor produksi tenaga kerja (upah dan gaji, keuntungan, bonus, dan lain lain), balas jasa kapital (bunga, bagi hasil, dan lain

lain), dan pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain (transfer) (Badan Pusat Statistik, 2023).

Menurut Santoso dan Handayani (2019) menjelaskan bahwa mengelola keuangan adalah suatu tindakan untuk membantu perencanaan, pemecahan masalah serta pembuatan keputusan dalam manajemen keuangan suatu usaha. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023), pendapatan adalah perhitungan banyaknya uang yang akan diterima. Dalam mengukur kondisi ekonomi seseorang atau rumah tangga, salah satu konsep yang paling sering digunakan adalah melalui tingkat pendapatan. Pendapatan menunjukkan seluruh uang yang diterima seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Dengan kata lain pendapatan juga dapat diuraikan sebagai keseluruhan penerimaan yang diterima pekerja atau buruh, baik berupa fisik maupun non fisik selama ia melakukan pekerjaannya pada suatu perusahaan, maka instansi diharapkan agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan terpenuhi kebutuhan tersebut, maka akan tercapai kehidupan yang sejahtera. Dapat dikatakan bahwa pendapatan merupakan faktor terpenting bagi manusia di dunia ini, untuk kelangsungan hidup suatu usaha, pendapatan ini sangat berpengaruh.

Menurut Boediono (2002), pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Jumlah faktor – faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
2. Harga per unit dari masing – masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
3. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan

Menurut Case dan Fair (2002), terdapat beberapa sumber pendapatan rumah tangga, antara lain:

1. Upah atau gaji. Upah yang didapat oleh seseorang merupakan total penerimaan atau hasil yang diberikan oleh suatu perusahaan atas prestasi kerjanya. Penerimaan yang didapat diberikan sesuai dengan kesepakatan (akad), artinya pendapatan yang diterima bisa diberikan harian, mingguan, ataupun bulanan. Terutama untuk pemberian gaji bulanan, para pelaku rumah tangga harus bisa memaksimalkan jumlah penghasilan yang diberikan oleh suami mereka agar tercukupinya kebutuhan keluarga untuk beberapa waktu kedepan.
2. Pendapatan dari kekayaan. Tidak sedikit kekayaan yang besar saat ini diwarisi dari generasi terdahulu dan biasanya kekayaan semacam ini berasal dari warisan yang diperoleh dari orang tua yang memiliki harta lebih yang diwariskan kepada keturunannya agar bisa dijaga dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kekayaan seperti ini tidak hanya berupa uang saja, melainkan dapat berupa lahan kosong seperti sawah, kebun, bangunan, emas, dan lain-lain.
3. Pendapatan yang diperoleh dari pembayaran tunjangan pemerintah. Pembayaran tunjangan adalah pembayaran yang diberikan oleh Pemerintah kepada orang-orang yang kurang mampu seperti fakir miskin, kaum duafa, dan seterusnya. Pembayaran seperti ini dapat berupa subsidi, BLT (bantuan langsung tunai), BOS (bantuan operasional sekolah), dan lain-lain. Dengan demikian pembayaran tunjangan dapat mengurangi jumlah ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan.

Menurut BPS, golongan pendapatan penduduk dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Golongan pendapatan sangat tinggi dengan rata-rata lebih dari Rp 3.500.000 per bulan;

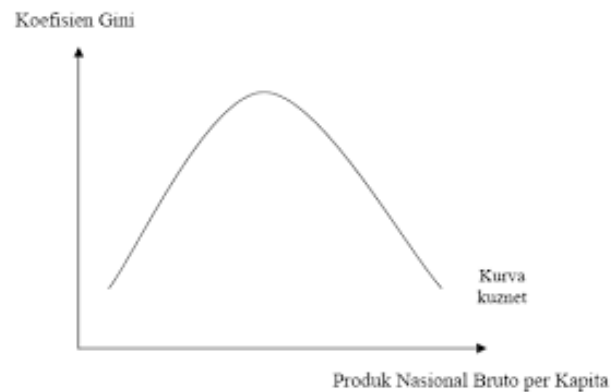
2. Golongan pendapatan tinggi dengan rata-rata antara Rp 2.500.000 – Rp 3.500.000 per bulan;
3. Golongan pendapatan sedang dengan rata-rata antara Rp 1.500.000 – Rp 2.500.000 per bulan dan;
4. Golongan pendapatan rendah dengan rata-rata kurang dari Rp 1.500.000 per bulan.

2.2.8 Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)

Menurut Sukirno (2015), pada dasarnya pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Terdapat dua konsep pokok mengenai pengukuran distribusi pendapatan, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Konsep ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak (Sukirno, 2015). Sedangkan konsep ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan (Sukirno, 2015).

Menurut Sukirno (2015), distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek dalam masalah kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan ukuran kemiskinan relatif. Terdapat dua kategori tingkat kemiskinan yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi dimana tingkat pendapatan yang diterima seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah (Sukirno, 2015).

Teori ketimpangan distribusi pendapatan dapat dikatakan dimulai dari munculnya suatu hipotesis yaitu hipotesis “U-terbalik” yang dikemukakan oleh Kuznet (1955) menyatakan bahwa mula-mula Ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan akan makin merata.



Gambar 2.2 Kurva Kuznet
Sumber : Todaro (2006)

Pada Gambar 2.2 dapat diketahui bahwa pendapatan tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi makin merata. Beberapa tahapan peningkatan dan kemudian penurunan ketimpangan pendapatan yang dikemukakan oleh Kuznet tidak dapat dihindari, namun semua tergantung pada proses pembangunan yang dijalankan oleh masing-masing negara (Todaro, 2006).

Terdapat dua model ketimpangan yaitu teori menurut Harrod Domar dan teori menurut Neo-klasik. Kedua teori tersebut memberikan peranan khusus pada peranan modal yang dapat direpresentasikan dengan kegiatan investasi yang ditanamkan pada suatu daerah untuk menarik modal kedalam daerahnya. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi kemampuan setiap daerah untuk tumbuh sekaligus akan menciptakan perbedaan dalam kemampuan menghasilkan pendapatan. Investasi dianggap lebih menguntungkan jika dialokasikan pada daerah yang mampu menghasilkan pengembalian (*return*) yang besar dalam

jangka waktu yang relatif cepat. Mekanisme pasar justru akan menyebabkan ketidakmerataan, dimana daerah-daerah yang relatif maju akan bertumbuh semakin cepat sementara daerah yang kurang maju tingkat pertumbuhannya justru relatif lambat. Hal ini yang menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan antar daerah, sehingga diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan dalam mengarahkan alokasi investasi menuju suatu kemajuan ekonomi yang lebih berimbang di seluruh wilayah dalam negara (Sjafrizal, 2014).

Penyebab terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan dapat disebabkan karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kondisi demografi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah yang menyebabkan munculnya istilah daerah maju dan daerah berkembang. Perbedaan sumber daya alam yang tersedia ini mengakibatkan perbedaan hasil dari pemanfaatannya antara satu daerah dengan daerah lain. Selain itu, kondisi demografi seperti tingkat pendidikan, usia, dan lain sebagainya mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam cara memperoleh pendapatan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan masyarakat juga semakin baik. Oleh karena itu tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan seberapa besar usaha dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Arafah dan Khoirudin, 2022).

2.2.9 Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai sebuah kondisi kekurangan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup. Keadaan ini menjadikan masyarakat dalam keadaan yang tidak mampu menempuh pendidikan serta kesehatan yang baik. Menurut Prof. Mubiyarto, “Kemiskinan adalah rendahnya pendapatan ekonomi masyarakat, yang menjadi penyebab taraf kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan dalam masyarakat menurut.” Keadaan ini bukan hanya terjadi di wilayah pedesaan akan tetapi juga terjadi di wilayah perkotaan. Keadaan ini juga

hampir terjadi di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan ialah kondisi kekurangan masyarakat dalam mendapatkan hajat kebutuhan hidupnya. Baik kebutuhan primer seperti sandang, papan, dan pangan, ataupun dalam memenuhi kebutuhan sekunder. Menurut statistik secara umum kemiskinan dibedakan menjadi dua jenis yaitu ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan berupa kebutuhan pangan dan non pangan (Samsudin, Sadiman dan Pachrozi, 2019).

Kebutuhan pangan meliputi kemampuan untuk mengkonsumsi 2.100 kilo kalori per orang perhari, sedangkan kebutuhan non pangan meliputi kebutuhan. Secara umum Badan Pusat Statistik (2009) mengemukakan bahwa pengeluaran rumah tangga merupakan belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai kebutuhan dalam satu tahun tertentu atau disebut pula pengeluaran konsumsi di mana pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga dilakukan oleh seluruh anggota rumah tangga dalam perekonomian tergantung pada pendapatan yang diterima (Samsudin, Sadiman dan Pachrozi, 2019).

Alokasi atau struktur rumah tangga untuk kebutuhan pangan dan non pangan dimana pengeluaran untuk kebutuhan pangan meliputi sumber karbohidrat, protein, vitamin/ mineral serta kebutuhan pangan lainnya. Sedangkan kebutuhan non pangan meliputi pendidikan, pakaian, perumahan, transportasi, rekreasi, kegiatan sosial, listrik, air minum, dan minyak tanah (Samsudin, Sadiman dan Pachrozi, 2019).

Menurut para ahli (Samsudin, Sadiman dan Pachrozi, 2019) ada beberapa pembagian kemiskinan. Dengan melihat penyebab, pola, proses kemiskinan yang terjadi pada masyarakat. Berikut ini adalah jenis-jenis dan contoh kemiskinan tersebut:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah bentuk kemiskinan yang dialami oleh seseorang atau keluarga yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Pendapatannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Contoh kemiskinan absolut: keluarga yang kurang mampu.

2. Kemiskinan Subjektif

Kemiskinan subyektif adalah jenis kemiskian ini terjadi karena seseorang memiliki dasar pemikiran sendiri dengan beranggapan bahwa kebutuhannya belum terpenuhi secara cukup, walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin. Kemiskinan seperti ini berkaitan dengan mental dari penduduk atau masyarakat. Meskipun kebutuhannya sudah tercukupya terpenuhi masih tetap ia merasa miskin dan masih kekurangan. Contohnya nyata yang terjadi adalah pengemis musiman yang muncul di kota-kota besar pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan seperti bulan puasa, hari raya dan lain-lain. Kemiskinan ini jenis yang paling sulit diberantas, dan mental yang berperan, maka pentingnya menanamkan kepada masyarakat bahwa meminta-minta adalah pekerjaan hina dan perlu dihindari. Untuk mengatasi hal ini beberapa pemerintah daerah mengeluarkan larangan untuk memberikan sesuai kepada para pengemis di lampu merah, atau ditempattempat umum, karena dapat menyebabkan munculnya pengemis-pengemis yang lain.

3. Kemiskinan Relatif

Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan penghasilan dan

standar kesejahteraan. Contohnya: banyaknya pengangguran karena lapangan pekerjaan sedikit.

4. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah merupakan kemiskinan yang terjadi karena alam sekitarnya langka akan sumber daya alam. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat memiliki produktivitas yang rendah. Beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Timur, kondisi alamnya tandus dan kering, sehingga kadang masyarakatnya ada yang miskin karena kondisi alam, mereka sudah berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi kehidupannya, tetapi tetap saja mengalami kemiskinan.

5. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat kebiasaan atau sikap masyarakat dengan budaya santai. Masyarakat seperti ini tidak mau bekerja keras untuk memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern. Mereka hanya berharap kepada atau rejeki yang mendatangnya. Di Sumatera ada masyarakat suku Kubu sebagian besar hidup dari alam dan hutan. Ketika kondisi hutan semakin terbatas, mereka tidak juga mengubah cara hidup, misalkan dengan bercocok tanam, maka mereka akan mengalami kemiskinan secara terus menerus.

6. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada. Masyarakat tidak dapat menggunakan sumber daya yang ada sehingga tidak dapat menikmati sumber daya untuk kesejahteraannya. Suku Kubu (Suku Anak Dalam) merupakan contoh kategori miskin struktural, karena perubahan dari hutan menjadi kebun tidak mampu menyejahterakan hidup mereka. Demikian

juga dengan masyarakat Papua yang tidak mendapatkan manfaat dari kehadiran perusahaan multinasional Freeport di Bumi Cendrawasih

Tiga istilah yang sering muncul dalam kemiskinan adalah garis kemiskinan, garis kemiskinan makanan, dan garis kemiskinan non makanan. Masing-masing istilah tersebut artinya adalah sebagai berikut (Samsudin, Sadiman dan Pachrozi, 2019):

1. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain)
3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

2.2.10 Kesejahteraan

Mokalu, Nayoan, dan Sampe (2021) mendefinisikan kesejahteraan sebagai sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Suharto (2014) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan kesejahteraan, yakni terpenuhinya kebutuhan – kebutuhan jasmani, rohani dan sosial
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang terorganisasi untuk mencapai kondisi sejahtera

Secara umum, kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan yang terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan (Suharto, 2014).

Asriyah (2007) menyatakan bahwa kesejahteraan terdiri dari 2 (dua) macam di antaranya :

1. Kesejahteraan pengorangan

Kesejahteraan perorangan sinonim dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga bersangkutan, sepanjang terpenuhinya kebutuhan ini tergantung dari faktor-faktor ekonomis, oleh karena itu kesejahteraan perorangan selalu merupakan saldo dari “*utilities*” yang positif dan negatif dalam “*utilities*” yang positif termasuk kenikmatan yang diperoleh sang warga dari semua barang langka pada dasarnya dapat memenuhi kebutuhan manusiawi. Dalam “*utilities*” negative termasuk biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh barang itu (seperti terbuang waktu senggang) dampak negatif dari perbuatan-perbuatan warga lain (seperti dampak negatif terhadap lingkungan) dimana kesejahteraan perorangan terbatas hanya pada kesejahteraan itu sendiri.

2. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat yang menyangkut kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat, dalam hal ini

kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan dari beberapa individu atau kesejahteraan bersama, adapun tahapan yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan diantaranya :

- a. Adanya persediaan sumber-sumber pemecahan masalah yang dapat digunakan. Dalam hal ini memang harus di perhatikan guna menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya dalam hal meningkatkan kesejahteraan karena tanpa adanya sumber pemecahan masalah maka masalah tersebut akan tetap ada.
- b. Pelaksanaan usaha dalam menggunakan sumber-sumber pemecahan masalah harus efisien dan tepat guna. Pada tahap ini kita harus dapat menyesuaikan antara masalah dengan sumber pemecahan masalah yang tepat dan dapat diselesaikan dengan cepat.
- c. Pelaksanaan usaha meningkatkan kesejahteraan harus bersifat demokratis. Dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat lebih baik masyarakat tersebut dilibatkan di dalamnya.
- d. Mencegah adanya dampak buruk dari usaha tersebut hal ini juga harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan. Sebaiknya dalam melakukan usaha tersebut tidak menimbulkan dampak negative bagi masyarakat , tetapi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sehingga mampu menimbulkan dampak positif bagi masyarakat (Asriyah, 2007).

Kesejahteraan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari sosial, ekonomi, hukum, budaya, pengetahuan, dan kesehatan. Peran pemerintah sangatlah penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam melakukan usaha untuk mencapai kesejahteraan sosial. Menurut Asriyah (2007), untuk mencapai suatu

kesejahteraan harus memperhatikan beberapa indikator kesejahteraan yang meliputi:

a. Pemerataan pendapatan

Setiap manusia tentunya memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Pendapatan tersebut nantinya dapat digunakan untuk alat pemenuhan kebutuhan, semakin banyak pendapatan yang dimiliki, semakin banyak pula kebutuhan yang terpenuhi. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dilihat dari kenaikan hasil pendapatan perkapita. Dengan adanya kebutuhan yang terpenuhi membuat seseorang semakin mudah untuk mencapai kesejahteraan.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu untuk menggali dan meningkatkan potensi diri. Pendidikan juga bisa diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menetapkan tujuan dan sistem pendidikan. Pendidikan merupakan hak dari seluruh warga negara dan berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas, sehingga pemerintah harus melaksanakan pemerataan akses pendidikan. Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata dengan peningkatan kualitas serta biaya yang murah, dengan adanya pendidikan yang murah dan mudah dijangkau, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Dengan pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kualitas SDM. Apabila kualitas SDM yang tinggi memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kesejahteraan manusia dapat diukur dengan kemampuan untuk menjangkau pendidikan dan mampu menggunakan pendidikan untuk tersebut memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Kualitas kesehatan yang meningkat

Kesehatan merupakan salah satu peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan artinya apabila seseorang mampu mengakses kesehatan maka akan memudahkan seseorang untuk mencapai kesejahteraan, semakin sehat

kondisi masyarakat maka akan mendukung pertumbuhan pembangunan perekonomian suatu negara atau wilayah. Tentunya dengan diimbangi dengan kualitas, fasilitas kesehatan serta dengan banyaknya tenaga kerja yang memadai. Pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi dan wilayah tempat tinggal. Tampak perbedaan nyata terhadap penduduk kota dan desa dalam hal kualitas dan akses kesehatan, hal ini disebabkan oleh jarak dalam menuju fasilitas kesehatan. Tingginya prosentase penduduk perkotaan dalam mengakses fasilitas kesehatan karena mudahnya akses jarak dan kualitas pelayanan yang lebih baik. Berbanding terbalik dengan penduduk pedesaan yang masih sangat sulit untuk mengakses fasilitas kesehatan. Apa bila masih banyak masyarakat yang belum mampu mengakses pelayanan kesehatan maka dapat dikatakan bahwa suatu negara tersebut belum mampu memenuhi kesejahteraan.

d. Pembangunan kesejahteraan sosial

Tujuan dari pembangunan kesejahteraan sosial adalah menciptakan standart kualitas manusia menjadi lebih baik. Ada beberapa aspek penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial menurut (Suharto, 2014) yaitu:

- (1) Standart kualitas hidup meningkat. Pentingnya peningkatan pelayanan sosial kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat dalam kategori yang membutuhkan perlindungan sosial;
- (2) Kebebasan dalam memilih kesempatan yang sesuai dengan aspirasi dan kemampuan yang dimiliki oleh individu;
- (3) Peningkatan keberdayaan yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan melalui lembaga pemerintahan, sosial, ekonomi dan politik.

2.2.11 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017).

Menurut Narimawati, Anggadini, dan Ismawati (2010) langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

1. Setiap indikator yang dinilai oleh responden, diklasifikasikan dalam lima alternatif jawaban dengan menggunakan skala ordinal yang menggambarkan peringkat jawaban.
2. Dihitung total skor setiap variabel/subvariabel = jumlah skor dari seluruh indikator variabel untuk semua responden.
3. Dihitung skor setiap variabel/subvariabel = rata-rata dari total skor.

Untuk mendeskripsikan jawaban responden, juga digunakan statistic deskriptif seperti distribusi frekuensi dan tampilan dalam bentuk tabel ataupun grafik.

2.2.12 Analisis Penerimaan dan Pendapatan

1. Teori Penerimaan

Menurut Boediono (2002), yang dimaksud dengan penerimaan (*revenue*) adalah penerimaan produksi dari hasil penjualan outputnya. Untuk mengetahui penerimaan total diperoleh dari output atau hasil produksi dikalikan dengan harga jual output. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$TR = P \times Q$$

Keterangan :

TR : *Total Revenue* (total penerimaan)

P : *Price* (harga jual)

Q : *Quantity* (jumlah output/produk yang dihasilkan)

2. Teori Biaya

Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan produk tertentu dalam waktu tertentu. Biaya produksi meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya adalah nilai dari semua pengorbanan ekonomis yang diperlukan, yang tidak dapat dihindarkan, dapat diperkirakan, dan dapat diukur untuk menghasilkan suatu produk (Cyrilla dan Ismail, 1998).

Boediono (2002) menyatakan bahwa berdasarkan volume kegiatan biaya dibedakan atas biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap (*fixed cost*) adalah biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi yang jumlah tetap pada volume kegiatan tertentu, sedangkan biaya variabel (*variable cost*) adalah biaya yang jumlah totalnya berubah-ubah.

Biaya tetap merupakan biaya yang tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat kegiatan maupun volume penjualan (Marewa, 2012). Biaya tetap per unit berbanding terbalik secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan atau kapasitas. Semakin tinggi tingkat kegiatan, maka semakin rendah biaya tetap per unit. Semakin rendah tingkat kegiatan, maka semakin tinggi biaya tetap per unit. Biaya tetap tidak dipengaruhi oleh volume produksi, seperti biaya penyusutan, tenaga kerja, dan pajak.

Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya variabel per unit konstan, semakin besar volume kegiatan semakin besar pula biaya totalnya, sebaliknya semakin kecil biaya volume kegiatan, semakin kecil pula biaya totalnya. Biaya bahan baku merupakan contoh biaya variabel yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Contoh biaya variabel dalam sebuah usaha adalah biaya retribusi, biaya transportasi, biaya keamanan dan lain sebagainya (Marewa, 2012).

$$TC = FC + VC$$

Keterangan :

TC : *Total Cost* (total biaya keseluruhan)

FC : *Fixed Cost* (biaya tetap)

VC : *Variable Cost* (biaya variabel)

3. Teori Pendapatan

Pendapatan adalah total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu. Perusahaan yang menginginkan laba maksimum akan mengambil keputusan secara marginal, dimana perusahaan dapat menyesuaikan variable variabel yang bisa dikontrol untuk memungkinkan memperoleh laba yang maksimum. Pendapatan dibagi menjadi pendapatan kotor (penerimaan) dan pendapatan bersih (keuntungan). Pendapatan kotor merupakan ukuran produktivitas sumber daya yang di produksi dari usaha tani, sedangkan pendapatan bersih merupakan pendapatan kotor yang dikurangi total biaya usaha yang dikeluarkan (Gratio, 2013).

Adapun rumus untuk menghitung total pendapatan adalah sebagai berikut:

$$\Pi = TR - TC$$

Keterangan:

Π : Total pendapatan

TR : Total penerimaan

TC : Total biaya yang dikeluarkan

2.2.13 Analisis Rasio Gini

Indeks gini, rasio gini, atau koefisien gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali dikembangkan oleh statistik Italia bernama Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 (*International NGO Forum on Indonesia Development*, 2018). Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana

distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika indeks gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna (Todaro dan Smith, 2006).

Menurut Badan Pusat Statistik, indeks gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks gini membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara. Rumus menghitung nilai rasio gini atau indeks gini menurut BPS (2022) adalah sebagai berikut.

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i (Q_i + (Q_{i-1}))}{1000}$$

Keterangan:

G : Indeks Gini

P_i : Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

Q_i : Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas -i

Q_{i-1} : Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke -i dikurangi 1

k : Banyaknya kelas pendapatan

nilai indeks gini berkisar antara 0 dan 1, jika:

G < 0,3 : ketimpangan rendah

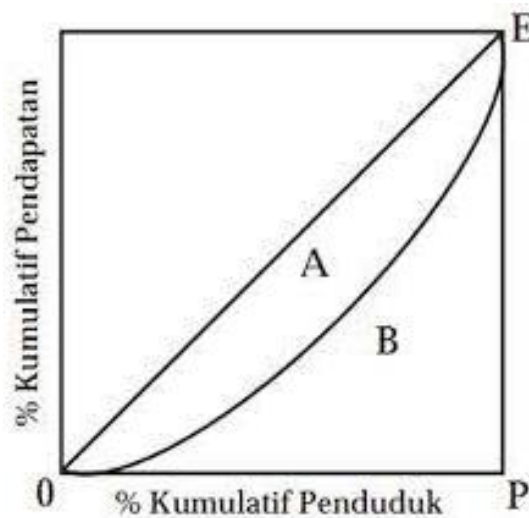
0,3 ≤ G ≤ 0,5 : ketimpangan sedang

G > 0,5 : ketimpangan tinggi

2.2.14 Kurva Lorenz

Menurut Todaro dan Smith (2006) kurva lorenz merupakan kurva yang menggambarkan distribusi kumulatif nasional di kalangan penduduk. Pada kurva terdapat bujur sangkar pada sisi tegak menunjukkan persentase kumulatif

pendapatan nasional dan pada sisi pada sisi datar menunjukkan persentase kumulatif dari penduduk.



Gambar 2.2 Kurva Lorenz
Sumber : Todaro dan Smith (2006)

Pada gambar 2.2 garis diagonal dalam Kurva Lorenz melambangkan pemerataan sempurna (*perfect equality*) dalam distribusi antar kelompok pendapatan masing-masing persentase kelompok penerima pendapatan menerima persentase pendapatan total yang sama besarnya, contohnya 40% kelompok terbawah menerima 40% dari pendapatan total, sedangkan 5% kelompok teratas hanya menerima 5% dari pendapatan total.

2.2.15 Ketimpangan Kriteria World Bank

Cara lain yang diterapkan dalam mengidentifikasi ketimpangan pendapatan adalah kriteria yang dikemukakan oleh Bank Dunia. Indikator kesenjangan pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase pendapatan penduduk dari 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah dibandingkan dengan total pendapatanseluruh penduduk. Kesenjangan distribusi pendapatan dikategorikan sebagai berikut (World Bank, 2015):

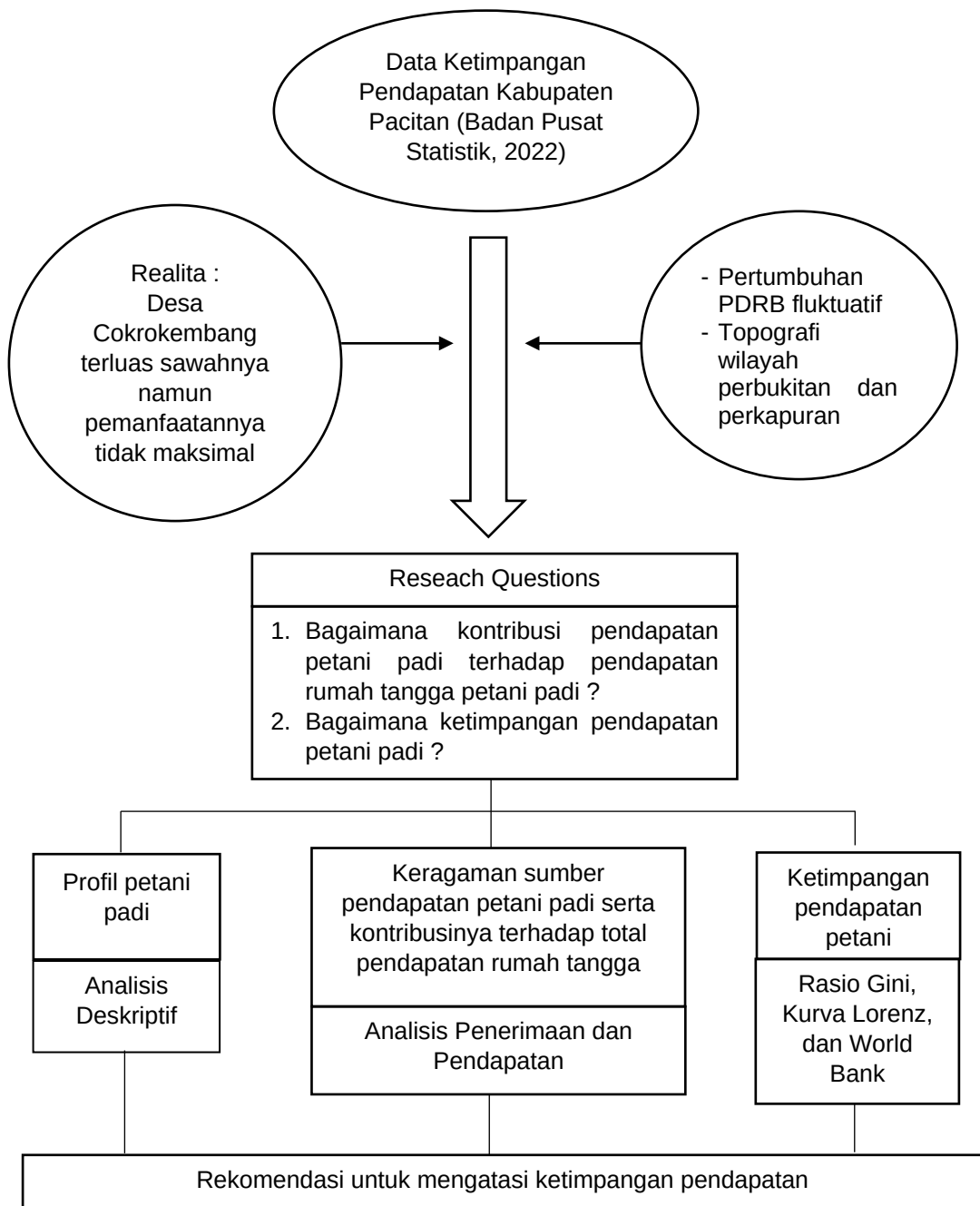
- a. Tingkat ketimpangan tinggi (*high inequality*), bila proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen;
- b. Tingkat ketimpangan sedang (*moderate inequality*), bila proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen;
- c. Tingkat ketimpangan rendah (*low inequality*), bila proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk dalam kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 70 persen.

Menurut World Bank (2015), pertumbuhan ekonomi berkelanjutan selama 15 tahun di Indonesia telah membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan kelas menengah yang berkembang. Namun, pertumbuhan selama satu dasawarsa terakhir hanya menguntungkan 20 persen warga terkaya, sementara 80 persen populasi sisanya sekitar 205 juta orang tertinggal di belakang. Meningkatnya kesenjangan standar hidup dan semakin terpusatnya kekayaan di tangan segelintir orang, menyebabkan tingkat ketimpangan Indonesia relatif tinggi dan naik lebih cepat daripada sebagian besar negara tetangga di Asia Timur.

2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022), ketimpangan pendapatan (rasio gini) di Kabupaten Pacitan menunjukkan trend yang fluktuatif selama 2008 sampai dengan 2021. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh PDRB yang juga fluktuatif pertumbuhannya tiap tahun. Selain itu, realita lain mengenai ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Pacitan adalah kondisi wilayahnya yang sebagian besar merupakan pegunungan kapur dan berbukit. Berdasarkan topografinya, kondisi alam Kabupaten Pacitan meliputi wilayah pantai, dataran rendah dan perbukitan, dengan persentase 85%

daerah pegunungan dan perbukitan, 10% daerah bergelombang dan 5% daerah datar. Di sisi lain, sebanyak 49,14% masyarakat Kabupaten Pacitan bekerja di sektor pertanian (Badan Pusat Statistik, 2022). Berdasarkan fakta-fakta diatas, *research question* (pertanyaan penelitian) dari penelitian ini adalah : 1) Bagaimana profil reponden petani padi di Desa Cokrokembang?; 2) Bagaimana kontribusi pendapatan dari usahatani padi terhadap pendapatan rumah tangga petani padi di Desa Cokrokembang?; dan 3) Bagaimana ketimpangan pendapatan petani padi di Desa Cokrokembang?. Oleh karena itu peneliti menganalisis profil petani padi di Kecamatan Ngadirojo menggunakan analisis deskriptif; menganalisis kontribusi pendapatan petani padi terhadap pendapatan rumah tangga menggunakan analisis penerimaan dan pendapatan; dan menganalisis ketimpangan pendapatan petani padi menggunakan rasio gini, kurva lorenz, dan kriteria Wolrd Bank. Output yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan rekomendasi untuk mengatasi ketimpangan agar tidak melebar.



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian kuantitatif dengan studi atau kajian pada fokus tertentu, sehingga peneliti berharap memperoleh data yang relatif lengkap dan mendalam, juga bisa dilakukan interpretasi terhadap berbagai fenomena yang ditemui di lapangan. Ditinjau dari permasalahan penelitian ini, yaitu tentang ketimpangan pendapatan petani padi, maka penelitian ini bersifat kuantitatif.

3.1.2 Desain Penelitian

Desain dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut (Mahmud 2011), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat terhadap suatu fakta dan sifat objek tertentu. Konsep istilah deskriptif bukan sekadar pengumpulan data, tabulasi dan penuturan data. Sebenarnya sebagai metode penelitian deskriptif memiliki pengertian yang lebih luas dan ciri khas yakni memusatkan diri pada masalah masa sekarang dan aktual dan data yang diperoleh disusun, dijelaskan dan dianalisis ini disebut metode analitik.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur mulai bulan Maret sampai dengan April 2023. Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah petani padi di Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.

3.3 Penentuan Responden

Responden merupakan orang yang memberikan keterangan tentang suatu fakta yang dialami. Menurut Sugiyono (2017), untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Dalam penelitian ini digunakan teknik penentuan sampel menggunakan rumus slovin.

Adapun jumlah populasi petani padi di Desa Cokrokembang sebanyak 527 jiwa, dimana persebarannya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Populasi Petani Padi di Desa Cokrokembang

No.	Dusun	Jumlah Petani Padi (Jiwa)
1.	Kwangen	96
2.	Barak	209
3.	Prancak	148
4.	Cerbon	74
	Total	527

Sumber : Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngadirojo (2023)

Total populasi petani adalah sebanyak 527 jiwa. Selanjutnya menghitung jumlah responden menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 n &= N / 1 + \{N.(e^2)\} \\
 &= 527 / 1 + \{527.(0,1^2)\} \\
 &= 84,051 \text{ dibulatkan menjadi } 100 \text{ jiwa}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = taraf nyata atau batas kesalahan (10% dengan tingkat kepercayaan 90%)

Jumlah sampel berdasarkan rumus slovin adalah 100 responden, yang akan disebar ke 4 (empat) dusun, seperti pada Tabel 3.1. Selanjutnya, meninjau pada fakta bahwa pendapatan petani padi tidak dapat teridentifikasi dengan jelas di awal penelitian, maka penentuan responden dilakukan secara acak dengan

pembagian menggunakan *proportional sampling* menggunakan rumus alokasi proposional sebagai berikut (Ridwan, 2005) :

$$N_i = n_i / N \cdot n$$

Keterangan:

n_i = jumlah anggota sampel menurut stratum

n = jumlah anggota sampel seluruhnya

N_i = jumlah anggota populasi menurut stratum

N = jumlah anggota populasi seluruhnya

Maka, jumlah responden petani tiap-tiap dusun adalah sebagai berikut:

1. Dusun Kwangen

$$\begin{aligned} N_i &= n_i / N \cdot n \\ &= 96 / 1 + (527 \times 0,1^2) \\ &= 15,31 \text{ dibulatkan menjadi 20 responden} \end{aligned}$$

2. Dusun Barak

$$\begin{aligned} N_i &= n_i / N \cdot n \\ &= 209 / 1 + (527 \times 0,1^2) \\ &= 33,33 \text{ dibulatkan menjadi 40 responden} \end{aligned}$$

3. Dusun Prancak

$$\begin{aligned} N_i &= n_i / N \cdot n \\ &= 148 / 1 + (527 \times 0,1^2) \\ &= 23,60 \text{ dibulatkan menjadi 25 responden} \end{aligned}$$

4. Dusun Cerbon

$$\begin{aligned} N_i &= n_i / N \cdot n \\ &= 74 / 1 + (527 \times 0,1^2) \\ &= 11,80 \text{ dibulatkan menjadi 15 responden} \end{aligned}$$

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data utama yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, bukan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 2 (dua) metode, yakni :

3.4.1 Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Misalnya wawancara dan kuisioner. Dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yakni :

- A. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuisioner dibagikan kepada responden penelitian dalam hal ini petani padi di Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya.
- B. Wawancara (*Interview*), merupakan suatu upaya untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab secara langsung kepada orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi terkait objek penelitian. Wawancara dilakukan kepada petani padi di Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Informasi yang diperoleh dengan wawancara adalah kondisi riil dalam pandangan petani padi di Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.
- C. Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan guna mencari sumber data dan mengabadikan situasi dan kondisi di tempat penelitian secara umum dari awal sampai akhir untuk menunjang informasi selama penelitian di lapang.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai referensi, laporan,

literatur baik data ataupun ringkasan yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait, hasil penelitian terdahulu, bukti-bukti relevan yang digunakan untuk menunjang data primer dan melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian. Kumpulan data yang diperoleh antara lain data PDRB, data ketimpangan ekonomi, data demografi masyarakat.

3.5 Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan menghitung data yang telah terkumpul agar dapat disajikan dengan sistematis dan dapat dilakukan interpretasi. Analisis data pada penelitian kuantitatif dapat dihitung secara manual dengan menghitung menggunakan rumus-rumus statistik atau menggunakan program bantu statistik seperti SPSS, Minitab, XL-Stat, S-Plus dan sebagainya (Priyatno, 2016). Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Analisis Deskriptif

Untuk menganalisa tujuan pertama, peneliti menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Menurut Priyanto (2016), analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendiskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Selanjutnya Hasan (2001) menjelaskan bahwa pengertian dari statistik deskriptif merupakan bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga data mudah dipahami. Statistik deskriptif berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai data atau keadaan. Dengan kata statistika deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan.

Menurut Narimawati, Anggadiah dan Ismawati (2010) langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

1. Setiap indikator yang dinilai oleh responden, diklasifikasikan dalam lima alternatif jawaban dengan menggunakan skala ordinal yang menggambarkan peringkat jawaban.
2. Dihitung total skor setiap variabel/subvariabel = jumlah skor dari seluruh indikator variabel untuk semua responden.
3. Dihitung skor setiap variabel/subvariabel = rata-rata dari total skor.
4. Untuk mendeskripsikan jawaban responden, juga digunakan statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi dan tampilan dalam bentuk tabel ataupun grafik.

Adapun data yang akan ditampilkan dalam analisis deskriptif adalah data demografi responden di Desa Cokrokembang, meliputi :

1. Usia responden
2. Jenis kelamin responden
3. Tingkat pendidikan responden
4. Jumlah tanggungan keluarga responden
5. Luas lahan usahatani padi
6. Kepemilikan lahan
7. Sumber modal usahatani

3.5.2 Analisis Pendapatan Rumah Tangga Pertanian

Tujuan kedua akan dianalisis menggunakan analisis penerimaan dan pendapatan sesuai dengan rumus Soekartawi (1995), sebagai berikut:

$$TR = Y \cdot P_y$$

Keterangan:

TR : Total penerimaan yang diterima petani padi (Rp)

Y : Produksi dari hasil budidaya petani padi (Kg)

P_y : Harga jual komoditas utama per kg (Rp)

Setelah menghitung total penerimaan petani padi, selanjutnya menghitung besarnya pendapatan petani padi dengan rumus Soekartawi (1995), sebagai berikut:

$$\Pi = TR - TC$$

Keterangan:

Π : Total pendapatan responden (Rp)

TR : Total penerimaan responden (Rp)

TC : Total biaya yang dikeluarkan responden (Rp)

Adapun untuk menghitung TC (Total Cost) dengan rumus sebagai berikut:

$$TC = VC + FC$$

Keterangan:

TC : Total biaya yang dikeluarkan responden (Rp)

VC : Total biaya variabel yang dikeluarkan responden (Rp)

FC : Total biaya tetap yang dikeluarkan responden (Rp)

Selanjutnya tingkat kontribusi pendapatan usahatani padi terhadap total pendapatan rumah tangga responden petani padi dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TK \text{ Usahatani Padi} = \frac{\text{Rata-rata pendapatan usahatani padi per tahun}}{\text{Rata-rata pendapatan total per tahun}} \times 100\%$$

Keterangan : TK = Tingkat Kontribusi

3.5.3 Analisis Rasio Gini, Kurva Lorenz dan Kriteria World Bank

Untuk menjawab tujuan ketiga maka akan dianalisis menggunakan rasio gini dan kurva lorenz sebagai berikut:

1. Analisis Rasio Gini

Indeks Gini, Rasio Gini, atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali dikembangkan oleh statistik Italia bernama Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 (*International NGO*

Forum on Indonesia Development, 2018). Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna (Todaro dan Smith, 2006).

Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks Gini membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara. Rumus menghitung nilai Rasio Gini atau Indeks Gini menurut BPS (2017) adalah sebagai berikut.

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i (Q_i + Q_{i-1})}{1000}$$

Keterangan:

G : Indeks Gini

P_i : Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

Q_i : Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas -i

Q_{i-1} : Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke -i dikurangi 1

k : Banyaknya kelas pendapatan

nilai indeks gini berkisar antara 0 dan 1, jika:

G < 0,3 : ketimpangan rendah

0,3 ≤ G ≤ 0,5 : ketimpangan sedang

G > 0,5 : ketimpangan tinggi

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis ketimpangan pendapatan menggunakan rasio gini adalah sebagai berikut:

Perhitungan Indeks Gini Pendapatan Petani Agribisnis

No	Golongan Pendapatan	Persentase Petani Agribisnis	Rata-rata Nilai Pendapatan (Rupiah)	Kumulatif Pendapatan	Peluang Kumulatif Pendapatan	Peluang Petani Agribisnis	$G = E + (E-1)$	$H = F \cdot G$
	A	B	C	D = C1+C2 dst	E = Tiap D / D6	F = B/100		
1	< 100.000	0	0	0	0	0	0	0
2	100.001 - 500.000	0,12	430.000	430.000	0,082692308	0,0012	0,082692308	9,92308E-05
3	500.001 - 1.000.000	0,47	730.000	1.160.000	0,223076923	0,0047	0,305769231	0,001437115
4	1.000.001 - 1.500.000	0,25	1.300.000	2.030.000	0,390384615	0,0025	0,613461538	0,001533654
5	1.500.001 - 2.000.000	0,07	1.800.000	3.100.000	0,596153846	0,0007	0,986538462	0,000690577
6	> 2.000.001	0,09	3.400.000	5.200.000	1	0,0009	1,596153846	0,001436538
							Jumlah	0,005197115

IG < 0,3	Ketimpangan pendapatan rendah
0,3 < IG < 0,5	Ketimpangan pendapatan sedang
IG > 0,5	Ketimpangan pendapatan tinggi

$$G = 1 - \frac{\sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})}{1000}$$

INDEKS GINI 0,994802885

Gambar 3.1 Langkah-langkah Analisis Rasio Gini

- 1) Memasukkan data golongan pendapatan, persentase jumlah petani padi dan rata-rata nilai pendapatan ke dalam Microsoft Excel. Data ini diperoleh dari hasil kuisioner
- 2) Menghitung kumulatif pendapatan dengan rumus pendapatan golongan 1 ditambah pendapatan golongan 2; pendapatan golongan 2 ditambah pendapatan golongan 3 dan seterusnya
- 3) Menghitung peluang kumulatif pendapatan dengan rumus masing-masing kumulatif pendapatan dibagi dengan kumulatif pendapatan golongan paling tinggi
- 4) Menghitung peluang petani padi dengan rumus persentase petani padi dibagi 100
- 5) Menghitung persentase kumulatif pendapatan ditambah dengan persentase kumulatif pendapatan dikurangi 1 sesuai dengan rumus indeks gini
- 6) Mengalikan peluang petani padi dengan hasil dari langkah 5
- 7) Hasil perkalian langkah 6 dijumlahkan
- 8) Menghitung rasio gini dengan rumus 1 dikurangi hasil dari langkah 7

Adapun kriteria dari analisis rasio gini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kriteria Rasio Gini

IG < 0,3	Ketimpangan pendapatan rendah
0,3 < IG < 0,5	Ketimpangan pendapatan sedang
IG > 0,5	Ketimpangan pendapatan tinggi

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

2. Kurva Lorenz

Menurut Todaro dan Smith (2006) kurva lorenz merupakan kurva yang menggambarkan distribusi kumulatif nasional di kalangan penduduk. Pada kurva terdapat bujur sangkar pada sisi tegak menunjukkan persentase kumulatif pendapatan nasional dan pada sisi pada sisi datar menunjukkan persentase kumulatif dari penduduk. Adapun langkah untuk membuat kurva lorenz adalah sebagai berikut:

- 1) Memasukkan data pendapatan tiap kelas petani padi ke dalam Microsoft Excel kemudian mengurutkannya dari pendapatan terkecil untuk mempermudah pembuatan kurva.

Pendapatan Pelaku Agribisnis (Petani)

No.	Nama	Pendapatan
1	A	150.000
2	B	250.000
3	C	300.000
4	D	400.000
5	E	450.000
6	F	500.000
7	G	600.000
8	H	950.000
9	I	1.400.000
10	J	1.700.000
	Jumlah	6.700.000

Gambar 3.2 Contoh Tabel Pendapatan Petani Padi (Petani)

- 2) Untuk mempermudah membuat kurva, data diperkecil dari 10 bagian menjadi 5 bagian

Pendapatan Pelaku Agribisnis (Petani)

No.	Nama	Pendapatan	Pendapatan (%)
1	A	150.000	} 20%
2	B	250.000	
3	C	300.000	} 40%
4	D	400.000	
5	E	450.000	} 60%
6	F	500.000	
7	G	600.000	} 80%
8	H	950.000	
9	I	1.400.000	} 100%
10	J	1.700.000	
	Jumlah	6.700.000	

Gambar 3.3 Pembagian Data Menjadi Bagian Lebih Kecil

- 3) Menghitung persentase income dengan menjumlahkan pendapatan orang 1 dengan pendapatan orang 2 dibagi jumlah total pendapatan

Pendapatan Pelaku Agribisnis (Petani)

No.	Nama	Pendapatan	Pendapatan (%)	Income (%)
1	A	150.000	} 20%	$=(D6+D7)/D16$
2	B	250.000		
3	C	300.000	} 40%	10,448%
4	D	400.000		
5	E	450.000	} 60%	14,179%
6	F	500.000		
7	G	600.000	} 80%	23,134%
8	H	950.000		
9	I	1.400.000	} 100%	46,269%
10	J	1.700.000		
	Jumlah	6.700.000		

Gambar 3.4 Cara Menghitung Persentase Income

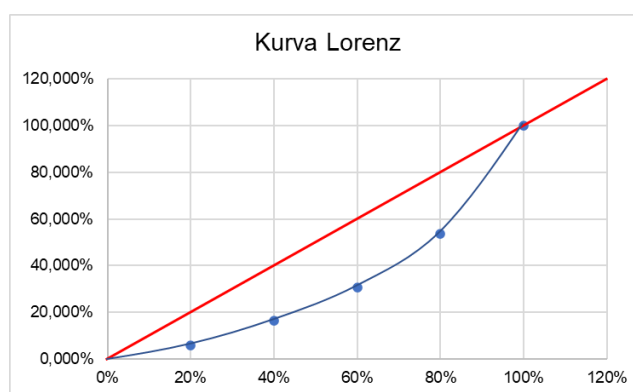
- 4) Menentukan titik temu. Titik temu adalah penjumlahan dari income

Pendapatan Pelaku Agribisnis (Petani)

No.	Nama	Pendapatan	Pendapatan (%)	Income (%)	Titik Temu
1	A	150.000	} 20%	5,970%	5,970%
2	B	250.000			
3	C	300.000	} 40%	10,448%	16,418%
4	D	400.000			
5	E	450.000	} 60%	14,179%	$=H8+G10$
6	F	500.000			
7	G	600.000	} 80%	23,134%	53,731%
8	H	950.000			
9	I	1.400.000	} 100%	46,269%	100,000%
10	J	1.700.000			
	Jumlah	6.700.000			

Gambar 3.5 Menentukan Titik Temu

- 5) Menggambarkan hasil titik temu dalam kurva



Gambar 3.6 Contoh Hasil Kurva Lorenz

Menurut Arsyad (1997), kurva lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menandakan bahwa distribusi pendapatan nasional yang

semakin merata, sebaliknya jika kurva lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka menunjukkan keadaan yang semakin buruk, dan distribusi pendapatan petani padi semakin timpang dan tidak merata.

3. Ketimpangan Kriteria World Bank

Cara lain yang diterapkan dalam mengidentifikasi ketimpangan pendapatan adalah kriteria yang dikemukakan oleh Bank Dunia. Indikator kesenjangan pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase pendapatan penduduk dari 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh penduduk, secara matematis dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Ketimpangan} = \frac{\text{Jumlah Pendapatan dari 40\% Pendapatan Terendah}}{\text{Jumlah Total Pendapatan}} \times 100$$

Kesenjangan distribusi pendapatan dikategorikan sebagai berikut:

- a. Tingkat ketimpangan tinggi (*high inequality*), bila proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen;
- b. Tingkat ketimpangan sedang (*moderate inequality*), bila proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen;
- c. Tingkat ketimpangan rendah (*low inequality*), bila proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk dalam kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 70 persen.

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel merupakan suatu pernyataan tentang definisi dan pengukuran variabel-variabel penelitian baik berdasarkan teori yang telah ada maupun pengalaman empiris. Definisi operasional dan

pengukuran variabel ini memudahkan peneliti dalam pengumpulan data. Definisi dan pengukuran masing-masing variabel tersebut antara lain :

1. Petani padi adalah orang yang melakukan kegiatan usahatani padi sebagai mata pencaharian utamanya
2. Penerimaan produksi usahatani padi adalah sejumlah uang yang diterima oleh petani padi dari kegiatan produksinya dikalikan dengan harga yang berlaku dan belum dikurang biaya produksi. Penerimaan diukur dalam dalam satuan rupiah (Rp)
3. Pendapatan dari usahatani padi adalah selisih total penerimaan dari usahatani padi dengan jumlah biaya produksi padi dalam proses produksi usahatani padi
4. Pendapatan dari usaha peternakan adalah selisih total penerimaan dari usaha peternakan dengan jumlah biaya produksi usaha peternakan dalam proses produksi usaha peternakan.
5. Pendapatan dari luar usahatani adalah selisih total penerimaan dari luar usahatani dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam proses kegiatan di luar usahatani.
6. Pendapatan anggota keluarga adalah selisih total penerimaan dari anggota keluarga dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam proses kegiatan anggota keluarga tersebut.
7. Pendapatan rumah tangga adalah keseluruhan penerimaan yang diperoleh oleh responden petani padi dan anggota keluarganya dikurangi dengan biaya usahatani dan pengeluaran konsumsi rumah tangga.
8. Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah seluruh biaya di luar biaya usahatani padi yang dikeluarkan dalam rangka mencukupi kebutuhan sehari-hari petani padi dan dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp)

9. Pengeluaran konsumsi rumah tangga terbagi menjadi 2 (dua) yakni pengeluaran konsumsi pangan dan pengeluaran konsumsi non pangan
10. Pengeluaran konsumsi pangan adalah pengeluaran oleh petani padi dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dalam bentuk bahan pangan maupun makanan jadi yang terdiri dari karbohidrat, pangan hewani, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, makanan dan minuman jadi, dan tembakau dan sirih.
11. Pengeluaran konsumsi non pangan adalah pengeluaran oleh petani padi dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dalam bentuk selain bahan pangan maupun makanan jadi yang terdiri dari kayu bakar/arang, gas, BBM di luar kegiatan usahatani, listrik, pulsa, perlengkapan mandi, perlengkapan mencuci, *make up*, iuran lingkungan, perawatan kendaraan, kegiatan sosial seperti hajatan, SPP anak, buku dan alat tulis anak, uang jajan anak, dan kos anak, pakaian, sprei, sarung, sandal/sepatu, pembayaran pajak kendaraan, PBB di luar lahan usahatani, perbaikan rumah, uang gedung sekolah anak, dan keperluan anak lainnya seperti seragam, tas, sepatu sekolah.
12. VC (*Variable Cost*) atau biaya variabel adalah pengeluaran yang jumlahnya berubah-ubah tergantung pada operasional usahatani petani padi dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp).
13. FC (*Fixed Cost*) atau biaya tetap adalah pengeluaran yang jumlahnya tidak bergantung pada perubahan volume produksi usahatani padi dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp).
14. TC (*Total Cost*) adalah penjumlahan antara *Variable Cost* (VC) dengan *Fixed Cost* (FC).

15. Jumlah tanggungan keluarga adalah jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan dari keluarga tersebut, baik itu saudara kandung maupun saudara bukan kandung yang tinggal dalam satu rumah tapi belum bekerja
16. Ketimpangan (disparitas) pendapatan yang diukur dalam penelitian ini adalah ketimpangan relatif yang merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan
17. Ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini diukur menggunakan gini rasio dan kurva lorenz
18. Koefisien gini atau gini rasio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan secara keseluruhan yang angkanya berkisar antara nol yang artinya pemerataan sempurna hingga satu yang artinya ketimpangan yang sempurna
19. Kurva lorenz adalah kurva yang menunjukkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase (%) penerima pendapatan (penduduk) dengan persentase (%) total pendapatan yang benar-benar diterima dalam satu tahun.

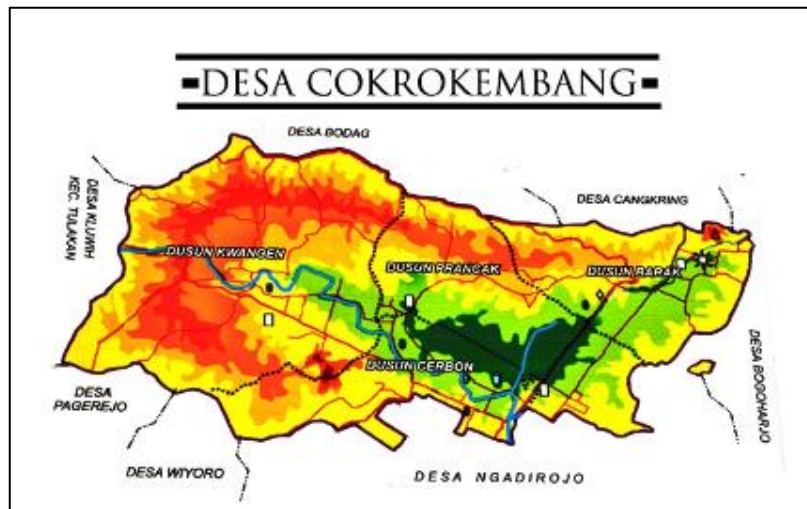
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Daerah Penelitian

Desa Cokrokembang adalah salah satu dari 18 desa di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Desa Cokrokembang terletak 1 km ke arah utara dari kecamatan. Desa Cokrokembang mempunyai luas wilayah 444,4 hektar dan terdiri dari 4 (empat) dusun, yakni:

1. Dusun Barak
2. Dusun Cerbon
3. Dusun Prancak
4. Dusun Kwangen

Adapun peta Desa Cokrokembang adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Peta Desa Cokrokembang

Batas-batas Desa Cokrokembang antara lain:

- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah utara | : Desa Cangkring dan Desa Bodag |
| Sebelah selatan | : Desa Ngadirojo dan Desa Wiyoro |
| Sebelah timur | : Desa Bogoharjo dan Desa Ngadirojo |
| Sebelah barat | : Desa Bodag dan Desa Kluwih Kecamatan Tulakan |

4.2 Keadaan Penduduk

4.2.1 Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk menurut Data Tingkat Perkembangan Desa Cokrokembang Tahun 2022 sebanyak 3.201 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Penduduk Desa Cokrokembang Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin Penduduk	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-laki	1.605
2.	Perempuan	1.596
	Jumlah Total	3.201

Sumber : Data Tingkat Perkembangan Desa Cokrokembang (2022)

Jumlah penduduk yang tersebar di Desa Cokrokembang sebanyak 1.135 Kartu Keluarga (KK) dengan jumlah kepadatan penduduk 720 per km. Jumlah penduduk Desa Cokrokembang yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.605 jiwa dan perempuan sebanyak 1.596.

4.2.2 Keadaan Penduduk Menurut Usia

Penduduk Desa Cokrokembang termasuk dalam kelompok produktif yaitu berada pada usia 15-64 tahun. Perincian penduduk Desa Cokrokembang sebagai berikut:

Tabel 4.2 Penduduk Desa Cokrokembang Menurut Usia

No.	Kelompok Usia	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	0 – 14 tahun	680	21,24
2.	15 – 64 tahun	2.423	75,70
3.	> 65 tahun	98	3,06
		3.201	100

Sumber : Data Tingkat Perkembangan Desa Cokrokembang (2022)

Penduduk Desa Cokrokembang paling banyak menurut usia yaitu usia 15-64 tahun sebanyak 2.423 jiwa atau setara dengan 75,70% dari total penduduk Desa Cokrokembang. Selanjutnya kelompok usia 0-14 tahun sebanyak 680 jiwa atau setara 21,24% dari total penduduk Desa Cokrokembang. Kelompok usia di atas 65 tahun memiliki jumlah paling sedikit yakni sebanyak 98 jiwa atau setara 3,06% dari total penduduk Desa Cokrokembang.

4.2.3 Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan

Keadaan Desa Cokrokembang berdasarkan tingkat pendidikan dengan jumlah masing-masing sebagai berikut:

Tabel 4.3 Keadaan Penduduk Desa Cokrokembang Menurut Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	39
2.	Sedang SD/Sederajat	199
3.	Tamat SD/Sederajat	172
4.	Sedang SLTP/Sederajat	155
5.	Tamat SLTP/Sederajat	184
6.	Tidak tamat SLTP/Sederajat	43
7.	Sedang SLTA/Sederajat	1.250
8.	Tamat SLTA/Sederajat	457
9.	Sedang D-1	24
10.	Tamat D-1	31
11.	Sedang D-2	5
12.	Tamat D-2	3
13.	Sedang D-3	25
14.	Tamat D-3	31
15.	Sedang S-1	34
16.	Tamat S-1	0
17.	Sedang S-2	0
18.	Tamat S-2	0
19.	Sedang S-3	0
20.	Tamat S-3	0
	Total	2.652

Sumber : Data Tingkat Perkembangan Desa Cokrokembang (2022)

Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Cokrokembang tergolong rendah yaitu sebanyak 172 jiwa yang mampu menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Penduduk Desa Cokrokembang saat ini sudah memperhatikan pendidikan yakni banyak yang menempuh pendidikan hingga ke jenjang SMA sebanyak 1.250 jiwa.

4.2.4 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencarian

Keadaan penduduk Desa Cokrokembang menurut mata pencarian atau pekerjaan yang terdiri dari berbagai macam pekerjaan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Keadaan Penduduk Desa Cokrokembang Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	16
2.	Buruh Tani	542
3.	Peternak	663
4.	Nelayan	6
5.	Buruh Usaha Perikanan	4
6.	Pengumpul Hasil Hutan	6
7.	Montir	4
8.	Tukang Batu	85
9.	Tukang Kayu	40
10.	Tukang Sumur	4
11.	Pemulung	2
12.	Tukang Jahit	9
13.	Tukang Kue	13
14.	Tukang Anyaman	3
15.	Tukang Rias	2
16.	Pengrajin industri rumah tangga lainnya	5
17.	Karyawan perusahaan swasta	39
18.	Karyawan perusahaan pemerintah	3
19.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	153
20.	TNI	1
21.	POLRI	2
22.	Dokter Swasta	1
23.	Pensiunan PNS	71
24.	Jasa Konsultasi Manajemen dan Teknis	1
25.	Wiraswasta lainnya	793

Sumber : Data Tingkat Perkembangan Desa Cokrokembang (2022)

Mayoritas penduduk Desa Cokrokembang sebagai wiraswasta lainnya sebanyak 793 jiwa, selain itu sebanyak 663 jiwa bekerja sebagai peternak, 542 jiwa bekerja sebagai buruh tani dan 153 jiwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

4.3 Keadaan Sarana dan Prasarana Pembangunan

Keadaan sarana dan prasarana Desa Cokrokembang dapat dimanfaatkan untuk anggota masyarakat dan keberlanjutan pembangunan desa. Sarana dan prasana yang ada di Desa Cokrokembang dijelaskan sebagai berikut:

4.3.1 Kelembagaan Desa

Kelembagaan desa yang terdapat di Desa Cokrokembang yang digunakan sebagai prasarana dalam membantu masyarakat desa dalam pembangunan

ekonomi desa, peningkatan kualitas masyarakat desa, peningkatan pendidikan serta keadaan sosial masyarakat.

Tabel 4.5 Kelembagaan Desa Cokrokembang

No.	Jenis Lembaga	Jumlah
1	Karang Taruna	1
2	PKK	1
3	LPMD	1
4	RT	19
5	RW	4
6	Kelompok Tani	7
7	Badan Usaha Milik Desa	1
8	Organisasi Keagamaan	4
	Total	38

Sumber : Data Desa Cokrokembang (2022)

Desa Cokrokembang memiliki 38 lembaga desa yang terbagi menjadi 8 jenis. Kelembagaan Desa Cokrokembang yaitu karang taruna yang berjumlah 1, PKK yang berjumlah 1, LPMD yang berjumlah 1, RT yang berjumlah 19 dan RW yang berjumlah 4, kelompok tani berjumlah 7, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang berjumlah 1 dan organisasi keagamaan yang berjumlah 4.

4.3.2 Sarana Pembangunan Desa

Sarana pembangunan Desa Cokrokembang yaitu dengan adanya fasilitas-fasilitas pelaksanaan kebijakan desa. Sarana pembagunan yang ada di Desa Cokrokembang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Desa Cokrokembang

No.	Sarana Desa	Jumlah
1	Posyandu	5
2	Gedung PAUD	3
3	Gedung TK	3
4	Gedung SD	3
5	Masjid	6
6	Mushola	10
7	Gereja	1

Sumber : Data Desa Cokrokembang (2022)

Fasilitas yang dimiliki Desa Cokrokembang untuk menjadikan desa lebih berkembang. Sarana kesehatan yaitu berupa posyandu yang berjumlah 5 unit. Sarana pendidikan yaitu gedung PAUD yang berjumlah 3, gedung TK berjumlah

3, dan sekolah dasar yang berjumlah 3. Sarana keagamaan yang menunjang masyarakat yaitu berupa masjid yang berjumlah 6 unit, mushola yang berjumlah 10 unit, dan gereja yang berjumlah 1 unit.

4.4 Gambaran Usahatani Padi di Desa Cokrokembang

Pertanian di Desa Cokrokembang sebagian besar merupakan usahatani padi yang dibudidayakan di lahan sawah. Sebagian besar sawah dialiri oleh air sungai yang berada di sisi lahan persawahan. Namun demikian, saat ini kondisi sungai sebagai sumber air dari sebagian besar persawahan di Desa Cokrokembang kondisinya tercemar oleh limbah dari kegiatan pertambangan yang berada di Desa Kluwih, Kecamatan Tulakan. Desa Kluwih berada di sebelah barat dan wilayahnya lebih tinggi dibandingkan Desa Cokrokembang, sehingga aliran sungai yang mengandung limbah mengarah ke Desa Cokrokembang. Dusun Kwangen dan Dusun Cerbon merupakan dusun yang terdampak dari adanya pencemaran air sungai akibat limbah tambang, sedangkan Dusun Prancak dan Dusun Barak tergolong aman karena dialiri oleh sungai yang berasal dari Desa Cangkring (sebelah utara).

Usahatani padi di Desa Cokrokembang telah berlangsung cukup lama hingga saat ini. Pengusahaan padi di Desa Cokrokembang adalah padi varietas inpari 42 yang nantinya akan dijual dalam bentuk beras.



Gambar 4.2 Padi Varietas Inpari 42

Padi yang sudah dipanen, selanjutnya dipisahkan dari batangnya menggunakan mesin perontok padi atau yang disebut “*herek*” oleh petani padi di Desa Cokrokembang. Padi yang sudah dipisahkan dengan batangnya disebut gabah. Selanjutnya gabah dijemur dengan memanfaatkan sinar matahari. Untuk mencegah bercampurnya kotoran, kehilangan butiran gabah (*losses*), memudahkan pengumpulan gabah dan menghasilkan penyebaran panas yang merata, maka penjemuran harus dilakukan dengan menggunakan alas. Alas yang biasanya digunakan oleh petani padi di Desa Cokrokembang adalah terpal

Gabah yang sudah kering akan digiling untuk memisahkan kulit padi dengan isi padi (beras). Beras yang sudah digiling dijual ke pedagang beras ataupun ke perorangan. Petani padi di Desa Cokrokembang menjual berasnya mulai harga Rp 9.700,00 sampai dengan Rp 10.000,00 per kilogram. Meski demikian, tidak seluruh hasil panennya dijual, tetapi juga disisihkan untuk kebutuhan makan keluarga petani itu sendiri sehari-hari.

Lahan sawah yang dimiliki oleh responden dalam 1 (satu) tahun digunakan untuk menanam padi sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada bulan Desember, bulan April, dan bulan Agustus. Di sela-sela musim tanam, saat lahan sawah tidak terpakai maka dimanfaatkan oleh responden petani padi untuk memproduksi batu bata merah. Tanah yang digunakan oleh responden bukan merupakan tanah sawah, melainkan tanah yang diambil dari perbukitan di sisi utara Desa Cokrokembang yang biasanya mengalami longsor. Tanah dari longsor tersebut lah yang dipakai oleh petani untuk memproduksi batu bata merah. Untuk kegiatan produksi batu bata merah ini hanya dilakukan di Dusun Kwangen saja, sedangkan dusun yang lain biasanya akan membiarkan lahan sawahnya begitu saja, biasanya dilakukan pembakaran jerami untuk memulihkan kondisi tanah sawah setelah musim tanam, sedangkan petani padi akan melakukan pekerjaan yang lain sembari menunggu musim tanam selanjutnya tiba.

4.5 Hasil dan Pembahasan

4.5.1 Profil Responden Petani Padi di Desa Cokrokembang

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan, kepemilikan lahan, dan sumber modal.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia merupakan tolak ukur dalam kehidupan seseorang yang diukur setiap tahun sejak dari tahun lahir sampai dengan sekarang, maka dengan itu usia sangat mempengaruhi kemampuan seseorang baik dari segi fisik maupun cara berpikir.

Tabel 4.7 Responden Berdasarkan Usia

No.	Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	< 40	8	8
2.	41 – 45	6	6
3.	46 – 50	18	18
4.	51 – 55	17	17
5.	56 – 60	27	27
6.	61 – 65	19	19
7.	> 65	5	5
	Total	100	100

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden berada pada usia produktif. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas petani padi di Desa Cokrokembang masih memiliki fisik yang kuat sehingga mampu mengelola usahatannya dengan baik. Semakin muda usia petani, maka dengan sangat mudah petani tersebut menerima informasi serta penggunaan teknologi dalam bidang pertanian dibandingkan dengan petani berumur tua yang sudah sulit berinteraksi baik dari segi pendengaran, penglihatan, dan lainnya sehingga dapat mempengaruhi cara berpikir untuk bekerja.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, petani dibagi menjadi 2 (dua) yakni laki-laki dan perempuan, sebagai berikut.

Tabel 4.8 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Laki – laki	97	97
2.	Perempuan	3	3
	Total	100	100

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Dari 100 responden sebanyak 97 responden berjenis kelamin laki-laki. Lazimnya dalam masyarakat petani padi di Desa Cokrokembang, laki-laki bertugas sebagai pencari nafkah dan kaum perempuan mengurus rumah tangga, namun terdapat juga para istri yang membantu suaminya bekerja di pertaniannya maupun di sektor yang lain demi tercukupinya kebutuhan rumah tangga.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru (Suharjo, 2007).

Tabel 4.9 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Tidak Sekolah	38	38
2.	SD	26	26
3.	SMP	6	6
4.	SMA	28	28
	Total	100	100

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas, dari total 100 responden mayoritas petani di Desa Cokrokembang tidak mengenyam pendidikan secara formal (tidak sekolah) yakni sebanyak 38 jiwa, mengenyam pendidikan SD sebanyak 26 jiwa, pendidikan SMP sebanyak 6 jiwa, dan pendidikan SMA sebanyak 28 jiwa.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga adalah jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan dari keluarga tersebut, baik itu saudara kandung maupun saudara bukan kandung yang tinggal dalam satu rumah tapi belum bekerja (Purwanto dan Taftazani, 2018).

Tabel 4.10 Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga

No.	Jumlah Tanggungan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Tidak memiliki tanggungan	55	55
2.	1 orang	31	31
3.	2 orang	13	13
4.	3 orang	1	1
	Total	100	100

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Berdasarkan data diatas, mayoritas petani padi di Desa Cokrokembang tidak memiliki tanggungan dikarenakan anggota keluarga lainnya ikut membantu bekerja. Selain itu, dikarenakan usia petani yang rata-rata sudah diatas 50 tahun, maka anak-anaknya sudah pindah kependudukan dikarenakan sudah menikah.

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Luas Lahan

Luas lahan merupakan keseluruhan wilayah yang menjadi tempat penanaman atau proses produksi. Luas lahan menjamin jumlah atau hasil yang akan diperoleh petani. Luas lahan merupakan salah satu faktor petani dalam memilih sistem usahatani. Apabila lahan yang digunakan semakin luas maka produksi akan semakin banyak (Soekartawi, 1987).

Tabel 4.11 Responden Berdasarkan Luas Lahan

No.	Luas Lahan (Hektar)	Jumlah Pemilik (Jiwa)	Persentase (%)
1.	< 0,05	0	0
2.	0,06 – 0,10	72	70
3.	0,11 – 0,15	28	30
4.	> 0,16	0	0
	Total	100	100

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar petani mengusahakan lahan untuk padi dengan luasan terbilang kecil yakni sekitar 0,07 sampai 0,10 hektar

atau setara 600 m² sampai dengan 1.000 m² sebanyak 72 orang. Pada luas lahan di atas 0,10 hektar atau di atas 1.000 m² lebih sedikit jumlahnya yakni sebanyak 28 orang. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa petani di Desa Cokrokembang merupakan petani skala kecil dengan luas lahan usahatani <0,5 hektar.

f. Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan Lahan

Menurut Novianti (2018), petani dibedakan menjadi 2 (dua), yakni petani pemilik dan petani penggarap. Petani pemilik adalah petani yang memiliki lahan pertanian sendiri, biasanya lahan pertanian yang dimiliki petani digarap sendiri atau diberikan kepada orang lain untuk menggarapnya, sedangkan petani penggarap adalah petani yang menggarap atau mengerjakan lahan milik orang lain.

Tabel 4.12 Responden Berdasarkan Kepemilikan Lahan

No.	Kepemilikan Lahan	Jumlah Pemilik (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Milik Pribadi	100	100
2.	Sewa	0	0
	Total	100	100

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Berdasarkan data diatas, seluruh petani di Desa Cokrokembang mengolah lahan milik pribadi dan tidak ada yang menyewa ke pihak lain. Awal kepemilikan lahan tersebut seluruhnya berasal dari warisan yang diberikan oleh orangtua secara turun temurun.

g. Karakteristik Responden Berdasarkan Sumber Modal Usahatani Padi

Sumber permodalan usahatani dapat berasal dari dalam (modal sendiri) dan dari luar (pinjaman/kredit). Kredit sebagai modal usaha mencerminkan bahwa secara tidak langsung kredit terpaut dalam kegiatan produksi dimana kredit berperan dalam pengadaan faktor-faktor produksi (Asih 2008).

Tabel 4.13 Responden Berdasarkan Sumber Modal Usahatani Padi

No.	Sumber Modal	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Pribadi	100	100
2.	Pinjaman ke orang lain	0	0
3.	Pinjaman ke bank	0	0
4.	Lainnya	0	0
	Total	100	100

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Berdasarkan data diatas, keseluruhan responden petani padi di Desa Cokrokembang menggunakan modal pribadi untuk melakukan kegiatan usahatani.

4.5.2 Analisis Pendapatan Usahatani Padi di Desa Cokrokembang

A. Analisis Biaya Usahatani Padi di Desa Cokrokembang

Analisis pendapatan usahatani yang akan dihitung dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan biaya produksi dan penerimaan yang diperoleh oleh masing-masing petani. Perhitungan biaya produksi dalam usahatani dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya tidak tetap (*variable cost*).

Dalam penelitian ini, penulis menghitung pendapatan usahatani dari seluruh lahan usahatani padi yang dimiliki oleh responden, sehingga biaya-biaya dan segala perhitungan yang terdapat dalam laporan ini merupakan rata-rata tiap responden, bukan tiap satuan luasan lahan yang dimiliki oleh responden.

Adapun rincian luasan lahan yang dimiliki responden sebagai berikut:

Tabel 4.14 Rincian Luasan Lahan yang Dimiliki Responden

No.	Luas Lahan	Jumlah Responden	Jumlah Petak
1.	0,07 hektar setara 7 are	63	1
2.	0,08 hektar setara 8 are	2	1
3.	0,09 hektar setara 9 are	5	1
4.	0,10 hektar setara 10 are	2	2
5.	0,11 hektar setara 11 are	3	2
6.	0,12 hektar setara 12 are	11	2
7.	0,13 hektar setara 13 are	14	2

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

1. Biaya Tetap (*Fixed Cost*)

Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada *output* yang dihasilkan. Biaya tetap pada penelitian ini berupa biaya pajak lahan dan penyusutan (depresiasi) alat yang dikeluarkan petani padi dalam satu tahun.

Tabel 4.15 Biaya Tetap (*Fixed Cost*) per Responden per Tahun

No	Rincian Biaya	Biaya (Rp/Tahun)
1.	Pajak lahan	33.518,57
2.	Depresiasi alat	85.580,00
	Total Biaya Tetap (TFC)	119.098,57

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Rincian besarnya komponen masing-masing biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usahatani padi dapat dilihat di lampiran, sedangkan penjelasannya secara singkat adalah sebagai berikut:

a. Pajak Lahan

Di Desa Cokrokembang, penggunaan lahan untuk usahatani padi adalah lahan sawah milik sendiri, meskipun demikian perhitungan biaya pada lahan sawah petani responden ditetapkan sebagai pajak lahan. Besarnya biaya pajak lahan tergantung pada luasan lahan yang dimiliki oleh masing-masing petani responden. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh rata-rata biaya pajak lahan adalah Rp 33.518,57/tahun.

b. Depresiasi Alat

Biaya penyusutan adalah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing petani yang tergantung pada jumlah kepemilikan alat dan jangka waktu penggunaan alat. Alat yang sering digunakan dalam kegiatan usahatani padi antara lain: cangkul, sabit, mesin perontok padi (biasa disebut masyarakat di daerah penelitian sebagai "*herek*"), terpal, dan garuk. Rincian rata-rata biaya penyusutan peralatan responden per tahun sebagai berikut:

Tabel 4.16 Depresiasi Alat Usahatani Padi per Responden per Tahun

No.	Alat	Rata-rata Biaya (Rp)
1.	Cangkul	26.340,00
2.	Sabit	18.830,00
3.	Mesin perontok padi	25.800,00
4.	Terpal	6.400,00
5.	Garuk	8.210,00
	Total	85.580,00

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

2. Biaya Variabel (*Variable Cost*)

Biaya variabel adalah biaya biaya yang dikeluarkan petani padi tergantung besar kecilnya pada *output* yang dikeluarkan. Pada penelitian ini biaya yang dihitung adalah selama satu bulan (dihitung dengan biaya satu kali musim tanam dibagi jumlah lama masa tanam). Biaya variabel yang digunakan petani padi meliputi bibit, pupuk phonska, pupuk urea, herbisida, insektisida, dan tenaga kerja, untuk satu kali musim tanam. Berikut adalah pembahasan lebih lanjut terkait rata-rata biaya variabel yang dikeluarkan petani dalam usahatani padi ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.17 Biaya Variabel (*Variable Cost*) per Responden per Tahun

No.	Rincian Biaya	Jumlah (Satuan)	Harga per Satuan	Biaya (Rp/Tahun)
1.	Benih	18,03 kg	17.000	306.485,71
2.	Pupuk phonska	108,17 kg	2.300	248.794,29
3.	Pupuk urea	108,17 kg	2.250	243.385,71
4.	Herbisida	3,61 kemasan	17.000	61.297,14
5.	Insektisida	7,21 kemasan	18.000	129.805,71
6.	Pengairan	1,92 hari	200.000	384.000,00
7.	BBM			264.000,00
8.	Tenaga kerja	5,84 borongan	150.000	876.000,00
		21,63 orang	35.000	757.200,00
		1,27 orang	25.000	31.750,00
	Total Biaya Variabel (TVC)			3.302.718,56

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Sehingga jumlah rata-rata biaya variabel yang dikeluarkan oleh petani untuk 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp 3.302.718,56.

a. Benih

Benih merupakan bahan tanam yang diperlukan petani dalam melakukan usahatani padi. Benih diperoleh dari usahatani padi musim sebelumnya yang mana benih ini diambil dari biji padi yang dikeringkan, benih akan disemai terlebih dahulu kurang lebih selama satu minggu ditempat bedengan. Benih yang biasanya digunakan petani responden di tempat penelitian adalah benih padi varietas inpari 42. Dalam satu petak lahan yang berukuran 7 are, rata-rata penggunaan benih di daerah penelitian adalah sebesar 5 kg benih dengan biaya Rp 85.000,00/petak/musim tanam tergantung dari jarak tanam yang digunakan oleh petani responden di daerah penelitian. Jika dirata-rata per tahun, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh petani untuk pengadaan benih adalah sebesar Rp 306.485,71.

b. Pupuk

Petani padi di tempat penelitian menggunakan pupuk phonska dan pupuk urea. Kedua pupuk ini tidak dapat diproduksi sendiri oleh petani. Petani membeli pupuk phonska dan pupuk urea ke toko pertanian. Pupuk phonska berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tanaman padi terhadap serangan hama dan penyakit. Pupuk phonska biasanya digunakan oleh petani 15 hari setelah hari tanam. Harga pupuk phonska sebesar Rp 2.300,00 per kg. Satu petak lahan sawah petani yang berukuran 7 are rata-rata membutuhkan pupuk phonska sebanyak 30 kg. Jika dirata-rata per tahun, maka jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk pengadaan pupuk phonska adalah sebesar Rp 248.794,29.

Sedangkan pupuk urea berfungsi untuk meningkatkan kadar protein dan hasil produksi dikarenakan tanaman padi mengakumulasi nitrat pada bagian daun tanaman padi. Pupuk urea diaplikasikan oleh petani 35 hari setelah hari tanam. Harga pupuk urea sebesar Rp 2.250,00 per kg. Petani memerlukan setidaknya 30 kg pupuk urea untuk satu petak lahan sawah berukuran 6 – 7 are.

Jika dirata-rata per tahun, maka jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk pengadaan pupuk urea adalah sebesar Rp 243.385,71. Kemampuan manajerial petani seperti pengalaman dan keterampilan usahatani dapat mempengaruhi dalam mengaplikasikan pupuk anorganik saat berusahatani, sehingga berpengaruh pula pada total biaya pupuk yang harus dikeluarkan petani.

c. Pestisida

Pestisida berperan dalam pemeliharaan untuk mencegah dan mengurangi serangan hama penyakit. Penggunaan jumlah pestisida dari setiap petani berbeda, tergantung pada pilihan mereka dalam melihat fenomena kondisi tanaman saat terserang hama dan penyakit yang ada di lapang. Pestisida yang digunakan petani padi di Desa Cokrokembang terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni herbisida dan insektisida. Herbisida digunakan untuk memberantas gulma pengganggu tanaman padi yang dapat menurunkan hasil produksi. Rata-rata jumlah herbisida yang digunakan petani padi di Desa Cokrokembang dalam satu kali musim tanam adalah sebanyak 1 kemasan dengan harga Rp 17.000,00 per kemasan yang dapat digunakan untuk 7 are luasan sawah. Artinya per tahun petani harus mengeluarkan sebanyak Rp 61.297,14 untuk pengadaan herbisida.

Sedangkan insektisida digunakan untuk memberantas hama. Rata-rata jumlah insektisida yang digunakan petani padi di Desa Cokrokembang dalam satu kali musim tanam adalah sebanyak 2 kemasan dengan harga Rp 18.000,00 per kemasan yang dapat digunakan untuk 7 are luasan sawah. Artinya petani padi harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 129.805,71 per tahun untuk pengadaan insektisida.

d. Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar Minyak atau BBM merupakan bahan bakar yang digunakan oleh responden untuk kendaraan yang digunakan dalam operasional usahatani. Kendaraan yang digunakan oleh responden adalah sepeda motor, namun ada

juga responden yang tidak memanfaatkan kendaraan bermotor. Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk BBM setiap tahunnya adalah sebesar Rp 264.000,00.

e. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang digunakan dalam usahatani padi ini adalah tenaga kerja dalam keluarga dan luar keluarga baik laki-laki maupun perempuan. Biaya tenaga kerja laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan. Upah dibedakan menjadi 2 (dua), yakni borongan dan perorangan. Untuk kegiatan pengolahan tanah dan pemanenan menggunakan sistem borongan yakni Rp 150.000,00 sampai selesainya kegiatan, sedangkan untuk kegiatan tanam, pemupukan, penyiangan, dan pasca panen menggunakan perhitungan per orang. Untuk kegiatan tanam, pemupukan, dan penyiangan diterapkan upah sebesar Rp 35.000,00 per orang, sedangkan kegiatan pasca panen diberikan upah sebesar Rp 25.000,00 per orang. Biaya yang dikeluarkan akan semakin besar apabila tenaga kerja yang digunakan juga semakin banyak jumlahnya.

Penjelasan secara lengkap mengenai rata-rata biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh petani padi di Desa Cokrokembang adalah sebagai berikut:

(1) Pengolahan Lahan

Kegiatan yang dilakukan dalam proses pengolahan lahan diantaranya adalah pembersihan lahan dari rumput liar atau gulma, pembalikan tanah, pemberian pupuk, dan lahan siap untuk ditanami.



Gambar 4.3 Proses Pengolahan Lahan Sawah di Desa Cokrokembang

Kegiatan pengolahan lahan dilakukan oleh tenaga kerja laki-laki, biasanya berjumlah 2 orang dengan upah sebesar Rp 150.000,00 per borongan.

(2) Penanaman

Kegiatan penanaman bibit padi dilakukan oleh 4 orang dengan upah sebesar Rp 35.000,00 per orang hingga kegiatan tanam selesai.

(3) Pemupukan

Kegiatan pemupukan dalam usahatani padi di Desa Cokrokembang hampir semuanya dilakukan oleh petani sendiri. Pemberian pupuk dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) kali musim tanam, yakni pupuk phonska diberikan 15 (lima belas) hari setelah tanam dan pupuk urea 35 (tiga puluh lima) hari setelah tanam. Namun demikian, terdapat juga beberapa petani yang menggunakan jasa tenaga kerja. Upah yang diberikan kepada tenaga kerja adalah sebesar Rp 35.000,00 per orang, biasanya pemupukan dilakukan oleh 1 (satu) orang.

(4) Penyiangan Gulma

Penyiangan gulma maupun tanaman yang mengganggu tanaman padi pada lokasi penelitian dilakukan 10-15 hari setelah tanam. Sedangkan penyiangan kedua dilakukan 30-35 hari setelah tanam. Penyiangan dilakukan dengan mencabut gulma dan dimatikan dengan membenamkannya ke dalam tanah. Penyiangan biasanya dilakukan oleh 1 (satu) orang dengan upah sebesar Rp 35.000,00 per orang.

(5) Pengairan

Kegiatan pengairan bertujuan untuk mengairi lahan dengan air yang dilakukan apabila tidak terjadi hujan dalam jangka waktu yang lama atau saat terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Sistem pengairan di daerah penelitian dilakukan dengan menggunakan diesel, kebanyakan petani mengambil air dari sungai, namun juga ada beberapa petani yang mengambil air dari sumur bor. Sistem pengairan di daerah penelitian sebagian besar dilakukan oleh

petaninya sendiri dibantu dengan tenaga kerja yang mengoperasikan diesel. Diesel beserta tenaga kerja diberi upah sebesar Rp 200.000,00. Upah ini sudah termasuk bahan bakar yang digunakan.

(6) Panen

Kegiatan panen merupakan kegiatan yang membutuhkan jumlah tenaga kerja yang banyak dalam kegiatan usahatani padi. Dalam melakukan kegiatan panen padi dilakukan dengan menggunakan sabit khusus yang biasanya sudah dibawa oleh tenaga kerja borongan. Cara memanen padi dengan menggenggam satu rumpun bagian padi dan dipotong tepat di batang bagian bawah. Selanjutnya menumpuk rumpun-rumpun yang telah dipotong ke dalam tumpukan kecil. Selanjutnya dilakukan perontokan baik secara tradisional (*gebyok*) maupun menggunakan alat bantu sederhana (*herek*). Waktu yang baik untuk panen padi adalah ketika sebanyak 90-95% gabah dari malai tampak kuning dan malai berusia 30-35 hari setelah berbunga merata. Jumlah upah borongan untuk tenaga kerja adalah sebesar Rp 150.000,00 hingga kegiatan panen selesai. Biasanya 1 borongan dikerjakan oleh 3-4 orang.



Gambar 4.4 Proses Pemanenan Padi di Desa Cokrokembang

(7) Pasca Panen

Kegiatan pasca panen padi (penjemuran atau pengeringan) dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan kadar air gabah dari gabah kering panen (sekitar 23-29%) menjadi gabah kering giling (sekitar 14%). Penurunan kadar air gabah ini bertujuan untuk mengamankan gabah dari kemungkinan berkembangbiaknya serangga dan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri.

Dalam kegiatan pasca panen atau penjemuran, tenaga kerja yang diperlukan adalah 1 orang dengan upah sebesar Rp 25.000,00.



Gambar 4. 5 Proses Penjemuran Gabah

Pengeringan gabah merupakan salah satu kegiatan pascapanen yang penting. Proses ini merupakan proses penurunan kadar air gabah hasil panen atau disebut Gabah Kering Panen (GKP) menjadi kualitas Gabah Kering Giling (GKG). Di samping itu, proses pengeringan juga dilakukan untuk mengurangi kadar hampa dan kotoran yang terdapat dalam gabah hasil panen (GKP). Umumnya, standar kadar air kualitas GKP adalah sekitar 25 persen, dan kadar air kualitas GKG sekitar 14 persen (Inpres RI Nomor 5 Tahun 2015). Pengurangan kadar air dalam biji-bijian seperti gabah dilakukan dengan cara penguapan air dari dalam gabah. Proses ini meliputi penguapan air dari permukaan biji dan perpindahan massa air dari dalam gabah ke permukaan secara difusi.

Pengeringan gabah hasil panen diperlukan untuk mengurangi kadar air sehingga memenuhi standar baik untuk disimpan ataupun untuk digiling menjadi beras. Selama proses pengeringan dilakukan akan terjadi penurunan berat gabah karena pengurangan kadar air dalam gabah dan juga kemungkinan terjadinya kehilangan gabah secara fisik (susut pengeringan) seperti tercecer atau dimakan ternak/unggas.

(8) Penggilingan

Penggilingan dalam pasca panen padi merupakan kegiatan memisahkan beras dari kulit yang membungkusnya. Pemisahan ada 2 cara : 1) Secara tradisional menggunakan alat sederhana, yaitu lesung dan alu; 2) Pemisahan beras dari kulitnya dapat dilakukan dengan cara modern atau dengan alat penggiling. Kendala penggilingan gabah secara tradisional adalah pengerjaannya sangat lambat, tenaga kerja yang memadai tidak tersedia dan alatnya sulit dijumpai. Sedangkan hasil yang diperoleh pada penggilingan dengan alat penggiling gabah sama dengan cara tradisional, yaitu pada tahap pertama diperoleh beras pecah kulit. Pada penggilingan tahap kedua, beras akan menjadi putih bersih. Responden petani padi di Desa Cokrokembang seluruhnya telah memanfaatkan alat penggiling gabah atau biasa disebut *selep*, dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp 13.000,00 untuk setiap 50 kg penggilingan.

3. Total Biaya (*Total Cost*)

Biaya total dalam penelitian adalah penambahan total biaya tetap dengan total biaya variabel. Biaya total rata-rata yang digunakan petani responden dalam usahatani padi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.18 Total Biaya (Total Cost) per Responden per Tahun

No.	Rincian Biaya	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Biaya Tetap (Rp/Responden/Musim Tanam)	119.098,57
2.	Biaya Variabel (Rp/Responden/Musim Tanam)	3.302.718,56
	Total Biaya	3.421.817,13

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Tabel diatas menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk kegiatan usahatani padi sebesar Rp 3.421.817,13/tahun. Biaya terbesar terdapat pada biaya variabel. Hal ini disebabkan dalam biaya variabel, petani menggunakan faktor produksi diantaranya benih, pupuk, pestisida, pengairan,

BBM, dan tenaga kerja dengan jumlah yang besar sehingga biaya yang dikeluarkan besar pula.

C. Analisis Penerimaan Usahatani Padi di Desa Cokrokembang

Penerimaan adalah hasil kali dari harga satuan panen padi dengan jumlah produksi yang dihasilkan dari kegiatan usahatani padi.

Tabel 4.19 Rata-rata Penerimaan Usahatani Padi per Responden

No.	Komponen	Keterangan
1.	Produksi Beras (Kg)	848,08
2.	Harga (Rp/Kg)	9.819,00
	Penerimaan per Tahun (Rp)	8.321.893,85

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata penerimaan yang didapatkan oleh petani responden dari kegiatan usahatani padi adalah sebesar Rp 8.321.893,85 /tahun. Diketahui harga rata-rata padi adalah sebesar Rp 9.819,00/kg.

D. Analisis Pendapatan Usahatani Padi di Desa Cokrokembang

Pendapatan usahatani padi di Desa Cokrokembang dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan yakni sebagai berikut.

Tabel 4.20 Analisis Rata-rata Pendapatan Responden dari Usahatani Padi

Detail	Penerimaan (X)	Pengeluaran (Y)
Rata-rata Penerimaan Usahatani Padi	8.327.266,11	
Biaya Variabel (Usahatani)		3.302.718,56
Biaya Tetap (Usahatani)		119.098,57
Pendapatan Usahatani Padi (X-Y)	4.905.448,98	

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Jadi pendapatan bersih responden petani dari usahatannya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp 4.905.448,98.

4.5.3 Kontribusi Hasil Usahatani Terhadap Pendapatan Rumah Tangga di Desa Cokrokembang

Desa Cokrokembang merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Desa Cokrokembang berbatasan langsung dengan Desa Cangkring dan Desa Bodag di sebelah utara, Desa Ngadirojo dan Desa Wiyoro

di sebelah selatan, Desa Bogoharjo dan Desa Ngadirojo di sebelah timur, dan Desa Bodag dan Desa Kluwih, Kecamatan Tulakan di sebelah barat.

Jumlah penduduk Desa Cokrokembang sekitar 3.201 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.605 jiwa dan perempuan sebanyak 1.596 jiwa yang tersebar dalam 1.135 kepala keluarga. Di Desa Cokrokembang, bidang pertanian yang dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat adalah komoditas padi. Hal ini dikarenakan padi merupakan bahan pangan utama masyarakat pertanian di Desa Cokrokembang. Kepemilikan lahan sawah petani di Desa Cokrokembang adalah milik pribadi yang didapatkan secara turun menurun (berasal dari warisan orangtua). Selain itu, usahatani padi juga merupakan kegiatan berusahatani yang telah dilakukan turun temurun sehingga salah satu tujuannya adalah untuk menjaga ketersediaan bahan pangan sehari-hari.

Kontribusi usahatani padi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumbangan dari usahatani padi terhadap pendapatan rumah tangga yang dilakukan di Desa Cokrokembang sebanyak 100 responden petani padi, meskipun disamping itu para petani padi menjalankan usaha yang lain. Usahatani padi di Desa Cokrokembang dilakukan petani untuk memperoleh pendapatan. Jumlah kontribusi yang diterima dari usahatani padi sangat mempengaruhi pendapatan rumah tangga petani responden karena pendapatan dari usahatani padi merupakan sumber pendapatan rumah tangga di daerah penelitian. Sehingga kontribusi pendapatan usahatani padi terhadap pendapatan rumah tangga responden sangat berpengaruh terhadap total pendapatan rumah tangga mengingat pekerjaan pokok para responden adalah sebagai petani padi.

Selain dari usahatani padi, petani padi di Desa Cokrokembang juga memperoleh pendapatan dari usaha peternakan seperti sebagai penjual rumput, peternak, dan pedagang hewan ternak. Selain itu petani padi juga memperoleh pendapatan dari usaha di luar usahatani, antara lain sebagai tukang bangunan,

tukang becak, pedagang, sopir, satpam, pengrajin, dan buruh serabutan, dan termasuk pendapatan tambahan dari anggota keluarga yang bekerja di luar usahatani padi seperti buruh dan wiraswasta. Pendapatan tersebut dihitung dalam kurun waktu satu tahun. Waktu satu tahun yang dimaksud adalah pendapatan responden per bulan dikali 12 (dua belas) bulan yang diwujudkan dalam bentuk Rupiah.

1. Pendapatan dari usahatani padi

Pendapatan dari usahatani padi adalah pendapatan yang diperoleh responden dari usahatani padi dalam kurun waktu satu tahun dikurangi dengan dengan biaya usahatani dan jumlah beras yang dikonsumsi dikalikan dengan harga jual yang dinyatakan dalam Rupiah. Pendapatan ini merupakan pendapatan bersih usahatani padi yang berasal dari penerimaan hasil penjualan (jumlah produksi dikurangi dengan konsumsi beras kemudian sisanya dikalikan dengan harga jual beras) dikurangi dengan biaya produksi satu tahun dalam satuan Rupiah. Setelah dipanen, gabah dijemur untuk menurunkan kadar air yang terkandung di dalamnya. Umumnya, standar kadar air kualitas GKP adalah sekitar 25 persen, dan kadar air kualitas GKG sekitar 14 persen (Inpres RI Nomor 5 Tahun 2015), sehingga jumlah Gabah Kering Giling (GKG) yang diperoleh dengan cara mengurangi sebesar 14 persen dari total hasil panen. Selanjutnya, jumlah beras yang dihasilkan adalah sebesar 62,74% dari total Gabah Kering Giling (Badan Pusat Statistik, 2018). Penerimaan petani padi di Desa Cokrokembang yang diperoleh dari usahatani padinya rata-rata sebesar Rp 8.327.266,11 per tahunnya, sedangkan pendapatan bersih petani dari usahatani sebesar Rp 4.905.448,98 per tahun sebagaimana yang telah disebutkan pada Tabel 4.21 di atas.

Rendahnya pendapatan dari usahatani padi ini diakibatkan oleh tingginya biaya produksi utamanya biaya pupuk dan tenaga kerja. Hasil wawancara

dengan salah satu petani padi di Desa Cokrokembang (Sarti, 2023) terkait dengan tingkat kontribusi dari usahatani adalah sebagai berikut:

“Rabuk iki jan angel tenan mbak golekane, petani iki repot, tanduran ora dirabuk yo mejen ora gelem apik perkembangane” (pupuk ini sangat susah mbak mencarinya, petani ini repot (kesulitan), tanaman (padi) jika tidak dipupuk tidak mau tumbuh, tidak bagus perkembangannya) (Wawancara dilakukan pada 19 Maret 2023 pukul 10.00 WIB di Desa Cokrokembang).

Responden petani lainnya (Bonasir, 2023) mengatakan:

“Kanggone adewe sing wong tani, penggawean tani ngene iki diomong untung asline yo ora untung mbak, tenagane wis blas ra keitung. Lha saiki sembarang-barang larang, rabuk golekane angel, banyune kali barang tercemar, kebutuhan pangan mundak kabeh, piye ra ketekek wong tani lek ngene iki carane” (Untuk kita yang bekerja sebagai petani, pekerjaan petani dikatakan untung sebenarnya juga tidak untung, tenaga yang dikeluarkan sama sekali tidak terhitung. Sekarang apa-apa mahal, pupuk sulit didapatkan, air sungai tercemar (limbah tambang), kebutuhan pangan naik semua, bagaimana tidak tercekik petani kalau seperti ini caranya) (Wawancara dilakukan pada 20 Maret 2023 pukul 07.30 WIB di Desa Cokrokembang).

Kondisi ini sejalan dengan Lumintang (2013) yang menyatakan bahwa besar kecilnya pendapatan usahatani padi dipengaruhi oleh salah satunya biaya produksi usahatani.

2. Pendapatan dari Peternakan

Pendapatan dari peternakan adalah pendapatan yang diperoleh responden dari usaha peternakan seperti menjual rumput pakan dan usaha jual beli ternak. Pendapatan ini merupakan pendapatan bersih peternakan yang berasal dari penerimaan dari pekerjaan sampingan dikurangi dengan modal yang dikeluarkan dalam waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan Rupiah.

Tabel 4.21 Analisis Rata-rata Pendapatan Responden dari Usaha Peternakan

Detail	Penerimaan (X)	Pengeluaran (Y)
Rata-rata Penerimaan Usaha Peternakan	11.100.000,00	
Modal Usaha Peternakan		1.350.000,00
Pendapatan Usaha Peternakan (X-Y)	9.750.000,00	

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.22 diatas, rata-rata penerimaan responden per tahun sebesar Rp 11.100.000,00, dengan modal yang harus dikeluarkan sebesar Rp 1.350.000,00 per tahun, sehingga jumlah pendapatan responden dari usaha peternakan sebesar Rp 9.750.000,00 per tahunnya. Adapun rincian pendapatan responden dari usaha peternakan terlampir pada Lampiran 4.

3. Pendapatan dari Luar Usahatani

Pendapatan dari luar usahatani adalah pendapatan yang diperoleh responden selain dari usahatani padi maupun usaha peternakan dikurangi dengan modal yang dikeluarkan, seperti sebagai satpam, sopir, tukang bangunan, dan buruh serabutan. Rata-rata pendapatan yang diterima responden petani padi di Desa Cokrokembang dari luar usahatani adalah sebagai berikut.

Tabel 4.22 Analisis Rata-rata Pendapatan Responden dari Luar Usahatani

Detail	Penerimaan (X)	Pengeluaran (Y)
Rata-rata Penerimaan di Luar Usahatani	10.404.878,00	
Modal Usaha di Luar Usahatani		251.707,00
Pendapatan di Luar Usahatani (X-Y)	10.153.171,00	

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.23 diatas, rata-rata penerimaan responden dari luar usahatani sebesar Rp 10.404.878,00 per tahun dengan modal yang harus dikeluarkan sebesar Rp 251.707,00 per tahun, sehingga jumlah pendapatan responden dari luar usahatani adalah sebesar Rp 10.153.171,00 per tahunnya. Adapun rincian pendapatan responden dari usaha peternakan terlampir pada Lampiran 5.

4. Pendapatan Anggota Keluarga

Pendapatan anggota keluarga adalah pendapatan yang diperoleh oleh anggota keluarga selain responden seperti sebagai wiraswasta, dan buruh serabutan. Adapun pendapatan yang diperoleh oleh anggota keluarga responden petani padi adalah sebagai berikut.

Tabel 4.23 Analisis Rata-rata Pendapatan Anggota Keluarga Responden

Detail	Penerimaan (X)	Pengeluaran (Y)
Pendapatan Anggota Keluarga 1	7.248.000	
Pendapatan Anggota Keluarga 2	1.428.000	
Pendapatan Anggota Keluarga (X-Y)	8.676.000,00	

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Berdasarkan data di atas, minimal 1 (satu) orang dari anggota keluarga responden ikut membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun, anggota keluarga dari responden bekerja di sektor selain pertanian, seperti menjadi penjaga toko dan *cleaning service*.

5. Tabungan

Menurut Santoso dan Triandaru (2006), tabungan adalah bagian pendapatan yang diterima masyarakat yang secara sukarela tidak digunakan untuk konsumsi. Masyarakat menggunakan bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi tersebut untuk beberapa tujuan, diantaranya disimpan saja tanpa digunakan, disimpan atau ditabung pada lembaga-lembaga keuangan, dipinjamkan kepada anggota masyarakat lainnya, serta digunakan untuk penanaman modal yang produktif. Di Desa Cokrokembang, responden petani padi menabung melalui kelompok masyarakat RT bersamaan dengan saat arisan warga. Rata-rata tabungan responden selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp 363.600,00.

6. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dalam suatu periode tertentu (Halim dan Kusufi, 2012). Konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi 2 (dua) yakni konsumsi pangan dan non pangan. Konsumsi pangan responden petani padi terdiri dari pangan karbohidrat, pangan hewani, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, makanan dan minuman

jadi, dan tembakau dan sirih. Rata-rata konsumsi pangan responden petani tiap tahunnya sebesar Rp 9.794.376,00.

Tabel 4.24 Rata-rata Konsumsi Pangan Responden Petani Padi per Tahun

No.	Jenis Konsumsi Pangan	Biaya (Rp)
1.	Karbohidrat Selain Beras	256.980,00
2.	Pangan Hewani	2.078.592,00
3.	Sayur-sayuran	2.215.680,00
4.	Kacang-kacangan	915.300,00
5.	Buah-buahan	850.104,00
6.	Minyak dan Lemak	1.267.320,00
7.	Bahan Minuman	1.060.080,00
8.	Bumbu-bumbuan	196.200,00
9.	Konsumsi Lainnya (Kerupuk dan lainnya)	377.160,00
10.	Makanan dan Minuman Jadi	51.840,00
11.	Tembakau dan Sirih	525.120,00
	Total	9.794.376,00

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Konsumsi pangan karbohidrat selain beras terdiri dari tepung terigu, tepung beras, ubi, dan kentang. Rata-rata konsumsi pangan karbohidrat selain beras responden petani padi di Desa Cokrokembang per tahunnya senilai Rp 256.980,00. Konsumsi pangan hewani terdiri dari ikan segar, ikan asin, udang segar, daging ayam, telur ayam, telur puyuh, dan susu kental manis. Responden petani padi di Desa Cokrokembang rata-rata mengeluarkan biaya sebesar Rp 2.078.592,00 per tahunnya untuk konsumsi pangan hewani. Responden petani padi mengonsumsi sayur-sayuran antara lain bayam, kangkung, kubis, sawi putih, sawi hijau, buncis, kacang panjang, tomat sayur, wortel, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, mentimun, daun singkong, terong, jagung muda, nangka (biasa disebut oleh masyarakat di daerah penelitian "*gori*"), dan jamur tiram. Dalam satu tahun, responden petani padi rata-rata menghabiskan biaya sebesar Rp 2.215.680,00 untuk konsumsi sayur-sayuran. Selanjutnya responden petani padi juga mengonsumsi pangan jenis kacang-kacangan yang terdiri dari kacang tanah, kacang hijau, tempe, dan tahu dengan biaya yang dikeluarkan untuk jenis pangan kacang-kacangan sebesar Rp 915.300,00 per tahunnya.

Buah-buahan juga merupakan jenis konsumsi pangan yang dikonsumsi responden petani padi. Buah-buahan yang dikonsumsi responden antara lain jeruk, apel, alpukat, rambutan, salak, pisang, durian, pepaya, belimbing, melon, dan semangka. Per tahunnya responden mengeluarkan rata-rata biaya sebesar Rp 850.104,00 untuk konsumsi buah-buahan. Minyak dan lemak yang dikonsumsi responden antara lain minyak goreng dan kelapa butiran dengan biaya rata-rata sebesar Rp 1.267.320,00 per tahunnya. Bahan minuman yang dikonsumsi responden antara lain gula pasir, gula merah, teh, dan kopi dengan rata-rata biaya per tahunnya sebesar Rp 1.060.080,00. Bumbu-bumbuan yang dikonsumsi responden antara lain garam, terasi, kecap dan MSG (micin) dengan biaya rata-rata sebesar Rp 196.200,00 per tahunnya. Responden juga mengonsumsi konsumsi lainnya seperti kerupuk mentah, kerupuk matang, mie instan, dan bihun dengan rata-rata biaya sebesar Rp 377.160,00 per tahunnya. Makanan dan minuman jadi yang dikonsumsi oleh responden hanya berupa air galon. Beberapa responden mengonsumsi air minum galon dikarenakan letak sumur yang dekat dengan sungai tercemar limbah dikhawatirkan juga ikut tercemar. Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk air galon dalam satu tahun sebesar Rp 51.840,00.



Gambar 4.6 Rokok Kretek Merk “Alami” Pacitan

Jenis tembakau dan sirih yang dikonsumsi responden adalah tembakau dan rokok. Rokok yang dikonsumsi oleh responden merupakan rokok asli buatan

Kabupaten Pacitan yakni merk “alami” yang bisa diperoleh dengan harga Rp 8.000,00 per bungkus. Rata-rata biaya konsumsi jenis tembakau dan sirih sebesar Rp 525.120,00 per tahunnya.

Tabel 4.25 Konsumsi Non Pangan Responden Petani Padi per Tahun

No.	Jenis Konsumsi Non Pangan	Biaya (Rp)
1.	Kayu Bakar/Arang	558.000,00
2.	Gas	453.600,00
3.	BBM	934.200,00
4.	Listrik	369.240,00
5.	Pulsa / Paket Data Internet	908.400,00
6.	Perlengkapan Mandi	530.400,00
7.	Perlengkapan Mencuci	273.720,00
8.	Make up	115.200,00
9.	Iuran Lingkungan	91.200,00
10.	Perawatan Kendaraan	560.300,00
11.	Kegiatan Sosial (Hajatan dan lainnya)	572.400,00
12.	SPP Anak & Uang Gedung Sekolah	378.000,00
13.	Buku dan Alat Tulis Anak	236.263,00
14.	Uang Jajan Anak	680.769,00
15.	Kos Anak	36.000,00
16.	Pakaian	163.000,00
17.	Sprei, sarung	40.500,00
18.	Sandal / Sepatu	57.700,00
19.	Pajak Kendaraan Bermotor	120.600,00
20.	PBB di Luar Lahan Usahatani Padi	53.970,00
21.	Perbaikan Rumah	674.900,00
22.	BPJS	25.000,00
23.	Periksa ke Puskesmas	571.200,00
24.	Periksa ke Dokter Praktik	636.600,00
25.	Obat-obatan	489.600,00
26.	Keperluan Lainnya	58.200,00
	Total	9.014.759,00

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Selanjutnya konsumsi non pangan terdiri dari konsumsi non pangan bulanan dan konsumsi non pangan tahunan. Konsumsi non pangan bulanan antara lain kayu bakar/arang, gas, BBM di luar kegiatan usahatani, listrik, pulsa, perlengkapan mandi, perlengkapan mencuci, *make up*, iuran lingkungan, perawatan kendaraan, kegiatan sosial seperti hajatan, SPP anak, buku dan alat tulis anak, uang jajan anak, dan kos anak. Sedangkan konsumsi non pangan tahunan antara lain terdiri dari pakaian, spre, sarung, sandal/sepatu,

pembayaran pajak kendaraan, PBB di luar lahan usahatani, perbaikan rumah, uang gedung sekolah anak, dan keperluan anak lainnya seperti seragam, tas, sepatu sekolah.

Responden petani padi di Desa Cokrokembang seluruhnya telah menggunakan kompor gas, namun di samping itu responden petani padi di Desa Cokrokembang tetap menjadikan tungku berbahan bakar kayu sebagai media memasak yang utama. Di Desa Cokrokembang, masyarakat khususnya dalam hal ini responden petani padi membayar tagihan listrik sebesar Rp 369.240,00 per tahunnya. Biaya listrik ini sudah termasuk dengan biaya air karena di Desa Cokrokembang responden petani padi memanfaatkan sumur milik sendiri untuk kebutuhan sehari-hari dan juga di Desa Cokrokembang tidak ada layanan PDAM, sehingga tidak ada tagihan untuk pembayaran air. Bahan Bakar Minyak atau BBM yang diperhitungkan dalam konsumsi non pangan merupakan kebutuhan BBM di luar untuk keperluan usahatani padi dengan biaya rata-rata per tahunnya sebesar Rp 934.200,00. Keperluan mandi meliputi sabun mandi, pasta gigi, sikat gigi, dan shampo rata-rata per tahunnya memerlukan biaya sebesar Rp 530.400,00. Keperluan mencuci meliputi sabun cuci baju termasuk pelembut pakaian dengan biaya rata-rata per tahun sebesar Rp 273.720,00. Make up yang digunakan berupa bedak, *body lotion*, dan lipstik (disebut masyarakat di daerah penelitian sebagai "*lipen*"), namun kebanyakan dari istri responden petani laki-laki dan responden petani perempuan tidak menggunakan *make up*. Biaya yang dikeluarkan untuk make up rata-rata per tahunnya sebesar Rp 115.200,00. Iuran lingkungan merupakan iuran yang diperuntukkan untuk kegiatan lingkungan seperti perbaikan sarana prasarana, konsumsi kerja bakti dan lainnya dimana masyarakat di daerah penelitian termasuk responden petani padi diwajibkan membayar iuran sebesar Rp 5.000,00 per kepala keluarga per bulan untuk wilayah Prancak dan Barak, sedangkan wilayah Cerbon dan Kwangen sebesar

Rp 10.000,00 per kepala keluarga atau jika dirata-rata sebesar Rp 91.200,00 per tahun. Perawatan kendaraan tidak selalu dilakukan oleh tiap responden petani padi dikarenakan responden menilai selama masih bisa digunakan dan diisi BBM maka kendaraan masih layak untuk digunakan. Hal ini karena beberapa kendaraan milik responden berupa motor merupakan motor yang kondisinya sudah tidak layak dan pajaknya pun sudah tidak pernah dibayarkan lagi (di daerah penelitian disebut sebagai "*motor blong-blongan*"). Beberapa responden yang merawat kendaraan rata-rata mengeluarkan biaya sebesar Rp 560.300,00 per tahun untuk perawatan kendaraannya, sedangkan untuk biaya pajak tahunan responden petani padi rata-rata harus membayar sebesar Rp 120.600,00. Kegiatan sosial seperti hajatan memerlukan biaya rata-rata sebesar Rp 572.400,00 per tahunnya. SPP anak dan uang gedung, buku dan alat tulis, serta uang jajan masing-masing memerlukan biaya sebesar Rp 106.566,00, Rp 236.263,00, dan Rp 378.000,00 per tahunnya. Biaya uang gedung hanya dikeluarkan oleh responden petani padi saat anaknya masuk pertama kali ke jenjang pendidikan tertentu seperti TK, SD, SMP, dan SMA. Sedangkan responden petani yang menyekolahkan anaknya di daerah lain sehingga harus tinggal atau sewa kos rata-rata memerlukan biaya sebesar Rp 36.000,00 per tahunnya. Dalam satu tahun, responden petani biasanya hanya satu kali membeli pakaian, sprei dan sarung serta sandal/sepatu yang akan digunakan untuk hari raya. Meskipun demikian, tidak selalu setiap responden petani membeli untuk satu keluarga, kebanyakan membeli pakaian baru, sandal atau sepatu untuk anak-anaknya. Rata-rata biaya per tahun untuk pakaian sebesar Rp 163.000,00, untuk sprei dan sarung sebesar Rp 40.500,00 dan untuk sandal atau sepatu sebesar Rp 57.700,00. Rata-rata biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan yang dimiliki responden petani di Desa Cokrokembang selain lahan usahatani padi sebesar Rp 53.970,00 per tahun. Biaya perbaikan rumah

rata-rata sebesar Rp 674.900,00 per tahun. Beberapa responden petani juga memanfaatkan layanan BPJS dengan iuran yang harus dibayar dalam satu tahun rata-rata senilai total Rp 25.000,00. Sedangkan responden petani padi lainnya apabila memerlukan pengobatan menggunakan alternatif pemeriksaan ke puskesmas dan atau ke dokter praktik dengan biaya masing-masing sebesar Rp 571.200,00 dan Rp 636.600,00 per tahunnya dan biaya untuk obat-obatan sebesar Rp 489.600,00. Keperluan lainnya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keperluan untuk seragam dan sepatu anak yang biasanya berganti tiap satu tahun sekali dimana biaya yang harus dikeluarkan oleh responden petani sebesar Rp 58.200,00 per tahunnya.

Sehingga, total rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga responden adalah sebagai berikut.

Tabel 4.26 Total Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Responden per Tahun

Detail	Penerimaan (X)	Pengeluaran (Y)
Konsumsi Pangan		9.794.376,00
Konsumsi Non Pangan		9.014.759,00
Jumlah Pengeluaran Konsumsi (X-Y)	-	18.809.135,00

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

7. Total Pendapatan Rumah Tangga

Total pendapatan rumah tangga adalah total pendapatan yang diperoleh responden dari usahatani padi, usaha peternakan, dari luar usahatani dan pendapatan dari anggota keluarga dikurangi dengan total biaya usahatani dan konsumsi satu keluarga ditambah dengan tabungan yang dimiliki. Pendapatan tersebut dihitung dalam kurun waktu satu tahun. Adapun total pendapatan rumah tangga responden usahatani padi adalah sebagai berikut.

Tabel 4.27 Analisis Pendapatan Rumah Tangga Responden per Tahun

Detail	Pendapatan (X)	Pengeluaran (Y)
Pendapatan Usahatani Padi (A)	4.905.448,98	
Pendapatan Usaha Peternakan (B)	9.750.000,00	
Pendapatan di Luar Usahatani (C)	10.153.171,00	
Pendapatan Anggota Keluarga (D)	8.676.000,00	
Tabungan (E)	363.600,00	
Pengeluaran Konsumsi (F)		- 18.809.135,00
Pendapatan Rumah Tangga	Pendapatan (X) + Pengeluaran (Y)	
	A + B + C + D + E + F	
	15.039.084,98	

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.28 di atas diketahui bahwa pendapatan rumah tangga responden per tahunnya sebesar Rp 15.039.084,98.

8. Tingkat Kontribusi Usahatani Padi

Menurut data yang telah diperoleh sebelumnya menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan dari usahatani padi dalam satu tahun adalah sebesar Rp 4.905.448,98 dan rata-rata pendapatan rumah tangga dalam satu tahun adalah sebesar Rp 15.039.084,98.

Kontribusi dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi, dengan kriteria keputusan sebagai berikut (Salbiah, 2007 *dalam* Rusdiah, 2008) :

- Jika kontribusi pendapatan usahatani padi $< 30\%$ dari total pendapatan rumah tangga, dikategorikan kontribusinya rendah
- Jika kontribusi pendapatan usahatani padi $30,01\% - 50\%$ dari total pendapatan rumah tangga, dikategorikan kontribusinya sedang
- Jika kontribusi pendapatan usahatani padi $> 50\%$ dari total pendapatan rumah tangga, dikategorikan kontribusinya tinggi

Untuk menghitung seberapa besar tingkat kontribusi usahatani padi terhadap pendapatan rumah tangga menggunakan rumus:

$$\text{TK Usahatani Padi} = \frac{\text{Rata-rata pendapatan usahatani padi per tahun}}{\text{Rata-rata pendapatan total per tahun}} \times 100\%$$

Keterangan : TK = Tingkat Kontribusi

Tingkat kontribusi usahatani padi terhadap pendapatan rumah tangga responden di Desa Cokrokembang adalah :

$$\text{TK Usahatani Padi} = \frac{\text{Rp 4.905.448,98}}{\text{Rp 15.039.084,98}} \times 100 = 32,62\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa kontribusi usahatani padi terhadap total pendapatan rumah tangga berada pada kategori sedang yaitu sebesar 32,62%. Artinya sebesar 32,62% dari total pendapatan rumah tangga bersumber dari usahatani padi, sedangkan sisanya berasal dari usaha peternakan, usaha di luar usahatani, dan dari anggota keluarga.

4.5.4 Tingkat Ketimpangan Pendapatan Petani Padi di Desa Cokrokembang

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relative. Tidak meratanya distribusi pendapatan dapat memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Ketimpangan pendapatan masyarakat perkotaan semakin melebar dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Salah satu penyebabnya adalah ketimpangan akses pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar serta pertumbuhan kesejahteraan yang tidak merata. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat desa bermigrasi mencari nafkah di kota dengan bekerja di sektor informal. Akibatnya, kota mendapat limpahan penduduk dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Masyarakat desa bermigrasi ke kota karena menganggap desa sudah tak lagi mampu menjadi sumber nafkah.

Sementara banyak kebijakan di perkotaan yg tidak ramah terhadap sektor informal yang menjadi sumber kehidupan masyarakat miskin. Kini, jumlah

penduduk kota bertambah pesat, jumlah petani berkurang, jumlah pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri pun meningkat. Berdasarkan informasi yang didapat dari petani sampel juga menyebutkan bahwa masyarakat di Desa Cokrokembang juga banyak yang bekerja di kota terutama yang berumur muda dan tidak sedikit anak dari petani di Desa Cokrokembang tidak diprioritaskan menjadi petani untuk meneruskan orang tuanya tetapi diarahkan untuk bekerja ke sektor lain. Hal tersebut dikarenakan pengalaman dari petani di sektor pertanian yang semakin berkurangnya lahan dan pendapatan yang rendah. Sehingga banyak dari orang tua yang bekerja di sektor pertanian tidak ingin anak-anak mereka mengalami hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh orang tua tersebut.

Koefisien Gini (Gini Ratio) merupakan alat analisis ketimpangan distribusi pendapatan yang digunakan oleh peneliti untuk menghitung tingkat ketimpangan pendapatan 100 petani sampel di Desa Cokrokembang. Besarnya nilai koefisien Gini (Gini Ratio) berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Distribusi pendapatan akan semakin merata jika nilai koefisien Gini mendekati 0 dan sebaliknya jika nilai koefisien Gini mendekati 1 maka distribusi pendapatan akan semakin tidak merata atau semakin timpang. Untuk lebih jelasnya mengenai nilai koefisien gini (Gini Rasio) petani sampel di Desa Cokrokembang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.28 Hasil Analisis Rasio Gini

No	Golongan Pendapatan	Persentase Petani Padi	Rata-rata Nilai Pendapatan (Rupiah)	Kumulatif Pendapatan	Peluang Kumulatif Pendapatan	Peluang Petani Padi	$G = E + (E-1)$	$H = F \cdot G$
	A	B	C	$D = C1+D1 \text{ dst}$	$E = \text{Tiap D} / \text{Total D}$	$F = B/100$		
1	< 1.000.000	21	1.614.538	0	-	0,21	-	0
2	1.000.001 - 5.000.000	10	3.116.906	3.116.906	0,038343203	0,1	0	0,003834
3	5.000.001 - 10.000.000	23	7.822.356	10.939.262	0,1345714	0,23	0,1729146	0,03977
4	10.000.001 - 15.000.000	26	12.501.779	23.441.041	0,288364393	0,26	0,42293579	0,109963
5	> 15.000.000	20	20.351.401	43.792.442	0,538721004	0,2	0,8270854	0,165417
	Jumlah	100	42.177.904	81.289.650	1,00	1,00	Jumlah	0,318985
							Indeks Gini	0,681015

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan petani di Desa Cokrokembang adalah sebesar 68% atau 0,68. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kalalo (2016) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai Rasio Gini untuk golongan petani sebesar 0,608 yang artinya terjadi ketimpangan pendapatan pada golongan petani dan Kurva Lorenz dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dari seluruh penduduk masyarakat golongan pekerjaan petani dihitung mulai dari golongan dengan pendapatan terendah hingga tertinggi ternyata menerima 11,59% dari keseluruhan pendapatan yang diterima.

Rata-rata nilai pendapatan dihitung dengan menjumlahkan pendapatan responden dari masing-masing golongan pendapatan dibagi dengan persentase petani padi. Dari data diatas, diketahui bahwa :

- a. sebanyak 21 responden memiliki pendapatan di bawah Rp 1.000.000,00, dengan rata-rata pendapatan sebesar minus Rp 1.614.538,00
- b. sebanyak 10 responden memiliki pendapatan di antara Rp 1.000.001 sampai dengan Rp 5.000.000,00, dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 3.116.906,00
- c. Sebanyak 23 responden memiliki pendapatan di antara Rp 5.000.001 sampai dengan Rp 10.000.000,00, dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 7.822.356,00
- d. Sebanyak 26 responden memiliki pendapatan di antara Rp 10.000.001 sampai dengan Rp 15.000.000,00, dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 12.501.779,00
- e. Sebanyak 20 responden memiliki pendapatan di atas Rp 15.000.000,00, dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 20.351.401,00

Selanjutnya kumulatif pendapatan dihitung dengan cara menjumlahkan rata-rata nilai pendapatan golongan ke i dengan kumulatif pendapatan golongan

i-1. Peluang kumulatif pendapatan dihitung dengan membagi kumulatif pendapatan masing-masing golongan pendapatan dengan jumlah total kumulatif pendapatan. Peluang petani padi dihitung dengan membagi persentase petani padi masing-masing golongan dengan jumlah total persentase petani padi.

Mengacu pada indikator tingkat ketimpangan pendapatan (gini rasio) BPS, maka dapat diketahui bahwa tingkat ketimpangan pendapatan petani padi di Desa Cokrokembang berada dalam kategori tinggi ($0,68 > 0,50$). Hal tersebut dikarenakan perbedaan pendapatan yang didapat oleh petani mengakibatkan tingginya angka koefisien gini (Gini Rasio). Perbedaan pendapatan antara petani padi satu dengan yang lainnya dikarenakan kualitas SDM yang ada di Desa Cokrokembang sangat rendah. Banyaknya petani padi yang tidak bersekolah membuat kemampuan dalam mengembangkan teknologi usahatani padi tidak maksimal. Faktor usia juga mempengaruhi pendapatan petani padi dikarenakan tidak bisa maksimal dalam melakukan kegiatan-kegiatan lain diluar usahatani padi agar dapat membantu menambah pendapatan petani tersebut. Faktor banyaknya tanggungan keluarga dan anggota keluarga yang bekerja juga mempengaruhi besarnya pendapatan yang didapat oleh petani padi.

Berdasarkan tabel rasio gini, sekitar 21% dari total responden petani padi memiliki pendapatan terendah bahkan minus. Artinya pendapatan yang dihasilkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden petani (Hariyono, 2023) mengatakan bahwa:

“... nggih kangge nutupi kebutuhan nempil riyin teng arisan, wonten sing nempil teng mekar tapi umpami ngge modal pertanian tetep ngangge modal piyambak, soale kados winih menika kula kan ngangge winih saking panen sakderengipun dados mboten tumbas malih, nggih dicekap-cekapne wong nggih kahanane pancen ngaten niki...”

“(... ya untuk menutupi kebutuhan pinjam dahulu ke arisan, ada yang ke mekar, tetapi misal untuk modal pertanian tetap pakai modal sendiri, karena

seperti benih saya memakai benih dari hasil panen sebelumnya jadi tidak perlu beli lagi, ya dicukup-cukupkan karena memang keadaannya seperti ini...)”
(Wawancara pada tanggal 19 Maret 2023 pukul 08.30 WIB di Desa Cokrokembang)

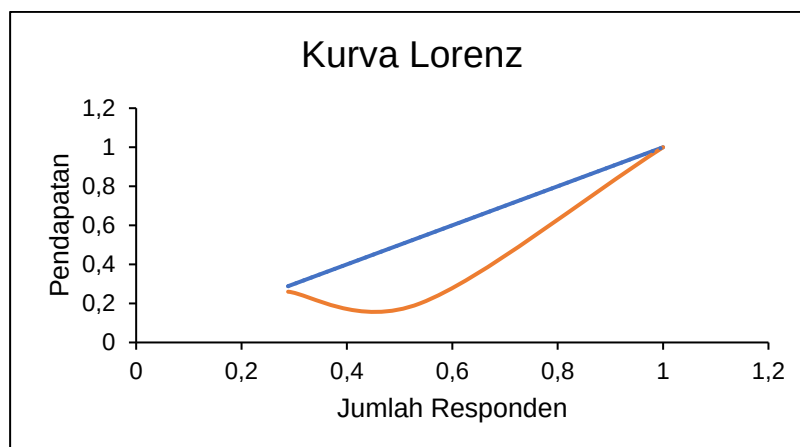
Responden petani padi di Desa Cokrokembang tidak jarang yang memanfaatkan program pemerintah yakni PNM Mekaar untuk mendapatkan pinjaman uang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. PNM Mekaar merupakan singkatan dari Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Lembaga permodalan ini didirikan oleh pemerintah pada tahun 2015 untuk membantu permodalan bagi perempuan prasejahtera pelaku UMKM. Para istri dari responden petani padi laki-laki dan responden petani padi perempuan sebagian mengikuti program tersebut untuk mendapatkan pinjaman. Jumlah pinjaman yang dapat diperoleh adalah sebesar Rp 2.000.000,00 sampai Rp 5.000.000,00 dengan bunga sebesar 25%. Kemudahan dalam meminjam uang di PNM Mekaar menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat khususnya petani padi di Desa Cokrokembang karena tidak memerlukan jaminan apapun. Dikarenakan program PNM Mekaar sifatnya berkelompok yakni minimal 10 orang perempuan, maka secara tidak langsung keluarga responden petani padi akan mengajak perempuan yang lain di lingkungannya sehingga hutang pun tidak dapat dihindari. Terlebih lagi kondisi ekonomi keluarga responden petani tidak stabil.

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh responden untuk meminjam dana dari program PNM Mekaar antara lain : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK); foto rumah; dan nomor telepon seluler yang dapat dihubungi. Masa tenor pinjaman maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan atau 2 (dua) tahun. Pembayaran cicilan dilakukan pada saat pertemuan yang dilakukan 2 (dua) minggu sekali. Selama menjadi nasabah PNM Mekaar, pihak PNM Mekaar mewajibkan para anggotanya untuk berkumpul dan

mengucap janji nasabah PNM Mekaar pada setiap pertemuan. Janji ini bukan sekadar ucapan, tetapi juga harus dipraktekkan. Jika ada salah satu nasabah yang melanggar aturan, maka nasabah lainnya dalam kelompok tersebut harus ikut bertanggung jawab.

Sebanyak 10% responden petani padi yang juga memiliki pendapatan rendah, namun demikian masih memiliki pendapatan di angka positif dan dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Sebanyak 10% responden petani padi memiliki pendapatan antara Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000,00 per tahunnya, kemudian sebanyak 23% responden petani padi dari total keseluruhan responden petani padi memiliki pendapatan antara Rp 5.000.001,00 sampai dengan Rp 10.000.000,00 per tahunnya, sebanyak 26% responden berpendapatan sebesar Rp 10.000.001,00 sampai dengan Rp 15.000.000,00 per tahunnya dan sisanya sebanyak 20% memiliki pendapatan lebih dari Rp 15.000.000,00 per tahunnya.

Selanjutnya koefisien gini (gini ratio) dapat pula dijelaskan melalui grafik kurva lorenz yang terbagi atas 2 (dua) sumbu dimana sumbu horisontal menggambarkan persentase (%) kumulatif penerima pendapatan (responden petani padi), sedangkan sumbu vertikal menyatakan persentase (%) kumulatif dari total pendapatan yang diterima oleh responden petani padi. Di samping itu, grafik kurva lorenz juga memiliki garis linear sepanjang diagonal grafik, garis ini disebut dengan garis pemerataan. Semakin jauh jarak antara garis kurva lorenz dengan garis pemerataan maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangannya. Begitu pula sebaliknya, semakin dekat jarak antara garis kurva lorenz dengan garis pemerataan maka tingkat ketimpangannya semakin rendah atau distribusi pendapatan akan semakin merata. Untuk lebih jelas lagi mengenai grafik kurva lorenz yang menggambarkan distribusi pendapatan responden petani padi di daerah penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini



Gambar 4.7 Kurva Lorenz Petani Padi di Desa Cokrokembang

Kurva lorenz digambarkan pada sebuah bidang persegi/bujur sangkar dengan bantuan garis diagonalnya. Garis diagonal bersudut 45° disebut garis “distribusi merata”. Semakin dekat kurva dengan diagonalnya, maka ketimpangan semakin rendah dan sebaliknya semakin melebar kurva ini menjauhi diagonal maka ketimpangan yang terjadi semakin tinggi. Dari kurva lorenz diketahui bahwa jarak pada kurva yang terbentuk melebar pada bagian bawah. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan antar kelompok pendapatan terbawah diantara responden petani padi di Desa Cokrokembang tinggi.

Cara lain yang diterapkan dalam mengidentifikasi ketimpangan pendapatan adalah kriteria yang dikemukakan oleh Bank Dunia. Indikator kesenjangan pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase pendapatan penduduk dari 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah dibandingkan dengan total pendapatanseluruh penduduk. Kesenjangan distribusi pendapatan dikategorikan sebagai berikut:

- a. Tingkat ketimpangan tinggi (*high inequality*), bila proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen;

- b. Tingkat ketimpangan sedang (*moderate inequality*), bila proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen;
- c. Tingkat ketimpangan rendah (*low inequality*), bila proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk dalam kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 70 persen.

Tabel 4.29 Ketimpangan Pendapatan Responden Berdasarkan Kriteria World Bank

No	Kriteria Penduduk	Jumlah Pendapatan	Persentase terhadap Total Pendapatan
1	40% penduduk pendapatan terendah	59.188.841	6,482%
2	40% penduduk pendapatan menengah	446.775.343	48,935%
3	20% penduduk pendapatan tinggi	407.028.027	44,581%
	Total	915.392.210	100%

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa persentase jumlah pendapatan dari 40% responden dengan pendapatan terendah terhadap total pendapatan seluruh responden adalah sebesar 6,482%. Mengacu pada kriteria World Bank, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi pada responden petani padi di Desa Cokrokembang termasuk dalam kategori ketimpangan tinggi (*high inequality*). Menurut Bank Dunia, terjadinya perubahan penerimaan pendapatan pada masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah dan atas, tidak akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan karena pendapatan yang diterima oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah (40 persen penduduk berpenghasilan menengah) dan atas (20 persen penduduk berpenghasilan tinggi) tidaklah diperhatikan.

Hasil penelitian ini memperkuat pendapat dari Wolrd Bank (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan selama 15 tahun di Indonesia telah membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan kelas menengah yang berkembang. Namun, pertumbuhan selama satu dasawarsa

terakhir hanya menguntungkan 20 persen warga terkaya, sementara 80 persen populasi sisanya sekitar 205 juta orang tertinggal di belakang. Meningkatnya kesenjangan standar hidup dan semakin terpusatnya kekayaan di tangan segelintir orang, menyebabkan tingkat ketimpangan Indonesia relatif tinggi dan naik lebih cepat daripada sebagian besar negara tetangga di Asia Timur.

Selanjutnya, mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Pacitan per tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.961.154,00 per bulan atau setara Rp 23.533.848,00 per tahun, sedangkan pendapatan petani padi dari usahatani padi per tahun adalah sebesar 4.905.448,98 atau setara Rp 408.787,415 per bulan, artinya pendapatan petani dari usahatani padi berada jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Pacitan. Dengan demikian, maka kehidupan responden petani padi di Desa Cokrokembang tergolong dalam kategori miskin dan belum sejahtera. Kemiskinan yang terjadi pada petani padi di Desa Cokrokembang dapat dikategorikan sebagai kemiskinan kultural. Hal ini dikarenakan petani padi yang memiliki budaya santai. Hal ini tercermin dari petani padi yang tidak melakukan perkembangan dalam usahatani, petani cenderung monoton hanya menanam tanaman padi saja, sedangkan sebenarnya lahan sawah bisa ditanami komoditas lain (khususnya di Dusun Prancak dan Dusun Barak). Akhirnya, tidak ada rotasi tanaman yang terjadi, sehingga penghasilan petani padi dari usahatani hanya mengandalkan usahatani padi saja. Selain itu, dari sisi pengusahaan lahan, luasan sawah yang dimiliki oleh masing-masing petani sangat kecil. Mayoritas petani padi memiliki luasan sawah berkisar 0,06 hektar sampai 0,10 hektar. Hal ini akan mengakibatkan adanya fragmentasi lahan, yakni lahan pertanian yang terpencar-pencar atau tidak dalam satu luasan lahan utuh dikarenakan adanya sistem warisan, jual beli lahan, pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Dengan kepemilikan dan penguasaan lahan yang saat ini sudah termasuk sempit, maka

ke depannya dikhawatirkan lahan pertanian akan terdegradasi kepemilikannya per orang, terlebih lagi pada petani padi yang memiliki keturunan atau anak lebih dari satu orang.

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan diatas, yakni teori rasio gini, kurva lorenz, teori world bank tentang ketimpangan dan komparasi pendapatan responden dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Pacitan, maka seluruh teori menyatakan bahwa responden petani padi di Desa Cokrokembang mengalami ketimpangan pada kategori tinggi (*high inequality*), termasuk dalam kategori miskin dan belum sejahtera. Hasil penelitian ini sejalan dengan Mulyani (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat Petani Kabupaten Gowa” yang menyatakan bahwa berdasarkan metode gini ratio dan kurva lorenz hasil menunjukkan terjadi ketimpangan pendapatan yang tinggi pada petani di Kabupaten Gowa tahun 2016.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan antar kelompok pendapatan petani padi adalah sebagai berikut:

1. Luas lahan yang dikuasai oleh masing-masing responden berbeda

Berdasarkan data pada Tabel 4.15, sebanyak 63 responden memiliki lahan seluas 0,07 hektar, 2 responden memiliki lahan seluas 0,08 hektar dan 5 responden memiliki luas lahan seluas 0,09 hektar. Luasan-luasan ini merupakan luasan 1 (satu) petak lahan. Perbedaan luasan yang diusahakan oleh responden mengakibatkan jumlah pendapatan antar responden mengalami kesenjangan atau ketimpangan.

2. Tingkat Pendidikan Petani Padi

Sebanyak 38% dari total responden petani padi tidak menempuh pendidikan formal. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran akan pendidikan di jaman dahulu. Tidak ditempuhnya pendidikan formal ini sangat mempengaruhi

pola pikir petani dan kemampuan petani dalam merespon apabila terdapat teknologi, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan pendapatan karena tidak adanya percepatan adopsi inovasi. Pengetahuan menjadi salah satu faktor penentu dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (Hiola dan Puspaningrum, 2019). Pengetahuan petani mempunyai arti penting, karena pengetahuan petani dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuannya. Pengetahuan dapat meningkatkan wawasan dan akan memperkuat motivasi petani mencapai keberhasilan karena petani menjadi lebih yakin akan kemampuannya.

3. Pendapatan lain dari usaha peternakan, luar usahatani dan anggota keluarga

Jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh masing-masing rumah tangga responden tentunya berbeda-beda. Rumah tangga dengan pendapatan hanya mengandalkan usahatani padi akan berada jauh di bawah rumah tangga yang mengandalkan usahatani padi, usaha peternakan, terlebih lagi anggota keluarga berperan dalam memperoleh pendapatan.

4. Perbedaan Sumber Pengairan

Sumber pengairan di Desa Cokrokembang terbagi menjadi 2 (dua), yakni dari sungai dan dari sumur bor. Aliran sungai yang mengairi sawah di Desa Cokrokembang memiliki 2 (dua) hulu. Hulu pertama berada di Desa Kluwih, Kecamatan Tulakan (sebelah barat), mengalir wilayah Dusun Kwangen dan Dusun Cerbon, sehingga kualitas air sungai di kedua dusun ini kurang cocok untuk pertanian padi dikarenakan mengandung limbah hasil pertambangan. Sedangkan hulu kedua berada di Desa Cangkring (sebelah utara), mengalir wilayah Dusun Prancak dan Dusun Barak. Kondisi air sungai yang berasal dari Desa Cangkring lebih baik karena tidak tercemar limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Perbedaan ini berpengaruh terhadap hasil produksi padi

responden sehingga salah satu penyebab ketimpangan pendapatan responden dikarenakan adanya perbedaan sumber pengairan.

5. Umur Petani Padi

Mayoritas responden dalam penelitian ini berusia antara 56 sampai dengan 60 tahun sebanyak 27%. Umur petani padi berkaitan dengan pengalaman berusahatani dan kemampuan petani dalam melaksanakan kegiatan usahatani padinya. Dari sisi pengalaman, responden mayoritas dapat dikatakan telah berpengalaman, namun demikian dikarenakan usia yang tidak lagi muda, maka kemampuan dalam mengadaptasi teknologi juga rendah, mengakibatkan kegiatan usahatani padi inefisien dan tidak memiliki inovasi, akibatnya pendapatan responden tidak dapat optimal.

4.5.5 Alternatif Solusi Untuk Mengurangi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Petani Padi di Desa Cokrokembang

Adanya disparitas atau ketimpangan pendapatan petani padi yang tinggi atau lebar menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan petani padi di Desa Cokrokembang masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) UU tentang P3 mengamanatkan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. Upaya tersebut sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah yang tercermin dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap sektor pertanian. Dukungan APBN ini meliputi belanja pemerintah pusat melalui pemberian subsidi pupuk dan transfer ke daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), serta belanja Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai *leading sector* pertanian.

Upaya untuk mengatasi ketimpangan pendapatan responden petani padi di Desa Cokrokembang adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Pupuk Bersubsidi Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Administrasi

Dukungan APBN melalui pemberian subsidi pupuk kepada petani merupakan implementasi dari Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UU tentang P3 yang menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian. Selama ini, responden petani padi di Desa Cokrokembang sangat bergantung pada pupuk yang disediakan oleh pemerintah (pupuk subsidi). Hal ini dikarenakan adanya ketergantungan dari tanaman padi terhadap pupuk itu sendiri, yakni pupuk phonska dan pupuk urea. Pupuk bersubsidi hanya dapat dialokasikan maksimal pada tingkatan kios resmi yang bekerjasama dengan pemerintah, sehingga dalam pembagiannya kelompok tani mengambil pupuk bersubsidi ke kios resmi tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi kecurangan dalam pembagian pupuk bersubsidi. Oknum ketua kelompok tani yang seharusnya mengakomodir kebutuhan pupuk kelompok tani, seringkali melakukan praktik curang, seperti memberikan harga di atas HET dan mengalokasikan pupuk bersubsidi hanya kepada petani padi yang memiliki kedekatan dengan oknum ketua kelompok tani tersebut. Akibatnya, pembagian pupuk bersubsidi tidak dapat merata.

Dari sisi waktu, pengalokasian pupuk sering mengalami keterlambatan. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh penyerahan pagu (besaran pupuk bersubsidi) kepada pemerintah yang mengalami keterlambatan, sehingga proses administrasi juga terhambat. Sedangkan dari sisi produsen yakni PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) akan melayani pupuk bersubsidi sesuai dengan yang dibutuhkan pemerintah. Proses administrasi yang memakan waktu ditambah lagi dengan waktu pendistribusian mengakibatkan pupuk bersubsidi sering tidak tepat waktu, seringkali disebut oleh masyarakat bahwa pupuk

langka. Padahal, yang sebenarnya terjadi selain keterlambatan penyerahan pagu juga diakibatkan oleh tidak tepatnya data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), sehingga kuota pupuk yang didapatkan oleh petani terbatas. Menurut Fajri (2022), hanya 48% dari kebutuhan pupuk petani yang terdaftar di e-RDKK.

Berdasarkan fakta diatas, maka diperlukan adanya suatu *monitoring* oleh berbagai pihak, termasuk petani dan pemerintah desa terhadap pelaksanaan pemberian pupuk subsidi sehingga pengalokasiannya dapat tepat sasaran kepada seluruh petani, tidak hanya dinikmati oleh oknum tertentu, selain itu juga perlu *monitoring* terhadap pencatatan kebutuhan pupuk petani agar dapat meminimalisir terjadinya kekurangan pupuk, juga perlu memperhatikan ketepatan waktu dalam penyerahan data e-RDKK ke pemerintah supaya tidak berdampak pada keterlambatan pupuk.

Fakta yang terjadi di Desa Cokrokembang terkait pupuk juga terjadi pada daerah lain. Ramlayana, Ansyari, dan Sudarmi (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone” menyatakan bahwa harga pupuk belum tepat harga karena adanya biaya tambahan sehingga harga pupuk mengalami kenaikan harga yang tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET). Selain itu, penyaluran pupuk bersubsidi juga belum tepat waktu karena sering mengalami keterlambatan. Sinulingga, Fauzia, dan Khadijah (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Bantuan Pupuk, Benih, dan Pestisida PT Perkebunan Nusantara III Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Padi” menunjukkan hasil bahwa produktivitas padi dan pendapatan petani padi di daerah penelitian setelah mendapatkan bantuan dari PT Perkebunan Nusantara III lebih tinggi daripada produktivitas padi dan pendapatan petani sebelum mendapatkan bantuan.

2. Pendampingan, Advokasi, dan Pemberdayaan Petani Melalui Program Terpadu dengan Kementerian Desa, Kementerian Sosial dan Pemerintah Kabupaten

Alternatif solusi yang dapat diterapkan dengan kondisi yang saat ini terjadi adalah dengan melakukan pendampingan kepada para petani secara masif. Pendampingan ini diperlukan untuk mengurangi ketergantungan petani padi terhadap pupuk kimia, melakukan pemupukan sesuai anjuran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) dan mendorong pupuk organik dan pupuk hayati untuk menyehatkan tanah kembali. Selanjutnya, kapasitas penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai *man on the spot* perlu ditingkatkan untuk mendukung e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan pendampingan Kartu Tani. Selama ini pendistribusian pupuk sering terjadi masalah akibat tidak validnya elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Sehingga, pendampingan ini sangat relevan mengingat di Desa Cokrokembang juga terdapat penyuluh pertanian lapangan (PPL), yang memiliki tugas pokok mengubah perilaku petani agar mampu menolong dirinya sendiri untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya. Meskipun demikian, terdapat kendala dimana jumlah penyuluh pertanian yang tersedia saat ini hanya 1 (satu) orang yang membawahi beberapa desa, sehingga penyuluh tidak dapat fokus ke Desa Cokrokembang saja, padahal kondisi Desa Cokrokembang memerlukan perhatian khusus mengingat kondisi irigasi atau pengairannya yang tercemar limbah. Diperlukan peran dari pemerintah pusat untuk penambahan tenaga pendamping dalam menunjang kegiatan usahatani khususnya usahatani padi di Desa Cokrokembang.

Advokasi telah menjadi sebuah paradigma bertindak yang bertujuan untuk membebaskan petani dari bayang-bayang kemiskinan dan ketidakberdayaan. Dalam perspektif perubahan sosial, advokasi digunakan untuk melakukan pembelaan yang sifatnya dilihat dari kacamata korban dalam hal ini petani.

Berkaca dari ketidakberdayaan petani dalam menghadapi pencemaran lingkungan yang merugikan pertaniannya dan diperparah dengan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, maka pendampingan adalah bagian tidak terpisahkan atas kerja advokasi. Kerja kolektif merupakan bentuk advokasi kepada petani atas kasus yang melilit petani. Secara *de facto*, gerakan petani di Indonesia masih eksis, namun secara *de jure*, gerakan petani cenderung tertutup dan tidak tampak di permukaan publik. Untuk menyuarakan nasib petani, organisasi dalam hal ini aktivis harus melakukan gerakan advokasi. Bentuk kongkrit dari advokasi adalah melalui pendampingan kelompok tani rentan. Sehingga perlu dibentuk suatu gerakan sosial yang kompromistik. Dengan adanya konsolidasi organisasi, menyuarakan hak-hak petani menjadi bagian dari bentuk perlawanan. Tidak mungkin dapat terwujud sebuah perlawanan secara masif jika organisasi petani tidak dibentuk. Untuk itu, konsolidasi organisasi petani menjadi instrumen penting untuk melakukan perjuangan membela kepentingan secara kolektif.

Pemberdayaan petani melalui program terpadu dengan kementerian desa yakni penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat desa memiliki kemampuan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan pangan di desa secara mandiri. Alternatif ketahanan pangan yang dapat direplikasi daerah antara lain: pemanfaatan pekarangan pangan lestari (P2L), pengembangan lumbung pangan masyarakat, pertanian keluarga, pengembangan korporasi usahatani, toko tani Indonesia, pengembangan UMKM pangan lokal.

Pemberdayaan petani melalui program terpadu dengan kementerian sosial antara lain dengan program padat karya. Program padat karya oleh kementerian sosial difokuskan di desa. Anggaran yang digunakan untuk program ini adalah sebesar 12 Triliun atau 20% dari dana desa yakni 60 Triliun. Jika program ini

dapat memberdayakan 200 petani dan terdapat 74.000 desa, maka program ini dapat menyerap 15 juta tenaga kerja (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018). Selain itu, untuk pengentasan kemiskinan pemerintah desa perlu melakukan *update* data penerima bantuan sosial. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos termasuk petani padi di Desa Cokrokembang.

Pemberdayaan petani padi melalui program terpadu dengan pemerintah Kabupaten Pacitan antara lain dengan cara peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menjalin kerjasama dengan Politeknik Pembangunan Pertanian Malang (Polbangtan) untuk mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh. Namun demikian, kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan ini belum mampu menjangkau sebagian petani termasuk petani padi di Desa Cokrokembang, sehingga ke depannya Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu memberikan atensi lebih terhadap daerah pertanian yang memiliki potensi, baik dari sisi luas wilayahnya maupun sumber daya alam lainnya, dan daerah pertanian yang memiliki permasalahan mendesak untuk diatasi seperti Desa Cokrokembang. Dengan adanya berbagai wadah bagi masyarakat khususnya petani padi, diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup dan mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai efektivitas peran penyuluh pertanian, seperti yang dikemukakan oleh Afrinawati, Usman, dan Baihaqi (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Penyuluhan Pertanian Terhadap Pendapatan Usahatani Padi Sawah di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar” yang menyatakan bahwa efektivitas penyuluhan pertanian sebesar 94,8% dari sebelum adanya kegiatan penyuluhan sebesar 72,9% yang berarti juga terdapat peningkatan pendapatan petani dari

sebelumnya hanya Rp 20.194.705 per Ha per MT meningkat menjadi Rp 30.046.062 per Ha per MT. Selanjutnya Latif, Ilsan, dan Rosada (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Hubungan Peran Penyuluh Pertanian Terhadap Produktivitas Petani Padi (Studi Kasus Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru)” menyatakan bahwa peran penyuluh sebagai motivator dan fasilitator untuk meningkatkan produktivitas petani berada pada kategori tinggi, dan terdapat hubungan yang signifikan antara peran penyuluh dengan peningkatan produktivitas usahatani petani.

3. Memberikan Fasilitas Perluasan Pemasaran Beras

Beras yang dihasilkan dari sawah petani Desa Cokrokembang selama ini dijual kepada perorangan maupun kepada pedagang besar. Petani biasanya melakukan tunda jual dari gabah yang dihasilkan menyesuaikan dengan kebutuhannya. Saat membutuhkan uang, petani baru akan menggiling gabahnya lalu menjualnya dalam bentuk beras. Selain itu, petani melakukan tunda jual karena berharap nilai tawar terhadap berasnya akan mengalami kenaikan. Namun demikian, hal ini tentunya mengandung risiko bahwa gabah yang disimpan bisa saja mengalami kerusakan dan diserang oleh hewan, seperti tikus. Untuk lingkup desa, perlu adanya suatu inovasi berupa koperasi yang dinaungi minimal oleh pemerintah desa untuk menjamin kepastian pasar dari produk beras yang dihasilkan oleh petani padi. Selanjutnya koperasi tersebut diharapkan dapat menjalin sistem kemitraan (*contact farming*) dengan petani padi di Desa Cokrokembang dan kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait di atasnya (eksportir/buyer). Mengingat bahwa beras merupakan produk pertanian yang memiliki karakteristik khusus salah satunya mudah rusak, maka diperlukan suatu perjanjian antara petani dengan koperasi tersebut, sehingga kedua belah pihak sudah memahami syarat dan ketentuan atas kerjasama pemasaran dari awal. Dengan adanya alternatif solusi berupa koperasi pertanian, diharapkan petani

dapat terhindar dari risiko kerusakan gabah dan mendapatkan kepastian harga sehingga tidak mudah dimonopoli harga oleh pedagang besar. Kerjasama kemitraan ini akan menguntungkan petani padi karena mempunyai jaminan pasar dan harga (*bargaining position*).

Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa koperasi ataupun toko pertanian berperan positif dalam agribisnis pertanian. Koib dan Simamora (2022) dalam hasil penelitiannya tentang “Persepsi Petani Tentang Pentingnya Koperasi Pertanian” menyebutkan bahwa koperasi telah merubah paradigma para petani dari segi pola pikir sehingga petani dapat mengatur keuangannya dengan baik di koperasi. Selain itu, Susilo (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Koperasi Agribisnis Dalam Ketahanan Pangan di Indonesia” menyebutkan bahwa koperasi merupakan bangun usaha paling cocok untuk masyarakat agribisnis terutama di pedesaan yang mempunyai karakteristik sesuai jiwa koperasi yakni gotong royong, saling membantu, kesetiakawanan yang tinggi, dan jiwa tolong menolong. Selanjutnya, Susilo (2013) juga menyebutkan bahwa di masa lalu koperasi agribisnis utamanya koperasi unit desa (KUD), secara empiris telah mampu menjaga stabilitas pangan hingga tercapainya swasembada pangan.

4. Program Asuransi Pertanian

Guna mengurangi resiko usahatani padi, pemerintah daerah perlu melakukan program Asuransi Pertanian sehingga stabilitas ketersediaan pangan terjaga sekaligus membantu kehidupan petani yang masih berada pada kondisi kemiskinan yang relatif tinggi. Asuransi pertanian merupakan suatu bentuk perlindungan kepada para petani, melalui perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usahatani khususnya tani padi.

Usaha di sektor pertanian khususnya usahatani padi dihadapkan pada resiko ketidakpastian yang cukup tinggi, antara lain kegagalan panen yang disebabkan perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit/ Organisme Pengganggu Tumbuhan atau OPT yang menjadi sebab kerugian usaha petani. Untuk menghindarkan dari keadaan tersebut pemerintah saat ini memberikan solusi terbaik berupa program Asuransi Usaha Tani Padi yang disingkat dengan AUTP, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap risiko ketidakpastian dengan menjamin petani mendapatkan modal kerja untuk berusaha tani dari klaim asuransi. Dari jaminan perlindungan ini maka petani dapat membiayai pertanaman di musim berikutnya. Diselenggarakannya AUTP tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat resiko banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan. Mengalihkan kerugian akibat resiko banjir, kekeringan dan serangan OPT melalui pihak lain yakni pertanggungan asuransi. Sasaran penyelenggaraan AUTP adalah terlindunginya petani dengan memperoleh ganti rugi jika mengalami gagal panen.

Di Desa Cokrokembang sendiri khususnya di Dusun Prancak dan Dusun Barak kegagalan panen disebabkan oleh banjir karena lahan sawahnya memiliki ketinggian lebih rendah dibandingkan dengan Dusun Kwangen dan Dusun Cerbon. Dengan demikian, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ini relevan untuk diterapkan di Desa Cokrokembang untuk melindungi petani sehingga tidak memperparah ketimpangan pendapatan yang terjadi saat ini.

Alternatif Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ini sebelumnya telah diteliti oleh Mastini, Susrusa, dan Budiasa (2023) mengenai “Efektivitas Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kabupaten Tabanan” dengan hasil 82% petani merasa puas terhadap program AUTP, persentase manfaat AUTP sebesar 105%, dan program AUTP telah mencapai tujuannya yakni melindungi

petani dari adanya risiko gagal panen yang diakibatkan oleh bencana alam, cuaca ekstrim dan organisme pengganggu tanaman (OPT).

5. Penegakan Hukum yang Adil Tanpa Pandang Bulu

Selain mengeluhkan tentang permasalahan pupuk, selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, petani padi khususnya di Dusun Kwangen dan beberapa petani di Dusun Cerbon mengeluhkan permasalahan air sungai yang tercemar limbah tambang PT Gemilang Limpah Internusa (PT GLI) yang beroperasi mulai tahun 2008 hingga saat ini. Lokasi pertambangan berada di Desa Kluwih, Kecamatan Tulakan, berbatasan langsung dengan Desa Cokrokembang di sisi baratnya dengan total luas area tambang 800 hektar. Logam yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan antara lain emas, tembaga, dan timah. Kegiatan ini merugikan masyarakat Desa Cokrokembang khususnya petani padi yang mengandalkan air sungai sebagai sumber pengairan sawahnya. Selain itu, masyarakat yang tinggal dekat dengan sungai khawatir untuk mengonsumsi air sumur sebagai air minum sehingga harus menambah pengeluaran untuk membeli air galon.

Tabel 4.30 Perbandingan Hasil Panen Padi Sebelum dan Sesudah Adanya Kegiatan Tambang

Rincian	Sebelum	Sesudah	Selisih
Luas Lahan	0	0	0
Jumlah Panen	1.000	700	300
Total Gabah Kering Giling	860	602	258
Total Beras yang Dihasilkan	537	376	161
Harga Jual	10.000	10.000	-
Penerimaan	5.372.420	3.760.694	1.611.726

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Data diatas merupakan data perbandingan hasil panen padi sebelum dan sesudah adanya kegiatan tambang. Data diatas mengabaikan biaya usahatani, hanya menghitung dari sisi penerimaan. Padahal faktanya, biaya usahatani akan meningkat dikarenakan perlu adanya perlakuan lebih terhadap lahan dan

tanaman padi karena adanya kegiatan penambangan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan berdampak terhadap kegiatan usahatani padi di Desa Cokrokembang. Dengan hanya melihat sisi penerimaan saja, sudah nampak bahwa terdapat selisih yang cukup tinggi antara sebelum adanya kegiatan penambangan dan setelah adanya kegiatan penambangan. Realitanya bahkan bisa lebih dari perhitungan diatas. Inilah mengapa permasalahan limbah tambang ini perlu segera diatasi agar kegiatan usahatani padi dapat tetap berlangsung.



Gambar 4. 8 Kondisi Jalan Rusak di Desa Cokrokembang

Bupati Kabupaten Pacitan melalui Keputusan Bupati Nomor : 188.45/25/408.21/2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan Bahan Galian Cu kepada PT Gemilang Limpah Internusa Dari Desa Kluwih Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan tertanggal 12 Januari 2009 telah memberikan kuasa kepada PT Gemilang Limpah Internusa untuk melakukan kegiatan pengangkutan bahan galian Cu atau tembaga dengan ketentuan bahwa PT Gemilang Limpah Internusa diwajibkan menghentikan kegiatan penambangan jika dalam pelaksanaannya menimbulkan bahaya atau kerusakan lingkungan hidup dan mengusahakan penanggulangannya. Namun demikian, yang dilakukan oleh PT Gemilang Limpah Internusa selama ini adalah memberikan ganti rugi kepada warga terdampak sebesar Rp 100.000,00 dan hanya dilakukan sebanyak 1 kali. Tentunya nominal ini tidak sebanding dengan

kerusakan lingkungan hidup dan kerugian yang ditanggung oleh warga utamanya petani padi.

Selain itu, Surat Keputusan Bupati nomor : 188.45/25/408.21/2009 ini juga mengatur mengenai tata cara/sistem pengangkutan, jumlah, dan tujuan pengangkutan yang mana PT Gemilang Limpah Internusa wajib memperhatikan jenis jalan yang dilewati, sesuai standar yang ditetapkan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan maksimal beban muatan adalah 8,2 Ton/Kandar. Namun demikian, yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan sehingga menyebabkan jalan di Desa Cokrokembang banyak yang mengalami kerusakan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya jembatan timbang untuk mengukur beban masing-masing angkutan yang melintas. Akses jalan yang rusak sangat mengganggu kegiatan warga, termasuk namun tidak terbatas juga berimbas kepada kegiatan usahatani padi di Desa Cokrokembang. Perlu peran dari berbagai lini birokrasi termasuk Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk melakukan sidak atau evaluasi lapangan secara rutin terhadap kegiatan yang dilakukan di lingkup Kabupaten Pacitan, sehingga Pemerintah Kabupaten Pacitan selaku yang memiliki kewenangan tertinggi di Kabupaten Pacitan juga mengevaluasi hasil laporan bulanan, triwulanan dan tahunan yang dilaporkan oleh PT Gemilang Limpah Internusa (GLI).

Pemerintah Kabupaten Pacitan juga telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dimana peraturan ini harus ditegakkan mengingat praktik pertambangan yang terjadi di Desa Kluwih telah mengabaikan Pasal III Asas dan Tujuan dimana salah satu asas dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara adalah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Mengacu pada Surat Keputusan Bupati dan Peraturan Daerah diatas, seharusnya Pemerintah Kabupaten Pacitan dapat menuntut penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu, sehingga

dapat terwujud pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan pada akhirnya petani padi dapat menikmati hasil usahanya lebih maksimal guna menopang program ketahanan pangan. Dengan demikian, ketimpangan pendapatan yang terjadi di kalangan petani padi diharapkan dapat membaik.

Fenomena yang terjadi di Desa Cokrokembang berkaitan dengan adanya dua sektor yang saling bertolak belakang ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Suritno, Purwanto, dan Jaani (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pola Hidup Petani Kelapa di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah”, dimana terjadi konflik antara petani dengan perusahaan yang dipicu oleh semburan lumpur yang mengalir ke lahan pertanian warga mengakibatkan hasil pertanian menyusut. Selain itu, Sarianto, Simbolon, dan Wiryawan (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Daerah Penangkapan Ikan di Perairan Kabupaten Halmahera Timur” mengemukakan bahwa pertambangan nikel memberikan pengaruh yang besar terhadap penurunan kualitas perairan dan penurunan ukuran ikan layak tangkap.

6. Sistem Resi Gudang

Sistem Resi Gudang (SRG) telah disahkan melalui Undang - Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang atau disebut juga *warehouse receipt* adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Resi gudang ini nantinya dapat digunakan sebagai jaminan atas kredit dari perbankan. Sementara itu, Sistem Resi Gudang (SRG) adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Secara lebih spesifik untuk sektor pertanian, SRG merupakan bukti kepemilikan atas barang yang disimpan oleh para petani di gudang (*Document of*

Title) yang dapat dialihkan, diperjualbelikan bahkan dijadikan agunan tanpa perlu persyaratan agunan lain (Ashari, 2012).

Sistem resi gudang akan membuka peluang bagi petani untuk:

- (1) Mendapatkan harga jual yang lebih baik dengan cara menyimpan komoditi di gudang terlebih dahulu saat panen raya kemudian menjualnya ketika harga tinggi
- (2) Mendapatkan kepastian mutu dan jumlah karena tes uji mutu dilakukan oleh LPK yang telah terakreditasi
- (3) Mendapatkan pinjaman dari bank untuk pembiayaan modal kerja pada musim tanam berikutnya dengan jaminan Resi Gudang tanpa agunan lainnya
- (4) Mempermudah jual beli komoditas secara langsung maupun melalui pasar lelang
- (5) Mendorong petani untuk berusaha secara berkelompok sehingga meningkatkan efisiensi biaya dan posisi tawar petani.

Disamping itu akses informasi atas harga yang terjadi di pasar yang sangat terbatas membuat petani menjadi pihak yang cenderung dirugikan atas tidak transparannya informasi pasar. Sistem Resi Gudang menjadi salah satu alternatif solusi yang efektif supaya petani di Desa Cokrokembang tidak harus menyimpan gabahnya sendiri dengan berbagai risiko yang mungkin muncul dan petani juga mendapatkan akses untuk pembiayaan usahatani. Dengan demikian, petani dapat mengembangkan usahatani dengan memanfaatkan pembiayaan yang ada sehingga pemberian nutrisi padi cukup dan tepat waktu. Harapannya, produktivitas padi meningkat dan ketimpangan pendapatan antar petani dapat menurun.

Alternatif diatas sebelumnya telah dibuktikan oleh Putri (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Pendapatan Usahatani Padi Dengan Menerapkan

Sistem Resi Gudang di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus” menyampaikan bahwa petani yang menerapkan SRG mendapatkan harga jual yang lebih baik dibandingkan dengan petani yang tidak menerapkan SRG, sehingga pendapatan petani SRG lebih tinggi dibandingkan dengan petani non SRG.

7. Melakukan Pola Rotasi Tanaman

Selama ini responden petani padi di Desa Cokrokembang hanya menanam tanaman padi sebagai komoditas satu-satunya yang diusahakan di lahan sawahnya. Untuk lahan persawahan di Dusun Kwangen dan sebagian Dusun Cerbon dengan kondisi saat ini dimana lahan sudah tercemar air limbah, maka tidak memungkinkan untuk ditanam tanaman lain selain padi. Berkali-kali petani telah melakukan percobaan untuk menanam tanaman selain padi, seperti jagung, kedelai, kacang panjang, dan lainnya namun hasil yang didapatkan jauh dari maksimal, sehingga yang dilakukan petani saat di luar musim tanam adalah memanfaatkan lahan sawahnya untuk produksi batu bata, sedangkan untuk mengembalikan kesuburan tanah petani membakar jerami di lahan sawahnya.

Selanjutnya, di Dusun Prancak dan Dusun Barak pada saat di luar musim tanam, maka lahan sawahnya dibiarkan menganggur dalam arti tidak ada rotasi tanaman. Dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan petani, maka lahan sawah yang tidak dimanfaatkan ini seharusnya dimanfaatkan untuk menanam komoditas lain, seperti mentimun, kacang panjang, jagung dan komoditas lain yang tidak mengganggu waktu musim tanam komoditas padi.

Suprihatin dan Amirullah (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pola Rotasi Tanaman Terhadap Perbaikan Sifat Tanah Sawah Irigasi” menyatakan bahwa penerapan rotasi tanaman padi-jagung pada 1-2 tahun pertama memberikan kadar N-total tanah, NO₃⁻ dan DOC yang sangat tinggi. Penanaman jagung di musim kemarau pada rotasi tanaman padi-jagung dapat

menyimpan air dan menekan pencucian hara, daripada penanaman padi-padi dalam jangka panjang. Selanjutnya, terhadap kegiatan membakar jerami yang diyakini akan menyuburkan tanah yang dilakukan oleh beberapa responden, Tommy, Mukhlis, dan Hidayat (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Karakteristik Biologi dan Kimia Tanah Sawah Akibat Pembakaran Jerami” menyatakan bahwa dalam jangka panjang, pembakaran jerami dapat menyebabkan rusaknya kualitas tanah baik dari segi fisika, kimia, maupun biologi. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan jerami sebagai kompos atau dibenam dalam keadaan segar untuk mengoptimalkan fungsi bahan organik jerami ke dalam sistem tanah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Responden petani padi di Desa Cokrokembang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan didominasi oleh petani berusia antara 56 sampai dengan 60 tahun yakni sebanyak 27%, jenis kelamin laki-laki sebanyak 97%, responden petani padi tidak mengenyam pendidikan sebanyak 38%, tidak memiliki tanggungan keluarga sebanyak 55%, luas lahan berkisar antara 0,06 sampai 0,10 hektar sebanyak 70%, kepemilikan lahan merupakan milik sendiri sebanyak 100%, dan modal usahatani berasal dari modal pribadi sebanyak 100%;
2. Keragaman sumber pendapatan petani antara lain berasal dari usahatani padi itu sendiri, usaha peternakan dan dari luar usahatani. Usaha peternakan antara lain mengusahakan rumput pakan ternak untuk dijual, dan menjual hewan ternak. Pendapatan di luar usahatani berasal dari pekerjaan sebagai tukang bangunan, pengrajin, dan buruh serabutan. Kontribusi pendapatan usahatani padi terhadap total pendapatan rumah tangga adalah sebesar 32,62% termasuk kategori kontribusi sedang.
3. Ketimpangan pendapatan antar responden petani padi di Desa Cokrokembang menurut analisis rasio gini sebesar 0,68, kurva lorenz melebar pada kelompok pendapatan bawah, dan jumlah dari 40 persen penduduk berpenghasilan rendah adalah sebanyak 6,482% dari total responden petani padi. Hal ini menunjukkan ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan responden petani padi di Desa Cokrokembang termasuk dalam kategori ketimpangan tinggi (*high inequality*).

5.2 Implikasi

Implikasi dalam penelitian ini mencakup pada dua hal, yaitu implikasi teoritis dan implikasi empiris. Implikasi teoritis berkaitan dengan pembelajaran mengapa dikembangkan dalam analisis temuan, sedangkan implikasi empiris berkaitan dengan kontribusi temuan terhadap data yang diperoleh.

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis hasil penelitian ini pada dasarnya menggunakan masalah kontekstual (*contextual problem*). Selain itu, analisis pendapatan dan rasio gini mendukung penelitian empiris maupun pernyataan teoritis dalam mengukur tingkat ketimpangan pendapatan petani padi di Desa Cokrokembang yang terjadi. Analisis rasio gini ini memiliki presisi kuat dalam mengidentifikasi tingkat ketimpangan pendapatan petani padi di Desa Cokrokembang, sehingga hasil yang diperoleh dapat menjadi tolak ukur valid dalam merekomendasikan kebijakan.

2. Implikasi Empiris

Implikasi empiris berkontribusi mendasar terhadap pengembangan lebih lanjut penelitian mendatang, dengan fokus kajian pertanian dan kemiskinan di Desa Cokrokembang karena model telah disusun, dibuat, dan menjadi referensi bernilai. Akan tetapi, daerah yang berbeda, gambaran partisipasi masyarakat yang berbeda akan memberikan hasil nilai rasio gini yang berbeda. Hasil penelitian menjadi usulan kepada para pemangku kebijakan berpikir praktis dalam mengelola paradigma berlaku terutama permasalahan ketimpangan pendapatan, permasalahan kemiskinan, dan permasalahan degradasi lahan pertanian, dapat direduksi dengan sikap manajerial pengelolaan lahan konservatif, tanpa mengabaikan kesejahteraan petani melalui keterlibatan

berbagai elemen berpikir rasional dari dampak yang ditimbulkan dalam jangka waktu yang panjang.

5.3 Saran

Untuk menjamin terwujudnya solusi terhadap ketimpangan pendapatan petani padi di Desa Cokrokembang, maka peneliti memberikan supaya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan, seperti mengenai program yang tepat untuk mengatasi ketimpangan, kemudian mengenai kemiskinan yang terjadi akibat dari ketimpangan tersebut untuk diidentifikasi lebih lanjut termasuk dalam kategori kemiskinan yang mana, terkait fragmentasi lahan petani, untuk selanjutnya dapat ditemukan suatu solusi konkrit yang relevan dengan kondisi yang terjadi pada petani padi di Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'laa, R.D dan Sutikno. 2018. *Pemodelan Faktor-faktor yang Memengaruhi Gini Rasio Pembangunan di Jawa Timur dengan Regresi Spasial*. Jurnal Sains dan Seni ITS Vol. 7 No. 2.
- AAK. 2003. *Teknik Bercocok Tanaman Padi*. Kanisius. Yogyakarta.
- Adisasmita, R. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi : Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 4.
- Afrinawati, Usman, M., dan Baihaqi, A. 2016. *Efektivitas Penyuluhan Pertanian Terhadap Pendapatan Usahatani Padi Sawah di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Pertanian Vol. 1 No. 1 (2016). Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh
- Aizawa, T., Dekle, R., dan Helble, M. 2017. *Sources of Income Inequality: A Comparison of Japan and The United States*. Asian Development Bank Institute. No. 663 February 2017.
- Arafah, M dan Khoirudin, R. 2022. *Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 5 No. 2, 2022, hal 628-636.
- Arsyad, L. 1997. *Ekonomi Mikro*. Penerbit BPFE. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Asih, D. N. 2008. *Dampak Kredit Terhadap Usaha Perikanan dan Ekonomi Rumah tangga Nelayan Tradisional di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah*. [Tesis]. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Asriyah, W. 2007. *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Tambak di Desa Babalan Demak*. Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Kebutuhan Pangan dan Non Pangan*. <https://www.bps.go.id>. www.bps.go.id diakses pada 28 Januari 2023 pukul 19.20 WIB
- _____. 2018. *Luas Panen dan Produksi Beras 2020*. Katalog BPS 5203026 diakses dari <http://www.bps.go.id> diakses pada tanggal 05 April 2023 pada pukul 20.00 WIB
- _____. 2021. *Rasio Gini Kabupaten Pacitan Tahun 2008 – 2021*. www.bps.go.id diakses pada 01 Januari 2023 pukul 08.30 WIB
- _____. 2022. *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)*. www.bps.go.id diakses pada 28 Januari 2023 pukul 19.00 WIB
- _____. 2022. *Jumlah Penduduk Miskin Indonesia*. www.bps.go.id diakses pada 07 Januari 2023 pukul 18.00 WIB

- _____. 2022. *Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2010 – 2021 Berdasarkan Harga Berlaku (2010)*. www.bps.go.id diakses pada 01 Januari 2023 pukul 07.30 WIB
- _____. 2022. *Rumus Menghitung Nilai Rasio Gini atau Indeks Gini*. www.bps.go.id diakses pada 01 Januari 2023 pukul 08.00 WIB
- Boediono, 2002. *Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.1 Edisi 2*. BPEE. Yogyakarta
- Case, K.E., Ray C. Fair ; alih bahasa, Benyamin Molan. 2002. *Prinsip-prinsip Ekonomi Mikro*. Penerbit Prehalindo. Jakarta
- Castillo, L.V., dan Castillo, R.G. 2020. *Economic Growth and Income Distribution in Peru*. <https://www.scielo.org.mx/pdf/prode/v52n205/0301-7036-prode-52-205-79-en.pdf> diakses pada 28 Januari 2023 pukul 18.20 WIB
- Dang, T.H., Nguyen, C.V., dan Phung, T.D. 2022. *Trends and Drivers of Inequality: Recent Evidence from Vietnam*. GLO Discussion Paper No. 1067
- Davis J.H and R.A. Golberg 1957. *A Concept of Agribusiness*. Harvard Business School. Research Division
- Febriaty, H dan Nurwani. 2017. *Pengaruh Gini Ratio, PDRB Perkapita dan Tingkat Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara*. QE Jurnal Vol. 6 No. 3
- Hahm, J.H., Lee, D.J., dan Park, C.Y. 2022. *Domestic and External Monetary Policy Shocks and Economic Inequality in the Republic of Korea*. ADB Economics Working Paper Series No. 654 April 2022
- Halim, A., dan Kusufi, M, S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.
- Hamid, A. 2014. *Multi-dimensional Income Inequality in Pakistan*. Int. J. Economics and Business Research Vol. 8 No. 1
- Hasan, I. 2001. *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferentif)*. Edisi kedua. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Harling, K. 1995. *Differing Perspectives on Agribusiness Management*. Agribusiness an International Journal. November/December 1995
- Hartati, Y.S. 2022. *Analisis Ketimpangan Ekonomi di Provinsi Papua*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 14 No. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura.
- Hernanto, F. 1996. *Ilmu Usahatani*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Heryanah. 2017. *Kesenjangan Pendapatan di Indonesia : Studi Empiris Berdasarkan Susenas 2008, 2011 dan 2013*. Jurnal BPPK Vol. 10 No. 2.

- Hiola AS dan Puspaningrum D. 2019. *Pengetahuan, Sikap Dan Praktek Konservasi Lahan Pada Agroforestry Ilengi*. Gorontalo Journal of Forestry Research, 2(1), 40-53.
- INPRES No. 5 Tahun 2015. 2015. *Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah* [JDIH BPK RI]. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/77363/inpres-no-5-tahun-2015> diakses pada 20 Mei 2023 pukul 23.12 WIB
- Kalalo,T. 2016. *Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(1)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2023. *Pendapatan*. <https://kbbi.web.id/pendapatan> diakses pada 23 Januari 2023 pukul 23.12 WIB
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2021. *FAO: Pertanian Indonesia Luar Biasa*. <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4796> diakses pada 18 Januari 2023 pukul 09.26 WIB.
- Koib, Y., dan Simamora, L. 2022. *Persepsi Petani Tentang Pentingnya Koperasi Pertanian*. JAMBURA Agribusiness Journal Vol. 3 Issue 2 January 2022. Agribusiness Department. Agriculture Faculty State University of Gorontalo.
- Krishnamurti, B. 2020. *Seri Memahami Agribisnis: Pengertian Agribisnis*. Penerbit Puspa Swara bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Departemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Kuznets, S. 1995. *"Economic Growth and Income Inequality"*. American Economic Review.
- Latif, A., Ilsan, M., dan Rosada, I. 2022. *Hubungan Peran Penyuluh Pertanian Terhadap Produktivitas Petani Padi (Studi Kasus Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru)*. WIRATANI : Jurnal Ilmiah Agribisnis Vol 5 (I) 2022.
- Linggar. 2011. *Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000 – 2007*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang
- Liu, J., Huo, C., dan Chen, L. 2022. *A Study of Household Income Inequality in China: Perspective of Educational Homogeneity Marriage*. Economic Research-Ekonomska Istraživanja
- Lumintang, F. M. 2013. *Analisa Pendapatan Petani Padi di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur*. Jurnal EMBA, 991-998
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Pustaka Setia. Bandung
- Mastini, Susrusa, dan Budiasa. 2023. *Efektivitas Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kabupaten Tabanan*. Jurnal Manajemen Agribisnis. Vol 11 No. 1 Mei 2023

- Maulana, M.A dan Julia, A. 2022. *Pengaruh Indeks Pendidikan, Gini Rasio, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan di Enam Provinsi Indonesia Tahun 2015-2019*. Bandung Conference Series. Economics Studies. Bandung
- Media Indonesia. 2019. *Pertanian Meredam Krisis*. <https://mediaindonesia.com/opini/277502/pertanian-meredam-krisis> diakses pada 18 Januari 2023 pukul 09.36 WIB
- Mokalu, T.M., Nayoan, H., dan Sampe, S. 2021. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur)*. Jurnal Governance Vol. 1 No. 2
- Mubyarto. 1997. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3ES. Jakarta
- Mulyani, S. 2017. *Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat Petani Kabupaten Gowa*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Munandar, Y., Karlina, R., Moechtar, A., Kasim, J., dan Adhi, C. 2021. *Penurunan Rasio Gini Provinsi Jawa Timur pada Masa Pandemi COVID-19 Sebagai Hasil dari Penerapan Program Bantuan Pangan Non Tunai*. Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan Vol. 1 No. 1.
- Narimawati, U., Anggadini, S.D., dan Ismawati, L. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM*. Penerbit Genesis. Bekasi
- Nina, G.A., dan Rustariyuni, S.D. 2020. *Determinan Kemiskinan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vo. 9 No. 1. Universitas Lampung. Lampung
- Niyimbanira, F. 2017. *Analysis of the Impact of Economic Growth on Income Inequality and Poverty in South Africa: The Case of Mpumalanga Province*. International Journal of Economics and Financial Issues Vol 7. No. 4
- Novianti. D. 2018. *Kondisi Sosek Keluarga Petani Penggarap Desa Rawi Panengahan Lampung Selatan Tahun 2016*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Lampung. Lampung.
- Nuryulianingdyah, W. 2022. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia*. Ekonomi dan Bisnis: Berkala Publikasi, Gagasan Konseptual, Hasil Penelitian, Kajian, dan Terapan Teori. Vol. 26 No. 01
- Priyatno, D. 2016. *Belajar Alat Analisis Data dan Cara Pengolahannya dengan SPSS*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
- Purba, B. 2021. *Ekonomi Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis. Medan
- Purwanto, A., dan Budi, M. T. 2018. *Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pekerja K3L Universitas*

- Padjajaran. Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, No. 2, dalam <https://jurnal.unpad.ac.id>, diakses 01 Mei 2023
- Purwono, L. dan Purnamawati. 2007. *Budidaya Tanaman Pangan*. Penerbit Agromedia. Jakarta.
- Putong, I. 2010. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Putri, M. I. 2016. *Pendapatan Usahatani Padi Dengan Menerapkan Sistem Resi Gudang di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus*. Skripsi. Program Studi Agribisnis. Universitas Lampung
- Rahim, A dan Hastuti, R.R.D.W. 2007. *Ekonomika Pertanian, Pengantar Teori dan Kasus*. Penebar Swadaya. Jakarta
- Rahmawati, S. 2006. *Status Perkembangan Perbaikan Sifat Genetik Padi Menggunakan Transformasi Argobacterium*. *Jurnal Agrobiogen*. 2 (1): 36 – 44.
- Ramlayana, Ansyari, dan Sudarmi. 2020. *Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index> diakses pada 28 Mei 2023 pukul 01.45 WIB
- Rusdiah. 2008. *Pengaruh Modal Kerja, Luas Lahan, dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usahatani Nanas (Studi Kasus : Desa Purba Tua Baru Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun)*. Skripsi Fakultas Petanian USU Medan
- Samsudin, H., Sadiman dan Pachrozi, I, 2019. *Kajian Sosial Menuju Kemiskinan Satu Digit*. Penerbit Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin. Provinsi Sumatera Selatan. <https://www.bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id> diakses pada 28 Januari 2023 pukul 12.30 WIB.
- Santoso, R., dan Handayani, A. 2019. *Manajemen Keuangan: Keputusan Keuangan Jangka Panjang*. UMG Press. Gresik
- Santoso, T. B dan Triandaru, S. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat. Jakarta
- Saputri, W.A.K dan Suryowati, K. 2018. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gini Ratio di Provinsi Papua dengan Model Spasial Data Panel*. *Jurnal Statistika Industri dan Komputasi* Vol. 3 No. 2
- Sarianto, Simbolon, dan Wiryawan. 2016. *Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Daerah Penangkapan Ikan di Perairan Kabupaten Halmahera Timur*. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*. Vol. 21 No. 2.
- Savoia, F. 2020. *Income Inequality Convergence Across EU Regions*. LIS Working Paper Series No. 760
- Sinulingga, B.A., Fauzia, L., dan Khadijah, S. 2013. *Dampak Bantuan Pupuk, Benih, dan Pestisida PT Perkebunan Nusantara III Terhadap Tingkat*

Pendapatan Petani Padi. Journal on Social Economic of Agriculture and Agribusiness

Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta

Soekartawi. 1987. *Prinsip Dasar Ekonomi Petanian Teori dan Aplikasinya*. Penerbit CV. Rajawali. Jakarta

_____. 2003. *Teori Ekonomi Produksi dengan Pokok Bahasan Analisis Cobb-Douglas*. PT Raja Grafindo Persada. 250 hal. Jakarta.

Soetrisno, et al. 2006. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Penerbit Bayu Media. Jember

Sudswong, W., Pangprasopchoka, A., dan Amornbunchornvej, C. 2021. *Occupational Income Inequality of Thailand: A Case Study of Explanatory Data Analysis Beyond Gini Coefficient*. <https://ideas.repec.org/p/arx/papers/2111.06224.html> diakses pada 29 Januari 2023 pukul 23.10 WIB

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. CV Alfabeta. Bandung

_____. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. CV Alfabeta. Bandung

Suharto, E. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*. PT Refika Aditama. Bandung

Sukirno, S. 2000. *Makro Ekonomika Modern*. PT. Rasa Grafindo Persada. Jakarta.

_____. 2015. *Makroekonomi Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Sunesson, D. 2022. *The Impact of COVID-19 on Income Inequality in Sweden: Empirical Evidence Using Municipality Data*. Linnæus University

Suparyono. 1997. *Padi*. Penebar Swadaya. Jakarta

Suprihatin, A., dan Amirullah, J. 2016. *Pengaruh Pola Rotasi Tanaman Terhadap Perbaikan Sifat Tanah Sawah Irigasi*. Indonesian Center for Agriculture Land Resource Development. Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian, Kementerian Pertanian. Jakarta

Suritno, Purwanto, dan Jaani. 2022. *Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pola Hidup Petani Kelapa di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah*. Jurnal Ilmiah Society Vol. 2 No. 1 Tahun 2022

Susilo, E. 2013. *Peran Koperasi Agribisnis Dalam Ketahanan Pangan di Indonesia*. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis Vol 10 No. 1 (2013). FEB UNISNU Jepara.

- Syahri dan R.U. Somantri. 2016. *Penggunaan Varietas Unggul Tahan Hama dan Penyakit Mendukung Peningkatan Produksi Padi Nasional*. Jurnal Litbang Pertanian. 35 (1): 25-36.
- Tambunan, T. 2006. *Iklim Investasi Di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi*. Kadin-Indonesia – Jetro. Jakarta
- Todaro, M. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 2000, hlm. 44.
- Tommy, A., Mukhlis., dan Hidayat, B. 2014. *Karakteristik Biologi dan Kimia Tanah Sawah Akibat Pembakaran Jerami*. Jurnal Online Agroekoteknologi. ISSN No. 2337 – 6597 Vol. 2 No. 2 : 851 – 864, Maret 2014.
- Widiasari, H., Zakiah., dan Sofyan. 2019. *Analisis Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian Vol. 4 No. 4
- World Bank. 2015. *Ketimpangan yang Semakin Lebar – Ringkasan Eksekutif*. Bank Dunia, Washington DC, USA.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Umum Responden

No	Nama	Alamat	Jenis Kelamin	Usia	Agama	Pendidikan	Status Pernikahan
1	Jaswadi	Prancak	L	56	Islam	SMA	Menikah
2	Sunaryo	Prancak	L	50	Islam	SMA	Menikah
3	Sogiyem	Prancak	P	75	Islam	TS	Janda
4	Sudjono	Prancak	L	70	Islam	SD	Menikah
5	Sarginen	Prancak	L	65	Islam	SD	Duda
6	Wahyudiono	Prancak	L	48	Islam	SMA	Menikah
7	Sujarno	Prancak	L	63	Islam	SMP	Menikah
8	Boiran	Prancak	L	80	Islam	SD	Duda
9	Marsandi	Prancak	L	70	Islam	SD	Menikah
10	Bonijo	Prancak	L	70	Islam	SD	Menikah
11	Sarjono	Prancak	L	62	Islam	SD	Menikah
12	Purnomo	Prancak	L	61	Islam	SMA	Menikah
13	Boiman	Prancak	L	53	Islam	SD	Menikah
14	Jemawan	Prancak	L	55	Islam	SD	Menikah
15	Katwanto	Prancak	L	55	Islam	SMA	Menikah
16	Saryono	Barak	L	62	Islam	SD	Menikah
17	Ismoyo	Barak	L	39	Islam	SMA	Menikah
18	Tulus	Barak	L	48	Islam	SMP	Menikah
19	M. Yusuf	Prancak	L	60	Islam	SD	Menikah
20	Priyodianto	Prancak	L	62	Islam	SD	Menikah
21	Sujatno	Barak	L	65	Islam	TS	Menikah
22	Amanudin	Barak	L	47	Islam	SMA	Menikah
23	Anom Suroto	Barak	L	39	Islam	SMA	Menikah
24	Jojon	Prancak	L	60	Islam	SD	Menikah
25	Suparman	Prancak	L	60	Islam	SD	Menikah
26	Jamari	Prancak	L	65	Islam	SD	Menikah
27	Kadinem	Prancak	P	65	Islam	SD	Ceraai meninggal
28	Bibit Waluyo	Prancak	L	65	Islam	SMA	Menikah
29	Gunoto	Prancak	L	49	Islam	SMA	Menikah
30	Sugiyanto	Prancak	L	47	Islam	SMA	Menikah
31	Tuwari	Barak	L	58	Islam	SD	Menikah
32	Monandi	Barak	L	40	Islam	SMA	Menikah
33	Mulyono	Barak	L	62	Islam	SD	Menikah
34	Toimun	Barak	L	60	Islam	SD	Menikah
35	Suwarni	Barak	L	50	Islam	SD	Menikah
36	Katirun	Barak	L	62	Islam	SD	Menikah
37	Suwarto	Barak	L	48	Islam	SD	Menikah

38	Sukardi	Barak	L	61	Islam	SD	Menikah
39	Isnanto	Barak	L	51	Islam	SMA	Menikah
40	Suryani	Barak	L	48	Islam	SMP	Menikah
41	Supriyadi	Barak	L	47	Islam	SMA	Menikah
42	Agus	Barak	L	40	Islam	SMA	Menikah
43	Pamuji	Barak	L	60	Islam	TS	Menikah
44	Suharwanto	Barak	L	47	Islam	SMA	Menikah
45	Jemari	Barak	L	61	Islam	TS	Menikah
46	Isbat	Barak	L	48	Islam	SMP	Menikah
47	Sringatin	Barak	L	47	Islam	SD	Cerai meninggal
48	Jamali	Barak	L	45	Islam	SD	Menikah
49	Supri	Barak	L	48	Islam	SMP	Menikah
50	Katono	Cerbon	L	59	Islam	TS	Menikah
51	Kaderi	Cerbon	L	55	Islam	TS	Menikah
52	Jamil	Cerbon	L	51	Islam	SMA	Menikah
53	Sudarno	Cerbon	L	65	Islam	TS	Menikah
54	Sumartono	Cerbon	L	55	Islam	TS	Menikah
55	Kholik	Cerbon	L	40	Islam	SMA	Menikah
56	Mulyono	Cerbon	L	47	Islam	SMA	Menikah
57	Jaeri	Cerbon	L	45	Islam	SMA	Menikah
58	Harno	Cerbon	L	60	Islam	TS	Menikah
59	Abidin	Cerbon	L	40	Islam	SMP	Menikah
60	Tumarno	Cerbon	L	49	Islam	SMA	Menikah
61	Wasito	Cerbon	L	54	Islam	TS	Menikah
62	Santo	Cerbon	L	51	Islam	TS	Menikah
63	Hassim	Cerbon	L	50	Islam	TS	Menikah
64	Giman	Cerbon	L	65	Islam	TS	Menikah
65	Sayekti	Cerbon	L	55	Islam	SD	Menikah
66	Marto	Cerbon	L	49	Islam	TS	Menikah
67	Kalam	Cerbon	L	55	Islam	TS	Menikah
68	Subirin	Cerbon	L	45	Islam	TS	Menikah
69	Tularno	Cerbon	L	51	Islam	TS	Menikah
70	Tukijan	Cerbon	L	60	Islam	TS	Menikah
71	Sugiyanto	Cerbon	L	52	Islam	TS	Menikah
72	Jemani	Cerbon	L	58	Islam	TS	Menikah
73	Marsito	Cerbon	L	57	Islam	TS	Menikah
74	Wahyudi	Cerbon	L	41	Islam	SMA	Menikah
75	Juni	Kwangen	L	60	Islam	TS	Menikah
76	Wahyu	Kwangen	L	39	Islam	SMA	Menikah
77	Bonasir	Kwangen	L	59	Islam	TS	Menikah
78	Suseno	Kwangen	L	59	Islam	TS	Menikah
79	Marsudi	Kwangen	L	59	Islam	TS	Menikah
80	Wasikun	Kwangen	L	61	Islam	TS	Menikah

81	Mesran	Kwangen	L	60	Islam	TS	Menikah
82	Misradi	Kwangen	L	61	Islam	TS	Menikah
83	Boeran	Kwangen	L	58	Islam	TS	Menikah
84	Tumijo	Kwangen	L	65	Islam	TS	Menikah
85	Sugito	Kwangen	L	53	Islam	SD	Menikah
86	Eko	Kwangen	L	40	Islam	SMA	Menikah
87	Sidik	Kwangen	L	59	Islam	TS	Menikah
88	Suryadi	Kwangen	L	41	Islam	SMA	Menikah
89	Budiarto	Kwangen	L	60	Islam	TS	Menikah
90	Gianto	Kwangen	L	59	Islam	TS	Menikah
91	Marjikin	Kwangen	L	54	Islam	TS	Menikah
92	Boiman	Kwangen	L	56	Islam	TS	Menikah
93	Darmaji	Kwangen	L	44	Islam	TS	Menikah
94	Boimin	Kwangen	L	58	Islam	TS	Menikah
95	Miswanto	Kwangen	L	58	Islam	TS	Menikah
96	Suharno	Kwangen	L	56	Islam	TS	Menikah
97	Sutrisno	Kwangen	L	57	Islam	TS	Menikah
98	Karnen	Kwangen	L	55	Islam	SD	Menikah
99	Sarti	Kwangen	P	60	Islam	TS	Cerai meninggal
100	Hariyono	Kwangen	L	52	Islam	SMA	Menikah

Keterangan : TS = Tidak Sekolah

Lampiran 2. Luas Lahan Usahatani Padi, Lama Berusahatani, Kepemilikan Lahan, Awal Kepemilikan Lahan, dan Sumber Modal Responden Petani Padi

No.	Nama	Luas Area Usahatani (Ha)	Lama Berusahatani (Tahun)	Kepemilikan Lahan	Awal Kepemilikan Lahan	Sumber Modal
1	Jaswadi	0,07	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
2	Sunaryo	0,12	20	Pribadi	Warisan	Pribadi
3	Sogiyem	0,07	40	Pribadi	Warisan	Pribadi
4	Sudjono	0,13	40	Pribadi	Warisan	Pribadi
5	Sarginen	0,09	40	Pribadi	Warisan	Pribadi
6	Wahyudiono	0,13	20	Pribadi	Warisan	Pribadi
7	Sujarno	0,12	45	Pribadi	Warisan	Pribadi
8	Boiran	0,12	40	Pribadi	Warisan	Pribadi
9	Marsandi	0,12	50	Pribadi	Warisan	Pribadi
10	Bonijo	0,12	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
11	Sarjono	0,13	45	Pribadi	Warisan	Pribadi
12	Purnomo	0,07	40	Pribadi	Warisan	Pribadi
13	Boiman	0,07	40	Pribadi	Warisan	Pribadi
14	Jemawan	0,07	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
15	Katwanto	0,13	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
16	Saryono	0,12	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
17	Ismoyo	0,07	10	Pribadi	Warisan	Pribadi
18	Tulus	0,07	20	Pribadi	Warisan	Pribadi
19	M. Yusuf	0,13	25	Pribadi	Warisan	Pribadi
20	Priyodianto	0,07	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
21	Sujatno	0,07	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
22	Amanudin	0,07	20	Pribadi	Warisan	Pribadi
23	Anom Suroto	0,07	10	Pribadi	Warisan	Pribadi
24	Jojon	0,13	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
25	Suparman	0,13	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
26	Jamari	0,13	40	Pribadi	Warisan	Pribadi
27	Kadinem	0,13	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
28	Bibit Waluyo	0,12	20	Pribadi	Warisan	Pribadi
29	Gunoto	0,13	20	Pribadi	Warisan	Pribadi
30	Sugiyanto	0,07	10	Pribadi	Warisan	Pribadi
31	Tuwari	0,07	25	Pribadi	Warisan	Pribadi
32	Monandi	0,07	10	Pribadi	Warisan	Pribadi
33	Mulyono	0,07	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
34	Toimun	0,07	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
35	Suwarni	0,07	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
36	Katirun	0,07	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
37	Suwarto	0,13	20	Pribadi	Warisan	Pribadi

38	Sukardi	0,07	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
39	Isnanto	0,07	20	Pribadi	Warisan	Pribadi
40	Suryani	0,07	15	Pribadi	Warisan	Pribadi
41	Supriyadi	0,1	15	Pribadi	Warisan	Pribadi
42	Agus	0,07	15	Pribadi	Warisan	Pribadi
43	Pamuji	0,07	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
44	Suharwanto	0,11	20	Pribadi	Warisan	Pribadi
45	Jemari	0,07	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
46	Isbat	0,07	20	Pribadi	Warisan	Pribadi
47	Sringatin	0,09	20	Pribadi	Warisan	Pribadi
48	Jamali	0,07	20	Pribadi	Warisan	Pribadi
49	Supri	0,07	20	Pribadi	Warisan	Pribadi
50	Katono	0,07	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
51	Kaderi	0,07	25	Pribadi	Warisan	Pribadi
52	Jamil	0,07	25	Pribadi	Warisan	Pribadi
53	Sudarno	0,09	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
54	Sumartono	0,07	25	Pribadi	Warisan	Pribadi
55	Kholik	0,07	15	Pribadi	Warisan	Pribadi
56	Mulyono	0,12	20	Pribadi	Warisan	Pribadi
57	Jaeri	0,07	20	Pribadi	Warisan	Pribadi
58	Harno	0,07	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
59	Abidin	0,07	15	Pribadi	Warisan	Pribadi
60	Tumarno	0,07	20	Pribadi	Warisan	Pribadi
61	Wasito	0,07	25	Pribadi	Warisan	Pribadi
62	Santo	0,07	25	Pribadi	Warisan	Pribadi
63	Hassim	0,07	20	Pribadi	Warisan	Pribadi
64	Giman	0,07	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
65	Sayekti	0,07	25	Pribadi	Warisan	Pribadi
66	Marto	0,07	20	Pribadi	Warisan	Pribadi
67	Kalam	0,13	25	Pribadi	Warisan	Pribadi
68	Subirin	0,07	15	Pribadi	Warisan	Pribadi
69	Tularno	0,07	20	Pribadi	Warisan	Pribadi
70	Tukijan	0,07	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
71	Sugiyanto	0,07	25	Pribadi	Warisan	Pribadi
72	Jemani	0,12	25	Pribadi	Warisan	Pribadi
73	Marsito	0,07	20	Pribadi	Warisan	Pribadi
74	Wahyudi	0,07	10	Pribadi	Warisan	Pribadi
75	Juni	0,08	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
76	Wahyu	0,07	10	Pribadi	Warisan	Pribadi
77	Bonasir	0,07	20	Pribadi	Warisan	Pribadi
78	Suseno	0,1	20	Pribadi	Warisan	Pribadi
79	Marsudi	0,09	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
80	Wasikun	0,13	30	Pribadi	Warisan	Pribadi

81	Mesran	0,07	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
82	Misradi	0,07	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
83	Boeran	0,08	20	Pribadi	Warisan	Pribadi
84	Tumijo	0,07	45	Pribadi	Warisan	Pribadi
85	Sugito	0,13	20	Pribadi	Warisan	Pribadi
86	Eko	0,07	10	Pribadi	Warisan	Pribadi
87	Sidik	0,07	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
88	Suryadi	0,09	10	Pribadi	Warisan	Pribadi
89	Budiarto	0,07	25	Pribadi	Warisan	Pribadi
90	Gianto	0,07	35	Pribadi	Warisan	Pribadi
91	Marjikin	0,11	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
92	Boiman	0,07	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
93	Darmaji	0,07	20	Pribadi	Warisan	Pribadi
94	Boimin	0,12	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
95	Miswanto	0,07	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
96	Suharno	0,07	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
97	Sutrisno	0,07	35	Pribadi	Warisan	Pribadi
98	Karnen	0,11	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
99	Sarti	0,07	30	Pribadi	Warisan	Pribadi
100	Hariyono	0,12	18	Pribadi	Warisan	Pribadi
	Jumlah	8,69	2573			
	Rata-rata	0,0869	25,73			

Lampiran 3. Penerimaan Responden dari Usahatani Padi

No Sampel	Nama	Produksi Padi (Kg)								Total Penerimaan
		Musim Kemarau	Musim Hujan	Total Produksi (Kg)	Total Gabah Kering Giling (Kg)	Total Beras	Total Konsumsi Rumah Tangga (Kg)	Total yang Dijual	Harga Jual Kg (Rp)	
1	Jaswadi	1.400	500	1.900	1.634	1.025	288	737	9.700	7.150.565
2	Sunaryo	2.400	857	3.257	2.801	1.757	288	1.469	9.900	14.547.427
3	Sogiyem	1.400	500	1.900	1.634	1.025	288	737	9.900	7.297.999
4	Sudjono	2.600	929	3.529	3.035	1.904	288	1.616	9.800	15.835.723
5	Sarginen	1.800	643	2.443	2.101	1.318	144	1.174	10.000	11.740.778
6	Wahyudiono	2.600	929	3.529	3.035	1.904	576	1.328	9.700	12.880.534
7	Sujarno	2.400	857	3.257	2.801	1.757	432	1.325	9.900	13.121.827
8	Boiran	2.400	857	3.257	2.801	1.757	96	1.661	9.900	16.448.227
9	Marsandi	2.400	857	3.257	2.801	1.757	288	1.469	9.700	14.253.539
10	Bonijo	2.400	857	3.257	2.801	1.757	288	1.469	9.700	14.253.539
11	Sarjono	2.600	929	3.529	3.035	1.904	288	1.616	9.900	15.997.312
12	Purnomo	1.400	500	1.900	1.634	1.025	432	593	9.900	5.872.399
13	Boiman	1.400	500	1.900	1.634	1.025	288	737	9.800	7.224.282
14	Jemawan	1.400	500	1.900	1.634	1.025	288	737	9.800	7.224.282
15	Katwanto	2.600	929	3.529	3.035	1.904	288	1.616	9.800	15.835.723
16	Saryono	2.400	857	3.257	2.801	1.757	432	1.325	9.800	12.989.283
17	Ismoyo	1.400	500	1.900	1.634	1.025	432	593	9.800	5.813.082
18	Tulus	1.400	500	1.900	1.634	1.025	288	737	10.000	7.371.716
19	M. Yusuf	2.600	929	3.529	3.035	1.904	288	1.616	10.000	16.158.901

20	Priyodianto	1.400	500	1.900	1.634	1.025	288	737	9.800	7.224.282
21	Sujatno	1.400	500	1.900	1.634	1.025	288	737	9.900	7.297.999
22	Amanudin	1.400	500	1.900	1.634	1.025	432	593	9.700	5.753.765
23	Anom Suroto	1.400	500	1.900	1.634	1.025	432	593	9.700	5.753.765
24	Jojon	2.600	929	3.529	3.035	1.904	432	1.472	9.800	14.424.523
25	Suparman	2.600	929	3.529	3.035	1.904	432	1.472	9.800	14.424.523
26	Jamari	2.600	929	3.529	3.035	1.904	288	1.616	9.700	15.674.134
27	Kadinem	2.600	929	3.529	3.035	1.904	144	1.760	9.900	17.422.912
28	Bibit Waluyo	2.400	857	3.257	2.801	1.757	288	1.469	9.700	14.253.539
29	Gunoto	2.600	929	3.529	3.035	1.904	432	1.472	9.900	14.571.712
30	Sugiyanto	1.400	500	1.900	1.634	1.025	576	449	9.800	4.401.882
31	Tuwari	1.400	500	1.900	1.634	1.025	576	449	9.900	4.446.799
32	Monandi	1.400	500	1.900	1.634	1.025	432	593	9.900	5.872.399
33	Mulyono	1.400	500	1.900	1.634	1.025	288	737	9.700	7.150.565
34	Toimun	1.400	500	1.900	1.634	1.025	432	593	9.800	5.813.082
35	Suwarni	1.400	500	1.900	1.634	1.025	432	593	9.700	5.753.765
36	Katirun	1.400	500	1.900	1.634	1.025	432	593	9.700	5.753.765
37	Suwarto	2.600	929	3.529	3.035	1.904	288	1.616	9.700	15.674.134
38	Sukardi	1.400	500	1.900	1.634	1.025	432	593	9.900	5.872.399
39	Isnanto	1.400	500	1.900	1.634	1.025	576	449	10.000	4.491.716
40	Suryani	1.400	500	1.900	1.634	1.025	432	593	9.700	5.753.765
41	Supriyadi	2.000	714	2.714	2.334	1.465	432	1.033	9.700	10.015.549
42	Agus	1.400	500	1.900	1.634	1.025	288	737	9.900	7.297.999
43	Pamuji	1.400	500	1.900	1.634	1.025	288	737	9.700	7.150.565
44	Suharwanto	2.200	786	2.986	2.568	1.611	432	1.179	9.800	11.554.043

45	Jemari	1.400	500	1.900	1.634	1.025	288	737	9.800	7.224.282
46	Isbat	1.400	500	1.900	1.634	1.025	576	449	9.700	4.356.965
47	Sringatin	1.800	643	2.443	2.101	1.318	288	1.030	9.800	10.094.762
48	Jamali	1.400	500	1.900	1.634	1.025	288	737	9.700	7.150.565
49	Supri	1.400	500	1.900	1.634	1.025	432	593	9.800	5.813.082
50	Katono	1.400	500	1.900	1.634	1.025	288	737	9.800	7.224.282
51	Kaderi	1.400	500	1.900	1.634	1.025	432	593	9.900	5.872.399
52	Jamil	1.400	500	1.900	1.634	1.025	576	449	9.700	4.356.965
53	Sudarno	1.800	643	2.443	2.101	1.318	432	886	9.700	8.594.954
54	Sumartono	1.400	500	1.900	1.634	1.025	288	737	10.000	7.371.716
55	Kholik	1.400	500	1.900	1.634	1.025	432	593	9.900	5.872.399
56	Mulyono	2.400	857	3.257	2.801	1.757	432	1.325	9.800	12.989.283
57	Jaeri	1.400	500	1.900	1.634	1.025	576	449	9.800	4.401.882
58	Harno	1.400	500	1.900	1.634	1.025	288	737	9.900	7.297.999
59	Abidin	1.400	500	1.900	1.634	1.025	432	593	9.800	5.813.082
60	Tumarno	1.400	500	1.900	1.634	1.025	432	593	9.800	5.813.082
61	Wasito	1.400	500	1.900	1.634	1.025	288	737	9.800	7.224.282
62	Santo	1.400	500	1.900	1.634	1.025	288	737	9.900	7.297.999
63	Hassim	1.400	500	1.900	1.634	1.025	432	593	9.700	5.753.765
64	Giman	1.400	500	1.900	1.634	1.025	288	737	9.800	7.224.282
65	Sayekti	1.400	500	1.900	1.634	1.025	432	593	9.700	5.753.765
66	Marto	1.400	500	1.900	1.634	1.025	432	593	9.900	5.872.399
67	Kalam	2.600	929	3.529	3.035	1.904	288	1.616	9.700	15.674.134
68	Subirin	1.400	500	1.900	1.634	1.025	576	449	9.800	4.401.882
69	Tularno	1.400	500	1.900	1.634	1.025	288	737	9.700	7.150.565

70	Tukijan	1.400	500	1.900	1.634	1.025	288	737	9.700	7.150.565
71	Sugiyanto	1.400	500	1.900	1.634	1.025	576	449	9.900	4.446.799
72	Jemani	2.400	857	3.257	2.801	1.757	288	1.469	9.700	14.253.539
73	Marsito	1.400	500	1.900	1.634	1.025	432	593	9.700	5.753.765
74	Wahyudi	1.100	500	1.600	1.376	863	432	431	9.700	4.183.633
75	Juni	1.257	514	1.771	1.523	956	288	668	10.000	6.677.991
76	Wahyu	1.100	450	1.550	1.333	836	432	404	9.900	4.002.810
77	Bonasir	1.100	450	1.550	1.333	836	288	548	9.900	5.428.410
78	Suseno	1.571	643	2.214	1.904	1.195	576	619	9.800	6.063.739
79	Marsudi	1.414	579	1.993	1.714	1.075	432	643	9.700	6.239.758
80	Wasikun	2.043	836	2.879	2.476	1.553	192	1.361	9.800	13.339.500
81	Mesran	1.100	450	1.550	1.333	836	288	548	10.000	5.483.242
82	Misradi	1.100	450	1.550	1.333	836	288	548	10.000	5.483.242
83	Boeran	1.257	514	1.771	1.523	956	288	668	9.800	6.544.431
84	Tumijo	1.100	450	1.550	1.333	836	288	548	9.900	5.428.410
85	Sugito	2.043	836	2.879	2.476	1.553	432	1.121	9.900	11.099.618
86	Eko	1.100	450	1.550	1.333	836	432	404	10.000	4.043.242
87	Sidik	1.100	450	1.550	1.333	836	432	404	10.000	4.043.242
88	Suryadi	1.414	579	1.993	1.714	1.075	576	499	10.000	4.992.740
89	Budiarto	1.100	450	1.550	1.333	836	288	548	9.900	5.428.410
90	Gianto	1.100	450	1.550	1.333	836	288	548	9.900	5.428.410
91	Marjikin	1.729	707	2.436	2.095	1.314	288	1.026	9.800	10.056.993
92	Boiman	1.100	450	1.550	1.333	836	288	548	9.900	5.428.410
93	Darmaji	1.100	450	1.550	1.333	836	288	548	9.800	5.373.577
94	Boimin	1.886	771	2.657	2.285	1.434	288	1.146	9.800	11.227.847

95	Miswanto	1.100	450	1.550	1.333	836	432	404	9.800	3.962.377
96	Suharno	1.100	450	1.550	1.333	836	288	548	9.800	5.373.577
97	Sutrisno	1.100	450	1.550	1.333	836	192	644	9.900	6.378.810
98	Karnen	1.729	707	2.436	2.095	1.314	288	1.026	9.700	9.954.370
99	Sarti	1.100	450	1.550	1.333	836	192	644	9.800	6.314.377
100	Hariyono	1.886	771	2.657	2.285	1.434	384	1.050	9.700	10.182.077
	Jumlah	164.029	60.497	224.526	193.093	121.128	36.336	84.808	981.900	832.189.385
	Rata-rata	1.640,29	604,97	2.245,26	1.930,93	1.211,28	363,36	848,08	9.819	8.321.893,85

Lampiran 4. Pendapatan Responden dari Usaha Peternakan

No	Nama	Pekerjaan	Penerimaan Usaha Peternakan	Modal	Pendapatan
1	Sujarno	Peternak	6.000.000	1.200.000	4.800.000
2	Toimun	Penjual Rumput	12.000.000	1.200.000	10.800.000
3	Jemari	Penjual Rumput	8.400.000	0	8.400.000
4	Jamil	Pedagang Hewan Ternak	18.000.000	3000000	15.000.000
Jumlah			44.400.000	5.400.000	39.000.000
Rata-rata			11.100.000	1.350.000	9.750.000

Lampiran 5. Pendapatan Responden dari Luar Usahatani

No	Nama	Pekerjaan	Penerimaan di Luar Usahatani	Modal	Pendapatan
1	Sunaryo	Tukang Kayu	12.000.000	2.400.000	9.600.000
2	Wahyudiono	Penebang Pohon	6.000.000	1.200.000	4.800.000
4	Boiman	Penjual Kayu Bakar	6.000.000	240.000	5.760.000
5	Katwanto	Penebang Pohon	6.000.000	2.400.000	3.600.000
6	Amanudin	Tukang Kayu	18.000.000	-	18.000.000
10	Abidin	Tukang Kayu	12.000.000	-	12.000.000
11	Santo	Tukang Kayu	12.000.000	-	12.000.000
12	Isnanto	Tukang Kayu	18.000.000	-	18.000.000
13	Boiran	Pengrajin	3.600.000	1.200.000	2.400.000
14	Sarjono	Tukang Becak	6.000.000	1.800.000	4.200.000
15	Purnomo	Tukang Bangunan	12.000.000	1.200.000	10.800.000
16	Jemawan	Tukang Becak	6.000.000	1.200.000	4.800.000
17	Ismoyo	Satpam	18.000.000	-	18.000.000
18	Tulus	Sopir	18.000.000	-	18.000.000
19	M. Yusuf	Buruh Lepas	6.000.000	-	6.000.000
20	Priyodianto	Buruh Bangunan	12.000.000	-	12.000.000
21	Sujatno	Buruh Lepas	12.000.000	-	12.000.000
22	Anom Suroto	Tukang Bangunan	12.000.000	-	12.000.000
23	Gunoto	Tukang Bangunan	12.000.000	-	12.000.000
24	Sugiyanto	Pedagang	12.000.000	2.400.000	9.600.000
25	Tuwari	Tukang Bangunan	18.000.000	-	18.000.000
26	Monandi	Pedagang	18.000.000	1.800.000	16.200.000
27	Mulyono	Tukang Bangunan	6.000.000	-	6.000.000
28	Suwarni	Tukang Bangunan	12.000.000	-	12.000.000
29	Katirun	Pengrajin Batu Bata	6.000.000	1.200.000	4.800.000
30	Sukardi	Tukang Bangunan	18.000.000	-	18.000.000
31	Suryani	Tukang Bangunan	18.000.000	-	18.000.000
32	Supriyadi	Tukang Bangunan	18.000.000	-	18.000.000
33	Agus	Buruh	12.000.000	-	12.000.000
34	Pamuji	Buruh	12.000.000	-	12.000.000
35	Suharwanto	Buruh	12.000.000	-	12.000.000
36	Sringatin	Pedagang	6.000.000	-	6.000.000
37	Jamali	Buruh	6.000.000	-	6.000.000
38	Supri	Tukang Bangunan	12.000.000	-	12.000.000
39	Katono	Buruh	7.200.000	-	7.200.000
40	Kaderi	Tukang Bangunan	12.000.000	-	12.000.000
41	Sudarno	Buruh	8.400.000	-	8.400.000
42	Sumartono	Tukang Bangunan	12.000.000	-	12.000.000
43	Kholik	Pengantar Gas & Air Galon	12.000.000	1.800.000	10.200.000

44	Mulyono	Tukang Bangunan	12.000.000	-	12.000.000
45	Jaeri	Tukang Bangunan	12.000.000	-	12.000.000
46	Harno	Buruh	8.400.000	-	8.400.000
47	Tumarno	Tukang Kayu	12.000.000	-	12.000.000
48	Wasito	Tukang Bangunan	12.000.000	-	12.000.000
49	Hassim	Penjual Batu Koral	18.000.000	1.800.000	16.200.000
50	Giman	Buruh	7.200.000	-	7.200.000
51	Sayekti	Tukang Becak	8.400.000	-	8.400.000
52	Marto	Tukang Bangunan	12.000.000	-	12.000.000
53	Kalam	Buruh	8.400.000	-	8.400.000
54	Subirin	Buruh	8.400.000	-	8.400.000
55	Tularno	Buruh	8.400.000	-	8.400.000
56	Tukijan	Tukang Bangunan	12.000.000	-	12.000.000
57	Sugiyanto	Satpam	14.400.000	-	14.400.000
58	Jemani	Buruh	8.400.000	-	8.400.000
59	Marsito	Buruh	8.400.000	-	8.400.000
60	Wahyudi	Tukang Bangunan	12.000.000	-	12.000.000
61	Juni	Buruh	8.400.000	-	8.400.000
62	Wahyu	Tukang Bangunan	12.000.000	-	12.000.000
63	Bonasir	Buruh	8.400.000	-	8.400.000
64	Suseno	Buruh	8.400.000	-	8.400.000
65	Marsudi	Buruh	8.400.000	-	8.400.000
66	Wasikun	Buruh	8.400.000	-	8.400.000
67	Mesran	Pedagang	12.000.000	-	12.000.000
68	Misradi	Buruh	8.400.000	-	8.400.000
69	Boeran	Tukang Bangunan	12.000.000	-	12.000.000
70	Tumijo	Buruh	6.000.000	-	6.000.000
71	Sugito	Buruh	3.600.000	-	3.600.000
72	Eko	Tukang Servis Diesel	18.000.000	-	18.000.000
73	Sidik	Buruh	8.400.000	-	8.400.000
74	Suryadi	Tukang Bangunan	12.000.000	-	12.000.000
75	Budiarto	Buruh	6.000.000	-	6.000.000
76	Gianto	Buruh	4.800.000	-	4.800.000
77	Marjikin	Tukang Bangunan	12.000.000	-	12.000.000
78	Boiman	Buruh	4.800.000	-	4.800.000
79	Darmaji	Tukang Bangunan	12.000.000	-	12.000.000
80	Boimin	Buruh	6.000.000	-	6.000.000
81	Miswanto	Buruh	6.000.000	-	6.000.000
82	Suharno	Buruh	7.200.000	-	7.200.000
83	Sutrisno	Tukang Bangunan	12.000.000	-	12.000.000
84	Karnen	Tukang Bangunan	12.000.000	-	12.000.000
85	Sarti	Buruh	4.800.000	-	4.800.000
86	Hariyono	Buruh Serabutan	3.600.000	-	3.600.000

Jumlah	853.200.000	20.640.000	832.560.000
Rata-rata	10.404.878	251.707	10.153.171

Lampiran 6. Pendapatan Anggota Keluarga Responden

No.	Nama	Nama Anggota Keluarga 1	Pekerjaan	Pendapatan	Nama Anggota Keluarga 2	Pekerjaan	Pendapatan
1	Jaswadi	-	-	-	-	-	-
2	Sunaryo	Siti Aisah	Wiraswasta	6.000.000	-	-	-
3	Sogiyem	Supriyanto	Wiraswasta	6.000.000	-	-	-
4	Sudjono	-	-	-	-	-	-
5	Sarginen	-	-	-	-	-	-
6	Wahyudiono	Maryanti	Wiraswasta	6.000.000	-	-	-
7	Sujarno	Tukinah	Buruh	6.000.000	Gita Iswara	Pegawai Toko	27.600.000
8	Boiran	-	-	-	-	-	-
9	Marsandi	-	-	-	-	-	-
10	Bonijo	Tukijem	Buruh	6.000.000	-	-	-
11	Sarjono	-	-	-	-	-	-
12	Purnomo	Suprihatin	Buruh	6.000.000	-	-	-
13	Boiman	Tukinah	Buruh	6.000.000	Pujiono	Wiraswasta	12.000.000
14	Jemawan	Iyem	Buruh	6.000.000	-	-	-
15	Katwanto	Miswati	Wiraswasta	12.000.000	-	-	-
16	Saryono	Misngatun	Wiraswasta	6.000.000	Aris W	Wiraswasta	6.000.000
17	Ismoyo	Istanti	Cleaning Service	15.600.000	-	-	-
18	Tulus	Siti Rukhoyah	Wiraswasta	6.000.000	-	-	-
19	M. Yusuf	Sholikhah	Buruh	3.600.000	-	-	-
20	Priyodianto	-	-	-	-	-	-
21	Sujatno	Tri	Buruh Cuci	2.400.000	-	-	-
22	Amanudin	Martini	Pedagang	12.000.000	-	-	-

23	Anom Suroto	Rinti	Wiraswasta	6.000.000	-	-	-
24	Jojon	Mujiatin	Wiraswasta	6.000.000	-	-	-
25	Suparman	Wily Herman	Wiraswasta	6.000.000	-	-	-
26	Jamari	Kuzaenah	Buruh	4.800.000	-	-	-
27	Kadinem	-	-	-	-	-	-
28	Bibit Waluyo	Sri Pramudianti	Wiraswasta	6.000.000	-	-	-
29	Gunoto	Ningsih	Wiraswasta	6.000.000	-	-	-
30	Sugiyanto	Nur Cahya	Wiraswasta	12.000.000	-	-	-
31	Tuwari	Tugiyatun	Pembantu	7.200.000	-	-	-
32	Monandi	Renti A	Penata Rias	18.000.000	-	-	-
33	Mulyono	Sutini	Wiraswasta	6.000.000	-	-	-
34	Toimun	Soiyem	Wiraswasta	6.000.000	Roni	Pedagang	18.000.000
35	Suwarni	Tukirah	Wiraswasta	6.000.000	-	-	-
36	Katirun	Misginem	Buruh	6.000.000	-	-	-
37	Suwarto	-	-	-	-	-	-
38	Sukardi	Sudarmi	Wiraswasta	6.000.000	Kukuh	Wiraswasta	6.000.000
39	Isnanto	-	-	-	-	-	-
40	Suryani	Retno M	Wiraswasta	6.000.000	-	-	-
41	Supriyadi	Sumaryani	Pedagang	12.000.000	-	-	-
42	Agus	Purwati	Wiraswasta	7.200.000	-	-	-
43	Pamuji	Suwarti	Wiraswasta	6.000.000	-	-	-
44	Suharwanto	Saringatin	Wiraswasta	7.200.000	-	-	-
45	Jemari	Sairah	Wiraswasta	6.000.000	-	-	-
46	Isbat	-	-	-	-	-	-
47	Sringatin	Daffa A	Buruh	7.200.000	-	-	-

48	Jamali	Rusmiatin	Pembantu	12.000.000	-	-	-
49	Supri	Hariyanti	Buruh	7.200.000	-	-	-
50	Katono	Sariyati	Pedagang	12.000.000	-	-	-
51	Kaderi	Nur	Pedagang	12.000.000	-	-	-
52	Jamil	Erna	Wiraswasta	7.200.000	-	-	-
53	Sudarno	Seniwati	Wiraswasta	7.200.000	Latif	Tukang Bangunan	18.000.000
54	Sumartono	Bandiyah	Wiraswasta	6.000.000	-	-	-
55	Kholik	Surati	Wiraswasta	7.200.000	-	-	-
56	Mulyono	Lestari	Penjahit	12.000.000	-	-	-
57	Jaeri	Darwatik	Wiraswasta	12.000.000	-	-	-
58	Harno	Sumiati	Wiraswasta	7.200.000	-	-	-
59	Abidin	Khoiriah	Wiraswasta	7.200.000	-	-	-
60	Tumarno	Sunarti	Wiraswasta	7.200.000	-	-	-
61	Wasito	Wiji	Wiraswasta	6.000.000	-	-	-
62	Santo	Markamah	Wiraswasta	6.000.000	-	-	-
63	Hassim	-	-	-	-	-	-
64	Giman	Katinem	Pedagang	7.200.000	-	-	-
65	Sayekti	Suparmi	Wiraswasta	6.000.000	Wiwin	Penjaga Toko	9.600.000
66	Marto	-	-	-	-	-	-
67	Kalam	Suratmi	Wiraswasta	7.200.000	-	-	-
68	Subirin	Sipurwati	Pedagang	12.000.000	-	-	-
69	Tularno	Siti	Wiraswasta	7.200.000	-	-	-
70	Tukijan	Sumiatin	Pedagang	12.000.000	-	-	-
71	Sugiyanto	Mariyatin	Pedagang	12.000.000	-	-	-
72	Jemani	Paerah	Wiraswasta	7.200.000	-	-	-

73	Marsito	Sukati	Wiraswasta	7.200.000	Hadi	Tukang Bangunan	12.000.000
74	Wahyudi	-	-	-	-	-	-
75	Juni	Kadinem	Buruh	8.400.000	-	-	-
76	Wahyu	Tini	Buruh	6.000.000	-	-	-
77	Bonasir	Suprpti	Pedagang	12.000.000	-	-	-
78	Suseno	Sugi	Wiraswasta	6.000.000	Mukti	Tukang Sayur	12.000.000
79	Marsudi	-	-	-	-	-	-
80	Wasikun	Nursiah	Wiraswasta	8.400.000	-	-	-
81	Mesran	Yani	Penjahit	8.400.000	-	-	-
82	Misradi	Katmini	Wiraswasta	3.600.000	-	-	-
83	Boeran	Yainah	Wiraswasta	6.000.000	-	-	-
84	Tumijo	Waginah	Buruh	8.400.000	-	-	-
85	Sugito	-	-	-	-	-	-
86	Eko	Sri	Wiraswasta	6.000.000	-	-	-
87	Sidik	Dedik	Tukang Bengkel	18.000.000	-	-	-
88	Suryadi	Sunarti	Pedagang	12.000.000	-	-	-
89	Budiarto	-	-	-	-	-	-
90	Gianto	Sukarti	Buruh	8.400.000	-	-	-
91	Marjikin	Tin	Buruh	8.400.000	-	-	-
92	Boiman	Murtini	Buruh	8.400.000	-	-	-
93	Darmaji	-	-	-	-	-	-
94	Boimin	Painem	Buruh	8.400.000	-	-	-
95	Miswanto	Tutik	Wiraswasta	7.200.000	Dwi	Penjaga Toko	9.600.000
96	Suharno	Ismiati	Buruh	8.400.000	-	-	-
97	Sutrisno	Sogiyem	Wiraswasta	6.000.000	-	-	-

98	Karnen	Jemilah	Wiraswasta	6.000.000	-	-	-
99	Sarti	Wahyu	Buruh	8.400.000	-	-	-
100	Hariyono	-	-	-	-	-	-
	Jumlah			724.800.000			142.800.000
	Rata-rata			7.248.000			1.428.000

Lampiran 7. Pengeluaran Usahatani Padi Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Nama	Benih	Pupuk	Pestisida	Sarana Produksi	Pengairan	Tenaga Kerja	BBM	PBB	Total
1	Jaswadi	255.000	409.500	159.000	63.000	400.000	1.555.000	450.000	27.000	3.318.500
2	Sunaryo	291.429	468.000	181.714	150.000	200.000	1.370.000	400.000	46.286	3.107.429
3	Sogiyem	255.000	409.500	159.000	97.000	400.000	1.555.000	450.000	27.000	3.352.500
4	Sudjono	473.571	760.500	295.286	150.000	400.000	2.120.000	600.000	50.143	4.849.500
5	Sarginen	327.857	526.500	204.429	45.000	400.000	1.735.000	-	34.714	3.273.500
6	Wahyudiono	473.571	760.500	295.286	188.000	400.000	2.120.000	600.000	50.143	4.887.500
7	Sujarno	437.143	702.000	272.571	146.000	400.000	2.030.000	-	46.286	4.034.000
8	Boiran	291.429	468.000	181.714	164.000	200.000	1.370.000	150.000	46.286	2.871.429
9	Marsandi	437.143	702.000	272.571	144.000	400.000	2.030.000	-	46.286	4.032.000
10	Bonijo	437.143	702.000	272.571	148.000	400.000	2.030.000	-	46.286	4.036.000
11	Sarjono	473.571	760.500	295.286	142.000	400.000	2.120.000	450.000	50.143	4.691.500
12	Purnomo	255.000	409.500	159.000	49.000	400.000	1.555.000	600.000	27.000	3.454.500
13	Boiman	170.000	273.000	106.000	37.000	200.000	1.045.000	300.000	27.000	2.158.000
14	Jemawan	255.000	409.500	159.000	31.000	400.000	1.555.000	450.000	27.000	3.286.500
15	Katwanto	315.714	507.000	196.857	184.000	200.000	1.430.000	400.000	50.143	3.283.714
16	Saryono	437.143	702.000	272.571	149.000	400.000	2.030.000	450.000	46.286	4.487.000
17	Ismoyo	255.000	409.500	159.000	63.000	400.000	1.555.000	450.000	27.000	3.318.500
18	Tulus	255.000	409.500	159.000	53.000	400.000	1.555.000	450.000	27.000	3.308.500
19	M. Yusuf	473.571	760.500	295.286	158.000	400.000	2.120.000	-	50.143	4.257.500
20	Priyodianto	255.000	409.500	159.000	36.000	400.000	1.555.000	300.000	27.000	3.141.500
21	Sujatno	255.000	409.500	159.000	47.000	400.000	1.555.000	-	27.000	2.852.500

22	Amanudin	255.000	409.500	159.000	45.000	400.000	1.555.000	150.000	27.000	3.000.500
23	Anom Suroto	255.000	409.500	159.000	61.000	400.000	1.555.000	600.000	27.000	3.466.500
24	Jojon	473.571	760.500	295.286	144.000	400.000	2.120.000	450.000	50.143	4.693.500
25	Suparman	473.571	760.500	295.286	157.000	400.000	2.120.000	450.000	50.143	4.706.500
26	Jamari	473.571	760.500	295.286	203.000	400.000	2.120.000	-	50.143	4.302.500
27	Kadinem	473.571	760.500	295.286	144.000	400.000	2.120.000	-	50.143	4.243.500
28	Bibit Waluyo	437.143	702.000	272.571	143.000	400.000	2.030.000	450.000	46.286	4.481.000
29	Gunoto	473.571	760.500	295.286	158.000	400.000	2.120.000	450.000	50.143	4.707.500
30	Sugiyanto	255.000	409.500	159.000	53.000	400.000	1.555.000	450.000	27.000	3.308.500
31	Tuwari	255.000	409.500	159.000	43.000	400.000	1.555.000	450.000	27.000	3.298.500
32	Monandi	255.000	409.500	159.000	75.000	400.000	1.555.000	750.000	27.000	3.630.500
33	Mulyono	255.000	409.500	159.000	67.000	400.000	1.555.000	-	27.000	2.872.500
34	Toimun	255.000	409.500	159.000	63.000	400.000	1.555.000	600.000	27.000	3.468.500
35	Suwarni	255.000	409.500	159.000	31.000	400.000	1.555.000	450.000	27.000	3.286.500
36	Katirun	255.000	409.500	159.000	75.000	400.000	1.555.000	150.000	27.000	3.030.500
37	Suwarto	473.571	760.500	295.286	145.000	400.000	2.120.000	300.000	50.143	4.544.500
38	Sukardi	255.000	409.500	159.000	103.000	400.000	1.555.000	450.000	27.000	3.358.500
39	Isnanto	255.000	409.500	159.000	65.000	400.000	1.555.000	450.000	27.000	3.320.500
40	Suryani	255.000	409.500	159.000	46.000	400.000	1.555.000	450.000	27.000	3.301.500
41	Supriyadi	364.286	585.000	227.143	67.000	400.000	1.825.000	450.000	38.571	3.957.000
42	Agus	255.000	409.500	159.000	70.000	400.000	1.555.000	300.000	27.000	3.175.500
43	Pamuji	255.000	409.500	159.000	61.000	400.000	1.555.000	-	27.000	2.866.500
44	Suharwanto	400.714	643.500	249.857	41.000	400.000	1.915.000	300.000	42.429	3.992.500
45	Jemari	255.000	409.500	159.000	75.000	400.000	1.555.000	-	27.000	2.880.500
46	Isbat	255.000	409.500	159.000	45.000	400.000	1.555.000	450.000	27.000	3.300.500

47	Sringatin	327.857	526.500	204.429	59.000	400.000	1.735.000	300.000	34.714	3.587.500
48	Jamali	255.000	409.500	159.000	104.000	400.000	1.555.000	300.000	27.000	3.209.500
49	Supri	255.000	409.500	159.000	55.000	400.000	1.555.000	300.000	27.000	3.160.500
50	Katono	255.000	409.500	159.000	63.000	400.000	1.555.000	-	27.000	2.868.500
51	Kaderi	255.000	409.500	159.000	49.000	400.000	1.555.000	300.000	27.000	3.154.500
52	Jamil	255.000	409.500	159.000	57.000	400.000	1.555.000	450.000	27.000	3.312.500
53	Sudarno	327.857	526.500	204.429	41.000	400.000	1.735.000	-	34.714	3.269.500
54	Sumartono	255.000	409.500	159.000	51.000	400.000	1.555.000	-	27.000	2.856.500
55	Kholik	255.000	409.500	159.000	169.000	400.000	1.580.000	450.000	27.000	3.449.500
56	Mulyono	437.143	702.000	272.571	46.000	400.000	2.005.000	450.000	46.286	4.359.000
57	Jaeri	255.000	409.500	159.000	63.000	400.000	1.555.000	150.000	27.000	3.018.500
58	Harno	255.000	409.500	159.000	41.000	400.000	1.555.000	-	27.000	2.846.500
59	Abidin	255.000	409.500	159.000	45.000	400.000	1.555.000	300.000	27.000	3.150.500
60	Tumarno	255.000	409.500	159.000	64.000	400.000	1.555.000	450.000	27.000	3.319.500
61	Wasito	255.000	409.500	159.000	45.000	400.000	1.555.000	300.000	27.000	3.150.500
62	Santo	255.000	409.500	159.000	63.000	400.000	1.555.000	-	27.000	2.868.500
63	Hassim	255.000	409.500	159.000	43.000	400.000	1.555.000	600.000	27.000	3.448.500
64	Giman	255.000	409.500	159.000	59.000	400.000	1.555.000	-	27.000	2.864.500
65	Sayekti	255.000	409.500	159.000	49.000	400.000	1.555.000	300.000	27.000	3.154.500
66	Marto	255.000	409.500	159.000	159.000	400.000	1.580.000	300.000	27.000	3.289.500
67	Kalam	473.571	760.500	295.286	51.000	400.000	2.095.000	-	50.143	4.125.500
68	Subirin	255.000	409.500	159.000	55.000	400.000	1.555.000	300.000	27.000	3.160.500
69	Tularno	255.000	409.500	159.000	59.000	400.000	1.555.000	300.000	27.000	3.164.500
70	Tukijan	255.000	409.500	159.000	59.000	400.000	1.555.000	-	27.000	2.864.500
71	Sugiyanto	255.000	409.500	159.000	156.000	400.000	1.580.000	600.000	27.000	3.586.500

72	Jemani	437.143	702.000	272.571	56.000	400.000	2.005.000	-	46.286	3.919.000
73	Marsito	255.000	409.500	159.000	45.000	400.000	1.555.000	300.000	27.000	3.150.500
74	Wahyudi	255.000	409.500	159.000	69.000	400.000	1.555.000	300.000	27.000	3.174.500
75	Juni	291.429	468.000	181.714	65.000	400.000	1.645.000	-	30.857	3.082.000
76	Wahyu	255.000	409.500	159.000	51.000	400.000	1.555.000	300.000	27.000	3.156.500
77	Bonasir	255.000	409.500	159.000	58.000	400.000	1.555.000	300.000	27.000	3.163.500
78	Suseno	364.286	585.000	227.143	83.000	400.000	1.825.000	600.000	38.571	4.123.000
79	Marsudi	327.857	526.500	204.429	138.000	400.000	1.760.000	100.000	34.714	3.491.500
80	Wasikun	315.714	507.000	196.857	89.000	200.000	1.405.000	-	50.143	2.763.714
81	Mesran	255.000	409.500	159.000	65.000	400.000	1.555.000	300.000	27.000	3.170.500
82	Misradi	255.000	409.500	159.000	40.000	400.000	1.555.000	-	27.000	2.845.500
83	Boeran	291.429	468.000	181.714	75.000	400.000	1.645.000	-	30.857	3.092.000
84	Tumijo	255.000	409.500	159.000	188.000	400.000	1.580.000	-	27.000	3.018.500
85	Sugito	473.571	760.500	295.286	63.000	400.000	2.095.000	450.000	50.143	4.587.500
86	Eko	255.000	409.500	159.000	65.000	400.000	1.555.000	300.000	27.000	3.170.500
87	Sidik	255.000	409.500	159.000	45.000	400.000	1.555.000	300.000	27.000	3.150.500
88	Suryadi	327.857	526.500	204.429	104.000	400.000	1.735.000	300.000	34.714	3.632.500
89	Budiarto	255.000	409.500	159.000	47.000	400.000	1.555.000	300.000	27.000	3.152.500
90	Gianto	255.000	409.500	159.000	136.000	400.000	1.580.000	-	27.000	2.966.500
91	Marjikin	400.714	643.500	249.857	87.000	400.000	1.915.000	300.000	42.429	4.038.500
92	Boiman	255.000	409.500	159.000	77.000	400.000	1.555.000	-	27.000	2.882.500
93	Darmaji	255.000	409.500	159.000	160.000	400.000	1.580.000	300.000	27.000	3.290.500
94	Boimin	437.143	702.000	272.571	33.000	400.000	2.005.000	-	46.286	3.896.000
95	Miswanto	255.000	409.500	159.000	71.000	400.000	1.555.000	300.000	27.000	3.176.500
96	Suharno	255.000	409.500	159.000	43.000	400.000	1.555.000	300.000	27.000	3.148.500

97	Sutrisno	170.000	273.000	106.000	162.000	200.000	1.070.000	-	27.000	2.008.000
98	Karnen	400.714	643.500	249.857	85.000	400.000	1.915.000	-	42.429	3.736.500
99	Sarti	170.000	273.000	106.000	159.000	200.000	1.070.000	200.000	27.000	2.205.000
100	Hariyono	291.429	468.000	181.714	70.000	200.000	1.345.000	-	46.286	2.602.429
	Jumlah	30.648.571	49.218.000	19.110.286	8.558.000	38.400.000	166.495.000	26.450.000	3.351.857	342.231.714
	Rata-rata	306.485,71	492.180	191.102,86	85.580	384.000	1.664.950	264.500	33.518,57	3.422.317,14

Lampiran 8. Pengeluaran Konsumsi Pangan Responden Petani Padi

No.	Nama	Karbohidrat Selain Beras	Pangan Hewani	Sayur- sayuran	Kacang- kacangan	Buah- buahan	Minyak dan Lemak	Bahan Minuman	Bumbu- bumbuan	Konsumsi Lainnya	Makanan/ Minuman Jadi	T & S
1	Jaswadi	252.000	594.000	2.328.000	138.000	552.000	636.000	456.000	66.000	264.000	0	0
2	Sunaryo	288.000	1.764.000	3.096.000	900.000	528.000	708.000	3.258.000	174.000	108.000	0	0
3	Sogiyem	192.000	1.291.200	2.292.000	168.000	907.200	816.000	756.000	90.000	144.000	0	960.000
4	Sudjono	372.000	864.000	2.274.000	168.000	907.200	816.000	558.000	102.000	108.000	432000	960.000
5	Sarginen	192.000	1.764.000	2.034.000	939.000	1.260.000	588.000	480.000	102.000	156.000	0	480.000
6	Wahyudiono	60.000	1.614.000	2.106.000	1.200.000	300.000	1.164.000	1.428.000	156.000	468.000	0	1.440.000
7	Sujarno	198.000	2.808.000	4.854.000	960.000	360.000	1.164.000	3.930.000	252.000	720.000	0	2.304.000
8	Boiran	162.000	2.520.000	3.444.000	372.000	120.000	600.000	1.782.000	216.000	360.000	0	1.152.000
9	Marsandi	354.000	2.598.000	2.160.000	729.000	1.147.200	1.272.000	882.000	192.000	180.000	432000	0
10	Bonijo	582.000	2.598.000	2.262.000	138.000	1.404.000	1.092.000	1.380.000	108.000	396.000	432000	960.000
11	Sarjono	888.000	1.590.000	2.142.000	780.000	600.000	936.000	882.000	528.000	720.000	0	0
12	Purnomo	228.000	2.088.000	3.006.000	780.000	360.000	1.164.000	1.116.000	528.000	720.000	0	0
13	Boiman	198.000	1.590.000	8.058.000	840.000	360.000	1.164.000	1.224.000	264.000	720.000	0	960.000
14	Jemawan	162.000	2.598.000	2.580.000	168.000	1.315.200	1.272.000	882.000	156.000	636.000	0	0
15	Katwanto	918.000	2.448.000	1.992.000	1.020.000	360.000	1.164.000	1.428.000	504.000	720.000	0	1.920.000
16	Saryono	318.000	2.598.000	2.340.000	1.248.000	1.435.200	1.272.000	1.482.000	240.000	624.000	432000	1.920.000
17	Ismoyo	288.000	2.598.000	2.562.000	1.080.000	1.147.200	1.272.000	1.380.000	228.000	588.000	0	0
18	Tulus	144.000	2.310.000	1.848.000	1.080.000	667.200	1.128.000	1.224.000	156.000	504.000	0	0
19	M. Yusuf	0	2.058.000	2.802.000	1.020.000	1.051.200	1.272.000	1.068.000	204.000	588.000	0	1.920.000
20	Priyodianto	234.000	2.058.000	2.730.000	1.020.000	1.147.200	1.272.000	1.380.000	228.000	540.000	432000	960.000
21	Sujatno	144.000	1.788.000	1.848.000	1.080.000	787.200	1.452.000	1.320.000	156.000	360.000	0	0

22	Amanudin	108.000	1.788.000	2.436.000	1.080.000	705.600	1.452.000	1.020.000	156.000	360.000	0	0
23	Anom Suroto	378.000	2.076.000	2.418.000	1.080.000	1.128.000	1.272.000	1.320.000	228.000	402.000	0	0
24	Jojon	1.038.000	1.548.000	2.256.000	1.158.000	993.600	1.272.000	762.000	156.000	294.000	0	480.000
25	Suparman	198.000	2.148.000	2.682.000	1.080.000	1.003.200	1.500.000	1.068.000	228.000	588.000	0	960.000
26	Jamari	444.000	2.376.000	2.862.000	1.080.000	1.483.200	1.272.000	1.170.000	228.000	624.000	0	960.000
27	Kadinem	558.000	2.436.000	2.496.000	138.000	1.344.000	1.500.000	768.000	156.000	180.000	432000	0
28	Bibit Waluyo	444.000	2.616.000	2.898.000	1.020.000	1.771.200	1.272.000	1.380.000	228.000	624.000	0	960.000
29	Gunoto	588.000	2.616.000	2.862.000	1.020.000	1.363.200	1.452.000	870.000	228.000	540.000	432000	960.000
30	Sugiyanto	594.000	3.516.000	3.042.000	1.668.000	1.224.000	1.092.000	1.068.000	156.000	252.000	432000	960.000
31	Tuwari	414.000	3.504.000	3.408.000	1.500.000	1.411.200	1.272.000	1.224.000	228.000	636.000	432000	0
32	Monandi	198.000	2.616.000	1.968.000	1.080.000	744.000	1.452.000	924.000	156.000	360.000	0	0
33	Mulyono	414.000	2.328.000	3.006.000	1.080.000	1.723.200	1.044.000	1.170.000	228.000	720.000	432000	0
34	Toimun	108.000	2.328.000	1.950.000	1.080.000	667.200	1.044.000	1.224.000	156.000	360.000	0	960.000
35	Suwarni	408.000	2.580.000	2.058.000	1.218.000	2.011.200	1.272.000	1.482.000	228.000	720.000	0	0
36	Katirun	108.000	2.688.000	1.140.000	1.080.000	667.200	1.044.000	1.224.000	156.000	360.000	0	0
37	Suwarto	378.000	1.608.000	1.284.000	348.000	768.000	1.572.000	570.000	156.000	192.000	432000	0
38	Sukardi	198.000	1.968.000	1.464.000	1.080.000	787.200	1.320.000	1.224.000	156.000	504.000	0	0
39	Isnanto	534.000	3.336.000	1.986.000	1.500.000	648.000	1.044.000	1.170.000	228.000	624.000	0	0
40	Suryani	288.000	2.592.000	1.440.000	648.000	763.200	1.044.000	1.524.000	156.000	720.000	432000	0
41	Supriyadi	108.000	1.704.000	1.284.000	1.080.000	883.200	1.044.000	912.000	156.000	360.000	0	0
42	Agus	324.000	1.260.000	1.080.000	1.080.000	528.000	1.320.000	672.000	228.000	180.000	0	960.000
43	Pamuji	144.000	1.800.000	1.584.000	1.080.000	595.200	1.092.000	594.000	192.000	252.000	0	480.000
44	Suharwanto	108.000	1.572.000	1.140.000	1.080.000	547.200	5.832.000	516.000	120.000	360.000	0	0
45	Jemari	444.000	1.164.000	2.004.000	1.080.000	379.200	864.000	1.068.000	156.000	360.000	0	480.000
46	Isbat	414.000	2.472.000	2.016.000	1.500.000	288.000	1.272.000	1.482.000	228.000	360.000	0	960.000

47	Sringatin	414.000	1.992.000	2.208.000	1.080.000	907.200	1.500.000	1.326.000	228.000	624.000	0	0
48	Jamali	234.000	1.164.000	1.764.000	1.080.000	528.000	1.272.000	1.602.000	228.000	216.000	0	0
49	Supri	468.000	1.728.000	1.842.000	1.140.000	744.000	1.272.000	1.104.000	240.000	360.000	0	0
50	Katono	144.000	1.620.000	2.172.000	1.080.000	984.000	1.452.000	924.000	156.000	600.000	0	480.000
51	Kaderi	108.000	2.340.000	1.812.000	1.080.000	864.000	1.452.000	1.020.000	228.000	540.000	0	480.000
52	Jamil	144.000	3.060.000	2.022.000	1.500.000	1.224.000	1.452.000	1.020.000	228.000	444.000	0	960.000
53	Sudarno	108.000	2.796.000	2.196.000	1.080.000	984.000	1.452.000	1.020.000	156.000	360.000	0	1.056.000
54	Sumartono	144.000	2.508.000	2.076.000	540.000	768.000	1.452.000	516.000	228.000	444.000	0	480.000
55	Kholik	252.000	2.340.000	2.196.000	1.080.000	696.000	1.452.000	1.020.000	228.000	360.000	0	0
56	Mulyono	108.000	1.800.000	1.788.000	492.000	1.128.000	996.000	924.000	156.000	444.000	0	960.000
57	Jaeri	144.000	3.060.000	2.436.000	1.500.000	840.000	1.452.000	1.224.000	156.000	360.000	0	0
58	Harno	144.000	1.788.000	1.728.000	780.000	600.000	1.452.000	768.000	228.000	360.000	0	0
59	Abidin	108.000	2.064.000	2.676.000	480.000	1.128.000	1.224.000	828.000	156.000	360.000	0	0
60	Tumarno	324.000	1.620.000	1.992.000	660.000	936.000	1.680.000	768.000	156.000	360.000	0	480.000
61	Wasito	144.000	1.620.000	2.544.000	660.000	696.000	1.224.000	924.000	228.000	0	0	480.000
62	Santo	144.000	2.436.000	2.460.000	660.000	600.000	996.000	516.000	156.000	264.000	0	480.000
63	Hassim	108.000	2.268.000	1.788.000	720.000	624.000	1.224.000	768.000	156.000	0	0	960.000
64	Giman	144.000	2.508.000	1.992.000	720.000	648.000	1.680.000	768.000	228.000	360.000	0	480.000
65	Sayekti	276.000	2.148.000	2.544.000	720.000	600.000	600.000	768.000	228.000	360.000	0	0
66	Marto	108.000	2.220.000	1.512.000	660.000	624.000	792.000	768.000	156.000	0	0	480.000
67	Kalam	144.000	2.220.000	2.196.000	1.080.000	696.000	1.452.000	924.000	228.000	360.000	0	0
68	Subirin	144.000	2.868.000	2.166.000	1.020.000	624.000	1.452.000	924.000	156.000	0	0	480.000
69	Tularno	144.000	2.220.000	2.112.000	1.020.000	480.000	1.452.000	768.000	228.000	0	0	0
70	Tukijan	144.000	1.668.000	2.052.000	1.020.000	696.000	1.224.000	672.000	156.000	0	0	480.000
71	Sugiyanto	288.000	2.988.000	2.538.000	1.500.000	888.000	1.272.000	1.170.000	240.000	360.000	0	960.000

72	Jemani	288.000	1.128.000	1.764.000	1.020.000	480.000	1.044.000	1.224.000	240.000	360.000	0	480.000
73	Marsito	252.000	1.320.000	2.532.000	600.000	840.000	1.044.000	1.380.000	240.000	360.000	0	1.680.000
74	Wahyudi	252.000	1.416.000	1.992.000	780.000	864.000	1.044.000	1.380.000	240.000	180.000	0	960.000
75	Juni	144.000	2.028.000	1.788.000	720.000	984.000	1.452.000	924.000	156.000	360.000	0	480.000
76	Wahyu	108.000	1.428.000	1.788.000	720.000	624.000	1.224.000	828.000	156.000	0	0	600.000
77	Bonasir	144.000	1.788.000	1.764.000	720.000	1.224.000	1.224.000	612.000	156.000	360.000	0	480.000
78	Suseno	468.000	3.528.000	3.582.000	1.680.000	2.028.000	1.248.000	1.572.000	252.000	720.000	0	1.440.000
79	Marsudi	108.000	1.704.000	2.076.000	1.020.000	624.000	1.320.000	924.000	228.000	360.000	0	480.000
80	Wasikun	288.000	1.308.000	1.848.000	660.000	600.000	1.500.000	1.068.000	264.000	180.000	0	480.000
81	Mesran	468.000	2.232.000	2.748.000	600.000	1.392.000	1.224.000	1.224.000	228.000	540.000	0	0
82	Misradi	144.000	2.028.000	2.196.000	900.000	984.000	1.680.000	1.224.000	168.000	264.000	0	960.000
83	Boeran	144.000	1.980.000	1.608.000	540.000	624.000	1.224.000	612.000	156.000	360.000	0	480.000
84	Tumijo	288.000	1.344.000	1.260.000	612.000	648.000	600.000	612.000	228.000	180.000	0	480.000
85	Sugito	360.000	1.500.000	1.680.000	480.000	720.000	936.000	1.224.000	228.000	180.000	0	600.000
86	Eko	108.000	2.148.000	1.992.000	480.000	696.000	792.000	672.000	120.000	360.000	0	960.000
87	Sidik	108.000	1.980.000	1.704.000	900.000	912.000	1.452.000	1.128.000	228.000	360.000	0	480.000
88	Suryadi	144.000	2.988.000	2.166.000	1.500.000	1.104.000	972.000	768.000	114.000	360.000	0	960.000
89	Budiarto	144.000	1.260.000	1.848.000	300.000	696.000	744.000	612.000	120.000	0	0	480.000
90	Gianto	144.000	1.680.000	1.620.000	540.000	696.000	1.356.000	768.000	192.000	360.000	0	480.000
91	Marjikin	144.000	1.620.000	1.728.000	1.020.000	624.000	936.000	672.000	120.000	240.000	0	480.000
92	Boiman	252.000	1.344.000	1.500.000	1.020.000	624.000	1.248.000	672.000	156.000	288.000	0	480.000
93	Darmaji	444.000	1.620.000	1.788.000	1.080.000	648.000	1.680.000	672.000	156.000	288.000	0	0
94	Boimin	144.000	2.076.000	1.956.000	1.080.000	936.000	1.224.000	828.000	228.000	360.000	0	0
95	Miswanto	288.000	2.148.000	1.608.000	1.260.000	1.224.000	1.680.000	1.224.000	228.000	360.000	0	480.000
96	Suharno	108.000	2.508.000	1.968.000	1.260.000	1.128.000	1.404.000	924.000	156.000	360.000	0	480.000

97	Sutrisno	108.000	2.508.000	1.872.000	1.080.000	864.000	1.404.000	924.000	156.000	288.000	0	480.000
98	Karnen	144.000	2.508.000	2.376.000	1.260.000	864.000	1.404.000	1.020.000	156.000	360.000	0	480.000
99	Sarti	144.000	1.248.000	2.256.000	540.000	468.000	1.680.000	1.320.000	156.000	600.000	0	480.000
100	Hariyono	72.000	1.668.000	2.226.000	1.140.000	240.000	1.224.000	1.260.000	120.000	636.000	0	1.440.000
	Jumlah	25.698.000	207.859.200	221.568.000	91.530.000	85.010.400	126.732.000	106.008.000	19.620.000	37.716.000	5.184.000	52.512.000
	Rata-rata	256.980	2.078.592	2.215.680	915.300	850.104	1.267.320	1.060.080	196.200	377.160	51.840	525.120

Keterangan : T&S = Tembakau & Sirih

Lampiran 9. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan I Responden Petani Padi

No.	Nama	Kayu Bakar	Gas	BBM	Listrik	Pulsa	Perlengkap an Mandi	Perlengkapan Mencuci	Make Up
1	Jaswadi	-	240.000	-	144.000	300.000	180.000	120.000	-
2	Sunaryo	-	480.000	-	960.000	1.200.000	180.000	156.000	600.000
3	Sogiyem	600.000	240.000	-	300.000	360.000	120.000	60.000	-
4	Sudjono	600.000	240.000	-	300.000	360.000	180.000	156.000	-
5	Sarginen	-	480.000	-	600.000	360.000	180.000	156.000	-
6	Wahyudiono	-	480.000	-	480.000	1.200.000	360.000	156.000	-
7	Sujarno	-	1.200.000	1.800.000	720.000	1.200.000	420.000	156.000	600.000
8	Boiran	-	480.000	-	240.000	240.000	360.000	120.000	-
9	Marsandi	-	240.000	-	312.000	600.000	180.000	156.000	-
10	Bonijo	600.000	240.000	-	300.000	600.000	420.000	156.000	-
11	Sarjono	2.400.000	480.000	2.400.000	480.000	600.000	420.000	600.000	-
12	Purnomo	-	720.000	2.400.000	720.000	2.400.000	600.000	156.000	-
13	Boiman	600.000	720.000	1.800.000	300.000	1.200.000	420.000	156.000	-
14	Jemawan	-	480.000	1.200.000	540.000	1.800.000	420.000	156.000	-
15	Katwanto	-	720.000	720.000	660.000	2.400.000	420.000	156.000	-
16	Saryono	-	720.000	1.800.000	324.000	600.000	480.000	240.000	-
17	Ismoyo	-	480.000	1.800.000	576.000	1.200.000	420.000	156.000	-
18	Tulus	-	480.000	1.200.000	336.000	600.000	420.000	156.000	-
19	M. Yusuf	600.000	480.000	-	780.000	600.000	420.000	156.000	-
20	Priyodianto	-	960.000	1.200.000	624.000	1.200.000	1.200.000	600.000	-
21	Sujatno	600.000	480.000	-	264.000	600.000	360.000	156.000	-
22	Amanudin	-	480.000	1.200.000	312.000	600.000	360.000	156.000	-

23	Anom Suroto	600.000	480.000	1.500.000	240.000	600.000	600.000	240.000	-
24	Jojon	-	240.000	1.200.000	300.000	600.000	420.000	180.000	-
25	Suparman	600.000	480.000	1.800.000	720.000	600.000	600.000	240.000	-
26	Jamari	-	720.000	-	300.000	600.000	600.000	300.000	-
27	Kadinem	-	480.000	-	300.000	360.000	360.000	156.000	600.000
28	Bibit Waluyo	600.000	480.000	1.800.000	468.000	1.200.000	780.000	600.000	-
29	Gunoto	-	720.000	1.200.000	300.000	600.000	420.000	240.000	-
30	Sugiyanto	-	720.000	2.400.000	348.000	1.200.000	420.000	300.000	240.000
31	Tuwari	-	480.000	1.200.000	324.000	1.200.000	420.000	240.000	-
32	Monandi	-	720.000	2.400.000	660.000	1.800.000	600.000	300.000	1.200.000
33	Mulyono	-	480.000	-	300.000	1.800.000	360.000	300.000	-
34	Toimun	600.000	480.000	2.400.000	300.000	1.200.000	420.000	240.000	-
35	Suwarni	600.000	480.000	-	300.000	1.200.000	420.000	300.000	-
36	Katirun	600.000	480.000	600.000	300.000	1.800.000	420.000	240.000	-
37	Suwarto	1.200.000	480.000	1.800.000	300.000	600.000	420.000	240.000	-
38	Sukardi	600.000	480.000	1.200.000	444.000	600.000	360.000	300.000	-
39	Isnanto	-	720.000	1.800.000	336.000	1.200.000	480.000	300.000	-
40	Suryani	600.000	480.000	1.200.000	300.000	600.000	360.000	300.000	-
41	Supriyadi	-	720.000	1.200.000	336.000	1.200.000	600.000	240.000	-
42	Agus	-	720.000	1.200.000	324.000	1.200.000	420.000	180.000	-
43	Pamuji	-	480.000	-	252.000	1.800.000	480.000	240.000	-
44	Suharwanto	600.000	480.000	1.200.000	336.000	600.000	480.000	240.000	-
45	Jemari	600.000	480.000	-	252.000	1.800.000	420.000	300.000	-
46	Isbat	-	720.000	1.200.000	300.000	600.000	420.000	300.000	-
47	Sringatin	1.200.000	480.000	-	264.000	1.200.000	600.000	300.000	-

48	Jamali	-	480.000	1.200.000	252.000	360.000	600.000	300.000	-
49	Supri	-	720.000	1.200.000	324.000	600.000	600.000	300.000	-
50	Katono	1.200.000	240.000	-	252.000	1.800.000	600.000	300.000	-
51	Kaderi	1.200.000	240.000	1.200.000	252.000	600.000	600.000	300.000	-
52	Jamil	-	720.000	1.800.000	300.000	1.200.000	600.000	300.000	-
53	Sudarno	1.200.000	480.000	1.200.000	300.000	600.000	600.000	300.000	-
54	Sumartono	1.200.000	240.000	-	252.000	1.800.000	600.000	300.000	-
55	Kholik	-	480.000	1.200.000	324.000	600.000	600.000	300.000	600.000
56	Mulyono	-	480.000	1.200.000	336.000	600.000	1.200.000	300.000	1.200.000
57	Jaeri	-	720.000	1.200.000	324.000	600.000	600.000	300.000	-
58	Harno	1.200.000	240.000	-	252.000	1.200.000	600.000	300.000	-
59	Abidin	-	720.000	1.200.000	300.000	600.000	600.000	300.000	-
60	Tumarno	-	480.000	1.200.000	348.000	1.200.000	1.200.000	300.000	1.200.000
61	Wasito	-	480.000	1.200.000	264.000	240.000	600.000	300.000	-
62	Santo	1.200.000	240.000	-	252.000	1.200.000	600.000	300.000	-
63	Hassim	-	720.000	2.400.000	396.000	1.800.000	600.000	300.000	-
64	Giman	1.200.000	240.000	-	252.000	1.200.000	600.000	300.000	-
65	Sayekti	-	720.000	1.200.000	312.000	600.000	1.200.000	300.000	1.200.000
66	Marto	1.200.000	240.000	1.200.000	276.000	600.000	600.000	300.000	-
67	Kalam	600.000	240.000	-	252.000	1.200.000	300.000	300.000	-
68	Subirin	1.200.000	480.000	1.200.000	336.000	600.000	600.000	300.000	-
69	Tularno	1.200.000	240.000	1.200.000	492.000	1.200.000	600.000	300.000	-
70	Tukijan	600.000	240.000	-	288.000	1.200.000	600.000	300.000	-
71	Sugiyanto	-	720.000	2.400.000	336.000	1.200.000	600.000	300.000	-
72	Jemani	1.200.000	240.000	-	252.000	1.200.000	600.000	300.000	-

73	Marsito	1.200.000	240.000	1.200.000	252.000	600.000	600.000	300.000	-
74	Wahyudi	-	480.000	1.200.000	336.000	600.000	600.000	300.000	600.000
75	Juni	1.200.000	240.000	-	252.000	1.200.000	600.000	300.000	-
76	Wahyu	-	480.000	1.200.000	264.000	600.000	600.000	300.000	600.000
77	Bonasir	1.200.000	240.000	1.200.000	780.000	600.000	600.000	300.000	600.000
78	Suseno	1.200.000	480.000	2.400.000	336.000	1.200.000	600.000	300.000	-
79	Marsudi	1.200.000	240.000	1.200.000	624.000	1.200.000	600.000	600.000	300.000
80	Wasikun	1.200.000	240.000	-	252.000	480.000	600.000	300.000	-
81	Mesran	1.200.000	240.000	1.200.000	252.000	600.000	600.000	300.000	-
82	Misradi	1.200.000	240.000	-	612.000	1.800.000	600.000	300.000	-
83	Boeran	1.200.000	240.000	-	252.000	480.000	600.000	300.000	-
84	Tumijo	1.200.000	240.000	-	216.000	480.000	420.000	180.000	-
85	Sugito	600.000	240.000	1.200.000	252.000	600.000	360.000	300.000	-
86	Eko	-	480.000	1.200.000	300.000	600.000	600.000	300.000	-
87	Sidik	1.200.000	240.000	1.200.000	252.000	600.000	600.000	300.000	-
88	Suryadi	-	480.000	1.200.000	324.000	600.000	600.000	300.000	600.000
89	Budiarto	1.200.000	240.000	1.200.000	300.000	1.200.000	600.000	300.000	-
90	Gianto	1.200.000	480.000	720.000	624.000	1.200.000	600.000	420.000	-
91	Marjikin	1.200.000	240.000	1.200.000	504.000	600.000	600.000	300.000	-
92	Boiman	1.200.000	480.000	720.000	504.000	1.200.000	600.000	420.000	-
93	Darmaji	-	480.000	1.200.000	600.000	600.000	600.000	300.000	-
94	Boimin	1.200.000	240.000	-	252.000	480.000	600.000	300.000	-
95	Miswanto	1.200.000	240.000	1.200.000	780.000	600.000	600.000	300.000	1.200.000
96	Suharno	1.200.000	240.000	1.200.000	264.000	480.000	600.000	300.000	-
97	Sutrisno	1.200.000	240.000	-	264.000	480.000	600.000	300.000	-

98	Karnen	1.200.000	240.000	1.200.000	264.000	480.000	600.000	300.000	-
99	Sarti	1.200.000	480.000	1.200.000	372.000	600.000	600.000	420.000	-
100	Hariyono	1.200.000	480.000	960.000	240.000	300.000	360.000	180.000	180.000
	Jumlah	55.800.000	45.360.000	93.420.000	36.924.000	90.840.000	53.040.000	27.372.000	11.520.000
	Rata-rata	558.000	453.600	934.200	369.240	908.400	530.400	273.720	115.200

Lampiran 10. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan II Responden Petani Padi

No.	Nama	Iuran RT/RW	Perawatan Kendaraan	Sosial/ Hajatan	Pakaian	Sarung, Sprei	Sandal/ Sepatu	STNK	PBB	Perbaikan Rumah
1	Jaswadi	60.000	-	;	-	-	50.000	600.000	60.000	50.000
2	Sunaryo	60.000	180.000	360.000	-	100.000	100.000	1.500.000	70.000	300.000
3	Sogiyem	60.000	1.200.000	360.000	150.000	250.000	50.000	-	60.000	50.000
4	Sudjono	60.000	1.200.000	360.000	100.000	250.000	50.000	-	80.000	100.000
5	Sarginen	60.000	-	360.000	-	-	50.000	-	20.000	50.000
6	Wahyudiono	60.000	1.200.000	360.000	-	-	-	200.000	60.000	200.000
7	Sujarno	60.000	1.200.000	360.000	300.000	250.000	150.000	300.000	60.000	50.000
8	Boiran	60.000	1.200.000	360.000	100.000	-	20.000	-	60.000	100.000
9	Marsandi	60.000	1.200.000	360.000	100.000	250.000	20.000	-	80.000	50.000
10	Bonijo	60.000	1.200.000	360.000	200.000	100.000	50.000	-	80.000	100.000
11	Sarjono	60.000	600.000	360.000	100.000	200.000	15.000	-	60.000	50.000
12	Purnomo	60.000	2.400.000	360.000	200.000	200.000	15.000	600.000	60.000	500.000
13	Boiman	60.000	600.000	360.000	200.000	-	50.000	-	50.000	100.000
14	Jemawan	60.000	1.200.000	1.200.000	350.000	250.000	100.000	400.000	60.000	500.000
15	Katwanto	60.000	600.000	360.000	300.000	250.000	100.000	700.000	60.000	500.000
16	Saryono	60.000	1.200.000	360.000	150.000	-	50.000	300.000	60.000	500.000
17	Ismoyo	60.000	1.200.000	1.200.000	200.000	-	100.000	300.000	28.000	500.000
18	Tulus	60.000	1.200.000	360.000	150.000	-	50.000	250.000	60.000	500.000
19	M. Yusuf	60.000	2.400.000	360.000	200.000	-	100.000	-	60.000	500.000
20	Priyodianto	60.000	2.400.000	1.200.000	350.000	250.000	50.000	300.000	60.000	500.000
21	Sujatno	60.000	2.400.000	360.000	100.000	-	50.000	-	66.000	500.000
22	Amanudin	60.000	2.400.000	1.200.000	200.000	-	50.000	-	52.000	1.000.000

23	Anom Suroto	60.000	1.200.000	600.000	150.000	-	50.000	-	28.000	500.000
24	Jojon	60.000	600.000	360.000	200.000	-	50.000	-	60.000	1.500.000
25	Suparman	60.000	1.200.000	360.000	150.000	-	50.000	300.000	60.000	500.000
26	Jamari	60.000	600.000	360.000	100.000	-	50.000	-	60.000	500.000
27	Kadinem	60.000	600.000	360.000	100.000	200.000	50.000	-	60.000	500.000
28	Bibit Waluyo	60.000	2.400.000	1.200.000	350.000	250.000	50.000	300.000	80.000	500.000
29	Gunoto	60.000	1.200.000	600.000	300.000	-	100.000	-	60.000	1.800.000
30	Sugiyanto	60.000	1.200.000	360.000	300.000	250.000	100.000	400.000	60.000	2.400.000
31	Tuwari	60.000	600.000	600.000	150.000	-	50.000	-	51.000	1.800.000
32	Monandi	60.000	1.200.000	360.000	200.000	-	100.000	700.000	54.000	1.800.000
33	Mulyono	60.000	600.000	360.000	100.000	-	50.000	-	60.000	600.000
34	Toimun	60.000	600.000	360.000	200.000	-	50.000	300.000	60.000	1.800.000
35	Suwarni	60.000	1.200.000	360.000	200.000	-	100.000	-	60.000	840.000
36	Katirun	60.000	600.000	360.000	100.000	-	50.000	-	60.000	1.800.000
37	Suwarto	60.000	600.000	360.000	200.000	-	50.000	-	60.000	720.000
38	Sukardi	60.000	600.000	360.000	100.000	-	50.000	-	55.000	1.800.000
39	Isnanto	60.000	1.200.000	1.200.000	150.000	-	50.000	300.000	56.000	1.440.000
40	Suryani	60.000	600.000	360.000	150.000	-	50.000	-	56.000	1.800.000
41	Supriyadi	60.000	1.200.000	360.000	150.000	-	50.000	-	56.000	360.000
42	Agus	60.000	50.000	360.000	400.000	-	50.000	-	28.000	500.000
43	Pamuji	60.000	-	360.000	150.000	-	50.000	-	56.000	450.000
44	Suharwanto	60.000	600.000	360.000	150.000	-	50.000	-	56.000	500.000
45	Jemari	60.000	-	600.000	100.000	-	50.000	-	56.000	200.000
46	Isbat	60.000	-	1.200.000	200.000	-	100.000	300.000	56.000	500.000
47	Sringatin	60.000	1.200.000	600.000	150.000	-	50.000	-	56.000	500.000

48	Jamali	60.000	-	600.000	100.000	-	50.000	-	56.000	450.000
49	Supri	120.000	-	600.000	150.000	-	50.000	-	56.000	500.000
50	Katono	120.000	-	600.000	100.000	-	50.000	-	56.000	500.000
51	Kaderi	120.000	-	600.000	350.000	-	50.000	-	28.000	500.000
52	Jamil	120.000	1.200.000	360.000	200.000	-	100.000	300.000	56.000	400.000
53	Sudarno	120.000	-	480.000	350.000	-	50.000	300.000	75.000	500.000
54	Sumartono	120.000	-	600.000	100.000	-	50.000	-	56.000	500.000
55	Kholik	120.000	-	600.000	150.000	-	50.000	-	27.000	500.000
56	Mulyono	120.000	-	480.000	150.000	-	50.000	300.000	28.000	450.000
57	Jaeri	120.000	600.000	600.000	200.000	-	100.000	-	56.000	500.000
58	Harno	120.000	-	480.000	200.000	-	50.000	-	56.000	500.000
59	Abidin	120.000	-	600.000	150.000	-	50.000	-	28.000	200.000
60	Tumarno	120.000	600.000	600.000	200.000	-	100.000	300.000	56.000	500.000
61	Wasito	120.000	-	600.000	100.000	-	50.000	-	57.000	500.000
62	Santo	120.000	-	600.000	100.000	-	50.000	-	56.000	200.000
63	Hassim	120.000	1.200.000	600.000	200.000	-	100.000	500.000	56.000	500.000
64	Giman	120.000	-	360.000	100.000	-	50.000	-	56.000	500.000
65	Sayekti	120.000	600.000	360.000	150.000	-	50.000	300.000	56.000	500.000
66	Marto	120.000	-	1.200.000	150.000	-	50.000	-	56.000	500.000
67	Kalam	120.000	-	1.200.000	100.000	-	50.000	-	54.000	300.000
68	Subirin	120.000	-	1.200.000	200.000	-	100.000	-	28.000	500.000
69	Tularno	120.000	-	480.000	100.000	-	50.000	-	56.000	200.000
70	Tukijan	120.000	-	1.200.000	100.000	-	50.000	-	58.000	100.000
71	Sugiyanto	120.000	600.000	1.200.000	200.000	-	100.000	300.000	28.000	500.000
72	Jemani	120.000	-	360.000	100.000	-	50.000	-	56.000	500.000

73	Marsito	120.000	-	360.000	150.000	-	50.000	-	56.000	500.000
74	Wahyudi	120.000	600.000	360.000	150.000	-	50.000	-	27.000	100.000
75	Juni	120.000	-	600.000	200.000	-	50.000	-	56.000	500.000
76	Wahyu	120.000	-	360.000	150.000	-	50.000	-	28.000	500.000
77	Bonasir	120.000	600.000	600.000	150.000	-	50.000	-	56.000	400.000
78	Suseno	120.000	1.200.000	600.000	200.000	-	100.000	300.000	56.000	500.000
79	Marsudi	120.000	-	600.000	100.000	-	50.000	-	56.000	500.000
80	Wasikun	120.000	-	600.000	200.000	-	50.000	-	56.000	350.000
81	Mesran	120.000	600.000	600.000	100.000	-	50.000	300.000	56.000	500.000
82	Misradi	120.000	-	1.200.000	350.000	-	50.000	-	56.000	500.000
83	Boeran	120.000	-	360.000	100.000	-	50.000	-	56.000	250.000
84	Tumijo	120.000	-	360.000	100.000	-	50.000	-	28.000	500.000
85	Sugito	120.000	-	360.000	200.000	-	50.000	-	28.000	700.000
86	Eko	120.000	600.000	360.000	150.000	-	50.000	-	27.000	100.000
87	Sidik	120.000	-	1.200.000	100.000	-	50.000	-	56.000	500.000
88	Suryadi	120.000	-	360.000	150.000	-	50.000	-	28.000	100.000
89	Budiarto	120.000	-	360.000	100.000	-	50.000	-	56.000	1.800.000
90	Gianto	120.000	-	1.200.000	100.000	250.000	50.000	300.000	56.000	1.800.000
91	Marjikin	120.000	-	360.000	100.000	-	50.000	-	56.000	1.320.000
92	Boiman	120.000	-	1.200.000	100.000	250.000	50.000	300.000	56.000	1.800.000
93	Darmaji	120.000	-	360.000	100.000	-	50.000	-	28.000	1.800.000
94	Boimin	120.000	-	480.000	100.000	-	50.000	-	56.000	480.000
95	Miswanto	120.000	600.000	360.000	200.000	-	50.000	300.000	56.000	1.800.000
96	Suharno	120.000	-	600.000	400.000	-	50.000	-	56.000	1.320.000
97	Sutrisno	120.000	-	600.000	100.000	-	50.000	-	56.000	1.800.000

98	Karnen	120.000	-	480.000	100.000	-	50.000	-	28.000	720.000
99	Sarti	120.000	-	1.200.000	100.000	250.000	50.000	-	56.000	1.800.000
100	Hariyono	120.000	-	600.000	300.000	250.000	50.000	210.000	150.000	1.440.000
	Jumlah	9.120.000	56.030.000	57.240.000	16.300.000	4.050.000	5.770.000	12.060.000	5.397.000	67.490.000
	Rata-rata	91.200	560.300	572.400	163.000	40.500	57.700	120.600	53.970	674.900

Lampiran 11. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan III Responden Petani Padi

No.	Nama	SPP & Uang Gedung	Buku Pelajaran & Alat Tulis	Jajan Anak	Kos Anak	Kesehatan				Lainnya (Tas, Seragam, Sepatu Anak)
						BPJS	Dokter	Puskesmas	Obat-obatan	
1	Jaswadi	-	-	-	-	-	360.000	360.000	240.000	-
2	Sunaryo	2.000.000	1.200.000	-	3.600.000	-	420.000	-	180.000	100.000
3	Sogiyem	-	-	-	-	-	420.000	480.000	300.000	-
4	Sudjono	-	-	-	-	-	420.000	480.000	300.000	-
5	Sarginen	-	-	-	-	-	840.000	480.000	300.000	-
6	Wahyudiono	1.000.000	600.000	1.200.000	-	-	600.000	480.000	360.000	500.000
7	Sujarno	-	-	-	-	1.260.000	840.000	-	180.000	-
8	Boiran	-	-	-	-	-	1.200.000	1.200.000	600.000	-
9	Marsandi	-	-	-	-	-	600.000	480.000	360.000	-
10	Bonijo	-	-	-	-	-	600.000	480.000	360.000	-
11	Sarjono	-	-	-	-	-	600.000	480.000	360.000	-
12	Purnomo	1.200.000	1.200.000	12*200000	-	-	600.000	480.000	360.000	400.000
13	Boiman	-	-	-	-	-	600.000	480.000	360.000	-
14	Jemawan	-	-	-	-	-	600.000	480.000	360.000	-
15	Katwanto	1.050.000	1.200.000	2.400.000	-	-	600.000	480.000	360.000	300.000
16	Saryono	-	-	-	-	-	600.000	480.000	360.000	-
17	Ismoyo	-	600.000	1.200.000	-	-	600.000	480.000	360.000	-
18	Tulus	-	-	-	-	-	600.000	480.000	360.000	-
19	M. Yusuf	-	-	-	-	-	600.000	480.000	360.000	-
20	Priyodianto	-	200.000	-	-	-	600.000	480.000	360.000	-
21	Sujatno	-	-	-	-	840.000	600.000	480.000	360.000	-

22	Amanudin	-	-	600.000	-	-	600.000	480.000	360.000	-
23	Anom Suroto	-	600.000	600.000	-	-	600.000	480.000	360.000	-
24	Jojon	100.000	1.800.000	1.200.000	-	-	600.000	480.000	360.000	300.000
25	Suparman	-	-	-	-	-	600.000	480.000	360.000	-
26	Jamari	-	-	-	-	-	600.000	480.000	360.000	-
27	Kadinem	-	-	-	-	-	600.000	480.000	360.000	-
28	Bibit Waluyo	-	-	-	-	-	600.000	480.000	360.000	-
29	Gunoto	1.000.000	700.000	1.200.000	-	-	600.000	480.000	360.000	300.000
30	Sugiyanto	1.000.000	1.800.000	1.200.000	-	400.000	600.000	480.000	360.000	400.000
31	Tuwari	-	600.000	1.200.000	-	-	600.000	480.000	360.000	-
32	Monandi	-	-	1.800.000	-	-	600.000	480.000	360.000	-
33	Mulyono	-	-		-	-	600.000	480.000	360.000	-
34	Toimun	-	-		-	-	600.000	480.000	360.000	-
35	Suwarni	-	-		-	-	600.000	480.000	360.000	-
36	Katirun	-	-		-	-	600.000	480.000	360.000	-
37	Suwarto	-	-		-	-	600.000	480.000	360.000	-
38	Sukardi	-	-		-	-	600.000	480.000	360.000	-
39	Isnanto	-	-	1.800.000	-	-	600.000	480.000	360.000	-
40	Suryani	-	600.000	1.200.000	-	-	600.000	480.000	360.000	-
41	Supriyadi	-	600.000	1.200.000	-	-	600.000	480.000	360.000	-
42	Agus	-	-		-	-	600.000	480.000	360.000	-
43	Pamuji	-	-		-	-	600.000	480.000	360.000	-
44	Suharwanto	-	600.000	1.200.000	-	-	600.000	480.000	360.000	-
45	Jemari	-	-		-	-	600.000	480.000	360.000	-
46	Isbat	-	600.000	1.200.000	-	-	600.000	480.000	360.000	-

47	Sringatin	-	-		-	-	600.000	480.000	360.000	-
48	Jamali	-	-		-	-	600.000	480.000	360.000	-
49	Supri	-	600.000	1.200.000	-	-	600.000	480.000	360.000	-
50	Katono	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
51	Kaderi	-	360.000	1.200.000	-	-	600.000	600.000	600.000	-
52	Jamil	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
53	Sudarno	-	-		-	-	1.200.000	1.200.000	600.000	-
54	Sumartono	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
55	Kholik	-	360.000	600.000	-	-	600.000	600.000	600.000	-
56	Mulyono	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
57	Jaeri	-	600.000	1.200.000	-	-	600.000	600.000	600.000	-
58	Harno	-	-		-	-	600.000	1.200.000	600.000	-
59	Abidin	-	600.000	1.200.000	-	-	600.000	1.200.000	600.000	-
60	Tumarno	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
61	Wasito	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
62	Santo	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
63	Hassim	-	600.000	1.200.000	-	-	600.000	600.000	600.000	-
64	Giman	-	-		-	-	1.200.000	1.200.000	600.000	-
65	Sayekti	-	-		-	-	1.200.000	1.200.000	600.000	-
66	Marto	-	600.000	1.200.000	-	-	600.000	600.000	600.000	-
67	Kalam	-			-	-	600.000	600.000	600.000	-
68	Subirin	-	600.000	1.200.000	-	-	600.000	600.000	600.000	-
69	Tularno	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
70	Tukijan	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
71	Sugiyanto	-	600.000	1.200.000	-	-	600.000	600.000	600.000	-

72	Jemani	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
73	Marsito	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
74	Wahyudi	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
75	Juni	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
76	Wahyu	-	360.000	600.000	-	-	600.000	600.000	600.000	-
77	Bonasir	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
78	Suseno	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
79	Marsudi	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
80	Wasikun	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
81	Mesran	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
82	Misradi	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
83	Boeran	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
84	Tumijo	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
85	Sugito	-	240.000	600.000	-	-	360.000	360.000	360.000	-
86	Eko	-	360.000	600.000	-	-	600.000	600.000	600.000	-
87	Sidik	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
88	Suryadi	-	360.000	600.000	-	-	600.000	600.000	600.000	-
89	Budiarto	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
90	Gianto	1.100.000	1.450.000	1.200.000	-	-	600.000	600.000	600.000	800.000
91	Marjikin	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
92	Boiman	1.050.000	1.400.000	1.200.000	-	-	600.000	600.000	600.000	800.000
93	Darmaji	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
94	Boimin	-	-		-	-	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-
95	Miswanto	-	-		-	-	1.200.000	600.000	1.200.000	-
96	Suharno	-	-		-	-	1.200.000	600.000	600.000	-

97	Sutrisno	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
98	Karnen	-	-		-	-	600.000	600.000	600.000	-
99	Sarti	1.050.000	1.400.000	1.200.000	-	-	600.000	600.000	1.200.000	800.000
100	Hariyono	-	-	0	-	-	600.000	600.000	180.000	1.120.000
	Jumlah	10.550.000	23.390.000	35.400.000	3.600.000	2.500.000	63.660.000	57.120.000	48.960.000	5.820.000
	Rata-rata	106.566	236.263	680.769	36.000	25.000	636.600	571.200	489.600	58.200

Lampiran 12. Tabungan Responden Petani Padi per Tahun

No.	Nama	Tabungan
1	Jaswadi	360.000
2	Sunaryo	720.000
3	Sogiyem	360.000
4	Sudjono	360.000
5	Sarginen	360.000
6	Wahyudiono	360.000
7	Sujarno	720.000
8	Boiran	480.000
9	Marsandi	360.000
10	Bonijo	360.000
11	Sarjono	360.000
12	Purnomo	720.000
13	Boiman	420.000
14	Jemawan	360.000
15	Katwanto	360.000
16	Saryono	360.000
17	Ismoyo	360.000
18	Tulus	360.000
19	M. Yusuf	360.000
20	Priyodianto	300.000
21	Sujatno	360.000
22	Amanudin	360.000
23	Anom Suroto	360.000
24	Jojon	360.000
25	Suparman	360.000
26	Jamari	360.000
27	Kadinem	240.000
28	Bibit Waluyo	360.000
29	Gunoto	360.000
30	Sugiyanto	360.000
31	Tuwari	360.000
32	Monandi	360.000
33	Mulyono	360.000
34	Toimun	360.000
35	Suwarni	360.000
36	Katirun	360.000
37	Suwarto	360.000
38	Sukardi	360.000
39	Isnanto	360.000
40	Suryani	360.000
41	Supriyadi	360.000

42	Agus	360.000
43	Pamuji	360.000
44	Suharwanto	360.000
45	Jemari	360.000
46	Isbat	360.000
47	Sringatin	360.000
48	Jamali	360.000
49	Supri	360.000
50	Katono	300.000
51	Kaderi	360.000
52	Jamil	300.000
53	Sudarno	360.000
54	Sumartono	300.000
55	Kholik	360.000
56	Mulyono	360.000
57	Jaeri	360.000
58	Harno	300.000
59	Abidin	360.000
60	Tumarno	360.000
61	Wasito	360.000
62	Santo	300.000
63	Hassim	360.000
64	Giman	300.000
65	Sayekti	360.000
66	Marto	300.000
67	Kalam	360.000
68	Subirin	360.000
69	Tularno	360.000
70	Tukijan	360.000
71	Sugiyanto	300.000
72	Jemani	300.000
73	Marsito	360.000
74	Wahyudi	300.000
75	Juni	360.000
76	Wahyu	360.000
77	Bonasir	360.000
78	Suseno	360.000
79	Marsudi	360.000
80	Wasikun	360.000
81	Mesran	360.000
82	Misradi	360.000
83	Boeran	360.000
84	Tumijo	300.000

85	Sugito	360.000
86	Eko	360.000
87	Sidik	300.000
88	Suryadi	360.000
89	Budiarto	360.000
90	Gianto	360.000
91	Marjikin	360.000
92	Boiman	360.000
93	Darmaji	360.000
94	Boimin	360.000
95	Miswanto	360.000
96	Suharno	360.000
97	Sutrisno	360.000
98	Karnen	360.000
99	Sarti	360.000
100	Hariyono	360.000
	Jumlah	36.360.000
	Rata-rata	363.600

Lampiran 13. Pendapatan Responden Berdasarkan Kriteria World Bank

No	40% Terendah	40% Sedang	20% Tertinggi
1	- 4.412.661	7.744.200	15.145.900
2	- 4.217.935	8.000.100	15.149.500
3	- 3.465.188	8.021.700	16.270.300
4	- 3.103.722	8.215.300	17.118.800
5	- 2.367.000	8.291.500	17.817.300
6	- 2.185.900	8.575.400	18.248.300
7	- 2.037.000	8.840.100	18.393.300
8	- 1.982.100	8.865.500	18.792.900
9	- 1.871.000	8.897.400	19.551.827
10	- 1.770.901	9.099.157	19.783.700
11	- 1.653.200	9.179.700	19.803.300
12	- 865.900	9.310.043	20.177.900
13	- 850.977	9.329.700	21.612.486
14	- 731.202	9.359.300	21.751.100
15	- 680.461	10.037.100	22.331.286
16	- 391.486	10.114.000	22.600.243
17	- 278.966	10.141.000	23.083.900
18	- 163.101	10.278.286	25.728.600
19	252.657	10.353.900	26.115.414
20	485.286	10.713.100	27.551.971
21	588.500	10.821.100	
22	1.911.300	10.957.900	
23	2.017.500	10.992.900	
24	2.411.700	12.189.500	
25	2.896.500	12.652.300	
26	3.002.900	12.722.686	
27	3.189.998	12.954.700	
28	3.526.500	13.029.014	
29	3.558.300	13.358.071	
30	3.888.500	13.386.900	
31	4.765.857	13.569.300	
32	5.099.100	13.646.000	
33	5.707.300	13.781.300	
34	6.483.500	13.839.200	
35	6.604.100	13.952.900	
36	6.619.243	13.994.629	
37	6.762.900	14.170.700	
38	7.195.700	14.224.500	
39	7.580.300	14.246.757	
40	7.669.900	14.918.500	
Jumlah	59.188.841	446.775.343	407.028.027

Lampiran 14. Kepemilikan Hewan Ternak Responden

No.	Nama	Jumlah Hewan Ternak	
		Kambing	Sapi
1	Jaswadi	4	0
2	Sunaryo	2	0
3	Sogiyem	6	0
4	Sudjono	2	0
5	Sarginen	2	0
6	Wahyudiono	2	0
7	Sujarno	2	1
8	Boiran	2	0
9	Marsandi	2	0
10	Bonijo	2	0
11	Sarjono	2	0
12	Purnomo	2	0
13	Boiman	4	0
14	Jemawan	2	0
15	Katwanto	0	1
16	Saryono	2	0
17	Ismoyo	2	0
18	Tulus	0	0
19	M. Yusuf	2	0
20	Priyodianto	2	0
21	Sujatno	2	0
22	Amanudin	0	0
23	Anom Suroto	2	0
24	Jojon	2	0
25	Suparman	2	0
26	Jamari	2	0
27	Kadinem	2	0
28	Bibit Waluyo	2	0
29	Gunoto	2	0
30	Sugiyanto	2	1
31	Tuwari	2	0
32	Monandi	3	0
33	Mulyono	3	0
34	Toimun	0	1
35	Suwarni	2	0
36	Katirun	2	0
37	Suwarto	2	0
38	Sukardi	2	0
39	Isnanto	2	0
40	Suryani	0	0

41	Supriyadi	0	0
42	Agus	3	0
43	Pamuji	2	0
44	Suharwanto	2	0
45	Jemari	2	0
46	Isbat	3	0
47	Sringatin	2	0
48	Jamali	2	0
49	Supri	0	0
50	Katono	2	0
51	Kaderi	2	0
52	Jamil	8	0
53	Sudarno	4	0
54	Sumartono	3	0
55	Kholik	2	0
56	Mulyono	2	0
57	Jaeri	2	0
58	Harno	2	0
59	Abidin	2	0
60	Tumarno	4	0
61	Wasito	4	0
62	Santo	2	0
63	Hassim	2	0
64	Giman	2	0
65	Sayekti	0	1
66	Marto	2	0
67	Kalam	2	0
68	Subirin	2	1
69	Tularno	3	0
70	Tukijan	2	0
71	Sugiyanto	4	0
72	Jemani	2	0
73	Marsito	4	0
74	Wahyudi	3	0
75	Juni	2	0
76	Wahyu	2	0
77	Bonasir	2	0
78	Suseno	2	0
79	Marsudi	2	0
80	Wasikun	0	0
81	Mesran	4	0
82	Misradi	3	0
83	Boeran	2	0

84	Tumijo	2	0
85	Sugito	4	0
86	Eko	2	0
87	Sidik	2	0
88	Suryadi	2	0
89	Budiarto	2	0
90	Gianto	2	0
91	Marjikin	2	0
92	Boiman	2	0
93	Darmaji	2	0
94	Boimin	2	0
95	Miswanto	2	0
96	Suharno	2	0
97	Sutrisno	2	0
98	Karnen	4	0
99	Sarti	2	0
100	Hariyono	3	0
	Jumlah	221	6
	Rata-rata	2,21	0,06



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 25 /408.21/2009**

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENGANGKUTAN BAHAN GALIAN Cu
KEPADA PT. GEMILANG LIMPAN INTERNUSA DARI DESA KLUWIH
KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr. Kwartono Iriyanto bertindak untuk dan atas nama PT. Gemilang Limpah Intemusa tanggal 9 Juni 2008 yang beralamat di Jalan Raya Pagutan No. 66 Arjosari tentang Permohonan Kuasa Pertambangan Pengangkutan Bahan Galian Cu dari Desa Kluwih Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
- Menimbang** : a. bahwa bahan galian Cu adalah termasuk golongan bahan galian vital (bahan galian golongan b) yang merupakan sumber daya tak terbarukan, maka setiap perusahaan pertambangan memerlukan Kuasa Pertambangan (KP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada humf a di atas, serta untuk kelancaran pengangkutan bahan galian, maka perlu memberikan Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan Bahan Galian Cu kepada PT. Gemilang Limpah Intemusa dari Desa Kluwih Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Umsan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum;

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512
Jawa Timur
Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengelolaan Pertambangan Umum;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 93 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum;
12. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/172/408.21/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Cu dan Zn kepada PT. Gemilang Limbah Intemusa di Dusun Pinggir Desa Kluwih Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

Memperhatikan : Rekomendasi teknis pertambangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan Nomor 545/397/408.43/2008 Tanggal 10 Desember 2008.

M E M U T U S K A N

Menetapkan,
PERTAMA

: Memberikan Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan Bahan Galian Cu kepada PT. Gemilang Limbah Intemusa dari Desa Kluwih Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

KEDUA

: Pemegang Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" Keputusan ini mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Wajib memberikan Laporan kegiatan Bulanan, Triwulan, Tahunan dan Laporan Akhir Kegiatan yang dijadikan satu dengan laporan Eksploitasi sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 143.K /29/MEN/2000 meliputi tata cara / sistem Pengangkutan, Jumlah dan Tujuan Pengangkutan;
2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1999 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
3. Aktivitas pengangkutan dilakukan maksimal 3 kali sehari menggunakan Dum Truck;
4. Wajib memperhatikan jenis jalan yang dilewati, sesuai Standard yang ditetapkan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan maksimal beban Muatan adalah 8,2 Ton/Kandar;
5. Pengusaha tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan Kuasa Pertambangan Pengangkutan kepada Pihak Lain tanpa persetujuan Bupati;
6. Wajib menghentikan kegiatan penambangan jika dalam pelaksanaannya menimbulkan bahaya atau kerusakan Lingkungan Hidup dan mengusahakan penanggulangannya;
7. Wajib melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) dan sistem penambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah yang meliputi pengembangan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi;
9. Mengutamakan terciptanya kemitrausahaan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan;
10. Wajib Membayar pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

11. Wajib melakukan pengamanan terhadap benda-benda, bangunan, dan keadaan tanah di sekitar lokasi yang dapat membahayakan keamanan umum;
12. Wajib mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan di bidang pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Kuasa Pertambangan ini berlaku sampai tanggal 21 Mei 2011 dan dapat diperpanjang.
- KEEMPAT** : Permohonan Perpanjangan Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada diktum "KETIGA" Keputusan ini diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kuasa Pertambangan.
- KELIMA** : Kuasa Pertambangan ini dapat dicabut sebelum jangka waktunya berakhir apabila Pihak perusahaan tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan akan dilakukan oleh Pelaksanaan Inspeksi Tambang (PIT) dan/atau ditunjuk Staf yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan selaku Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 12 - 1 - 2009

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan di Pacitan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pacitan;
6. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pacitan;
7. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kab. Pacitan;
8. Sdr. Camat Tulakan Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Kepala Desa Kluwih Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;
10. Sdr. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran 16. Kuisisioner Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS PERTANIAN**

Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294
Telp./Faxes (031) 8793653 Website <https://faperta.upnjatim.ac.id/>

KUISISIONER PENELITIAN KETIMPANGAN PENDAPATAN PETANI PADI DI DESA COKROKEMBANG KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN

Responden yang terhormat,

Dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "Ketimpangan Pendapatan Petani Padi di Desa Cokrokembang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan", di jurusan Magister Agribisnis, Fakultas Petanian, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, maka saya :

Nama : Ria Misdian Syahri

NPM : 21064020005

No. Telp : 081 333 770914

Memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr meluangkan waktu untuk mengisi kuisisioner penelitian ini. Semua informasi yang diberikan dalam penelitian ini dijamin kerahasiaannya dan hanya diperuntukkan untuk keperluan penelitian saja.

Atas perhatian dan kesediaannya, saya sampaikan terima kasih.

BAGIAN I. IDENTITAS RESPONDEN

Petunjuk Pengisian :

Isilah angket dibawah ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan cara mengisi informasi pada bagian yang telah disediakan

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Usia :

Agama :

Pendidikan :

Status Pernikahan :
 No. HP :
 Pekerjaan Utama :
 Pekerjaan Sampingan :
 Luas Lahan Usahatani :
 Komoditas yang : a. pada bulan
 Diusahakan b. pada bulan
 c. pada bulan
 Jumlah anggota dalam 1 :orang
 KK
 Jumlah Tanggungan
 Keluarga :orang
 (yg belum/tidak bekerja)
 Lama Berusahatani : tahun
 Kepemilikan lahan : a. Pribadi
 b. Menyewa
 c. Bagi Hasil
 d. Milik Pemerintah
 Awal kepemilikan lahan : a. Warisan
 b. Beli
 c. Lainnya
 Sumber Modal : a. Modal sendiri
 b. Pinjaman Petani Lainnya
 c. Pinjaman Bank
 d. Lainnya

BAGIAN II. ANALISIS USAHATANI

Dalam satu tahun saya menanam padi sebanyak _____ kali, pada bulan _____. Data di bawah ini merupakan data analisis usahatani untuk 1x musim tanam.

	KOMODITAS 1	KOMODITAS 2
JENIS KOMODITAS		
HASIL PRODUKSI (panen bulan : _____)		
Jumlah hasil produksi (Kg)		
Jumlah hasil produksi yang dikonsumsi (Kg)		
Harga jual (Rp/Kg)		
BENIH (dibeli bulan : _____)		
Jumlah benih yang digunakan (Kg)		
Harga beli benih (Rp/Kg)		
PUPUK (Digunakan bulan _____ s.d _____)		
Urea (digunakan bulan: _____)		
Jumlah yang digunakan (Kg)		
Harga beli (Rp/kg)		
Petroganik (digunakan bulan: _____)		
Jumlah yang digunakan (Kg)		

Harga beli (Rp/kg)		
Phonska (digunakan bulan:)		
Jumlah yang digunakan (Kg)		
Harga beli (Rp/kg)		
ZA (digunakan bulan:)		
Jumlah yang digunakan (Kg)		
Harga beli (Rp/kg)		
SP-36 (digunakan bulan:)		
Jumlah yang digunakan (Kg)		
Harga beli (Rp/kg)		
<i>(Isi lainnya jika ada)</i>		
Jumlah yang digunakan (Kg)		
Harga beli (Rp/kg)		
OBAT-OBATAN		
Herbisida (digunakan bulan:)		
Jumlah yang digunakan (Bisa Kg atau Kemasan)		
Harga beli (Rp/kg atau Rp/Liter atau Rp/Kemasan)		
Insektisida (digunakan bulan:)		
Jumlah yang digunakan (Bisa Kg atau Kemasan)		

Harga beli (Rp/kg atau Rp/Liter atau Rp/Kemasan)		
Fungisida (digunakan bulan:)		
Jumlah yang digunakan (Bisa Kg atau Kemasan)		
Harga beli (Rp/kg atau Rp/Liter atau Rp/Kemasan)		
(Isi lainnya jika ada)		
Jumlah yang digunakan (Bisa Kg atau Kemasan)		
Harga beli (Rp/kg atau Rp/Liter atau Rp/Kemasan)		
BIAYA TRANSPORTASI		
Jenis transportasi yang digunakan		
Biaya BBM		

Biaya PBB atas lahan yang diusahakan per tahun : Rp

Jika sewa, biaya sewa per tahun : Rp

Pola tanam padi :

Saya menggunakan teknologi dalam usahatani : a. Ya (*sebutkan*) B. Tidak

Apakah saudara memiliki ternak ? Sebut jumlahnya: a. Ya (*sebutkan*) B. Tidak

Pendapat saya terhadap limbah kegiatan tambang di wilayah Kluwih, Tulakan terhadap kegiatan usahatani padi saya:

BAGIAN III. TENAGA KERJA

No.	Jenis Pekerjaan	Sendiri	Dilakukan Orang Lain	Jumlah Pekerja	Upah per Hari (Rp)	Borongan (Rp)
1.	Pengelolaan Tanah					
2.	Tanam					
3.	Pemupukan Tanaman					
4.	Penyiangan rumput					
5.	Panen					
6.	Pasca Panen					

BAGIAN III. PENERIMAAN DARI PEKERJAAN SAMPINGAN PER BULAN

Pekerjaan sampingan :

Penerimaan per bulan : Rp

Biaya atas pekerjaan sampingan : 1. Rp

2. Rp

3. Rp

BAGIAN V. PENERIMAAN ANGGOTA KELUARGA LAIN DALAM SATU RUMAH PER BULAN

No.	Nama	Usia	Pendidikan Terakhir	Status	Pekerjaan	Pendapatan per Bulan
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

BAGIAN VI. PENGELUARAN RUMAH TANGGA PER BULAN

Konsumsi Pangan

1. Sumber Karbohidrat

No.	Jenis Konsumsi	Satuan	Per Bulan	
			Fisik	Nilai (Rp)
1.	Beras			
2.	Jagung tongkol			
3.	Jagung tumbuk			
4.	Terigu			
5.	Tepung beras			
6.	Ubi kayu			
7.	Ubi jalar			
8.	Sagu			
9.	Talas			
10.	Gaplek			
11.	Kentang			
12.	Lainnya			

2. Pangan Hewani

No.	Jenis Konsumsi	Satuan	Per Bulan	
			Fisik	Nilai (Rp)
1.	Ikan segar			
2.	Ikan awetan basah ¹⁾			
3.	Ikan asin			
4.	Udang segar			
5.	Cumi/ sotong segar			
6.	Udang/ cumi diawetkan			
7.	Daging ayam			
8.	Daging sapi			
9.	Daging kerbau			
10.	Daging kambing			
11.	Daging babi			
12.	Daging lainnya			
13.	Dendeng/abon			
14.	Telur ayam/ itik			
15.	Telur puyuh			
16.	Telur asin			
17.	Susu cair pabrik (kotak/kardus) ²⁾			
18.	Susu bubuk ³⁾			
19.	Susu bubuk bayi ³⁾			
20.	Susu kental manis ⁴⁾	Kaleng ⁴⁾		

21.	Susu kental manis	Sachet		
	Lainnya			

3. Sayur-sayuran

No.	Jenis Konsumsi	Satuan	Per Bulan	
			Fisik	Nilai (Rp)
1.	Bayam			
2.	Kangkung			
3.	Kol/kubis			
4.	Sawi putih			
5.	Sawi hijau			
6.	Buncis			
7.	Kacang panjang			
8.	Tomat sayur			
9.	Wortel			
10.	Bawang merah			
11.	Bawang putih			
12.	Cabe merah			
13.	Cabe hijau			
14.	Cabe rawit			
15.	Mentimun			
16.	Daun singkong			
17.	Terong			
18.	Tauge			
19.	Labu			
20.	Jagung muda			
21.	Nangka muda (gori)			
22.	Pepaya muda			
23.	Jamur			
24.	Petai			
25.	Jengkol			
26.	Sayur asem/lodeh ⁵⁾			
27.	Sayur sop ⁵⁾			
28.	Lainnya			

4. Kacang-kacangan

No.	Jenis Konsumsi	Satuan	Per Bulan	
			Fisik	Nilai (Rp)
1.	Kacang tanah			
2.	Kacang kedelai			

3.	Kacang hijau			
4.	Kacang mede			
5.	Kacang lainnya			
6.	Tempe			
7.	Tahu			

5. Buah-buahan

No.	Jenis Konsumsi	Satuan	Per Bulan	
			Fisik	Nilai (Rp)
1.	Jeruk			
2.	Mangga			
3.	Apel			
4.	Alpukat			
5.	Rambutan			
6.	Duku/langsat			
7.	Durian			
8.	Salak			
9.	Nanas			
10.	Pisang			
11.	Pepaya			
12.	Jambu			
13.	Sawo			
14.	Belimbing			
15.	Kedondong			
16.	Semangka			
17.	Melon			
18.	Nangka			
19.	Lainnya			
20.				
21.				

6. Minyak dan Lemak

No.	Jenis Konsumsi	Satuan	Per Bulan	
			Fisik	Nilai (Rp)
1.	Minyak goreng ⁶⁾			
2.	Kelapa butiran			
3.	Margarin			
	Lainnya			

7. Bahan Minuman

No.	Jenis Konsumsi	Satuan	Per Bulan	
			Fisik	Nilai (Rp)
1.	Gula pasir			
2.	Gula merah			
3.	Teh			
4.	Kopi			
5.	Coklat bubuk			
6.	Sirup			
7.	Kopi instant			
	Lainnya			

8. Bumbu – bumbu

No.	Jenis Konsumsi	Satuan	Per Bulan	
			Fisik	Nilai (Rp)
1.	Garam			
2.	Terasi/petis			
3.	Kecap			
4.	Penyedap masakan/ micin			
5.	Sambal jadi/ saus			
	Lainnya			

9. Konsumsi Lainnya

No.	Jenis Konsumsi	Satuan	Per Bulan	
			Fisik	Nilai (Rp)
1.	Kerupuk (mentah)			
2.	Kerupuk matang			
3.	Mie instant (Bungkus = 80 gram)			
4.	Mie kering/makaroni			
5.	Mie basah			
6.	Bihun			
7.	Emping			
8.	Bahan agar-agar (bungkus = 7 gram)			
9.	Bubur bayi kemasan (kardus kecil = 150 gram)			
	Lainnya			

10. Makanan/Minuman Jadi

No.	Jenis Konsumsi	Satuan	Per Bulan	
			Fisik	Nilai (Rp)
	Makanan Jadi			
1.	Roti tawar	Bungkus		
2.	Roti manis	Potong		
3.	Kue kering/biskuit	Ons		
4.	Kue basah/gorengan	Buah		
5.	Gado-gado/ketoprak/pecel	Porsi		
6.	Nasi/lontong campur/rames dsb	Porsi		
7.	Soto/gule/sop/rawon/sate	Porsi		
8.	Mie bakso/mie rebus/mie goreng dsb	Porsi		
9.	Makanan ringan anak-anak/kerupuk/keripik	Bungkus		
10.	Makanan jadi lainnya			
	Minuman Jadi			
1.	Air kemasan (galon/botol/cup)			
2.	Minuman kesehatan/berenergi	Botol		
3.	Minuman lainnya (kopi,teh, susu)	Botol		
4.	Minuman jadi lainnya			

11. Tembakau dan Sirih

No.	Jenis Konsumsi	Satuan	Per Bulan	
			Fisik	Nilai (Rp)
1.	Rokok	Bungkus		
2.	Tembakau	Kg		
3.	Sirih/pinang	Bungkus		
	Lainnya			

Konsumsi Non Pangan

Konsumsi Non Pangan Bulanan		
No.	Jenis Pengeluaran	Rata-rata Kebutuhan (Rp/Bulan)
	Bahan Bakar, Listrik, Air	
1.	Kayu bakar/arang	
2.	Minyak tanah	
3.	Gas	
4.	Bensin/solar	
5.	Pelumas/oli	

6.	Listrik	
7.	Air (PAM dan pikulan)	
	Komunikasi & Telekomunikasi	
1.	Koran/majalah	
2.	Telepon rumah	
3.	Pulsa HP/Internet	
4.	WiFi	
5.	Transport anak sekolah	
	Perawatan	
1.	Sabun mandi, pasta gigi, pembalut wanita, dan sikat gigi	
2.	Sabun cuci	
3.	Bedak, lipstik, parfum, dll	
	Pengeluaran Lain	
1.	Obat nyamuk	
2.	Iuran RT/RW/Desa	
3.	Perawatan kendaraan	
4.	Pembantu rumah tangga	
5.	Untuk sosial/hajatan	
	Lainnya	
Pengeluaran Non Pangan Tahunan		
	Sandang	
1.	Pakaian	
2.	Sarung, spre, dll	
3.	Sandal/sepatu	
	Pengeluaran Lain	
1.	STNK kendaraan bermotor	
2.	PBB	
3.	Perbaikan rumah	
4.	Lainnya	

Investasi Pendidikan

Pengeluaran Investasi Pendidikan Bulanan		
No.	Jenis Pengeluaran	Rata-rata Kebutuhan (Rp/Bulan)
1.	SPP termasuk uang gedung	
2.	Buku pelajaran	
3.	Buku dan alat tulis	
4.	Jajan anak	
5.	Transportasi	
6.	Kiriman untuk anak yang kost	
	Lainnya	
Pengeluaran Investasi Pendidikan Bulanan		
1.	Sewa rumah anak /Kost anak	
2.	Seragam sekolah	

3.	Tas sekolah, sepatu	
4.	Kursus tambahan	
	Lainnya	

Investasi Kesehatan

No.	Jenis Konsumsi	Rata-rata Kebutuhan	
		Rp/Bulan	Rp/Tahun
1.	BPJS		
2.	Dokter		
3.	Puskesmas		
4.	Obat-obatan		
	Lainnya		

BAGIAN VII. TABUNGAN

Jumlah tabungan per bulan : Rp

BAGIAN VIII. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PETANI PADI

1. Risiko yang saya alami ketika melaksanakan kegiatan usahatani (pekerjaan saya) adalah :

2. Saya sudah / belum (coret salah satu) menggunakan teknologi, jika sudah saya menggunakan teknologi, antara lain:

3. Pesan/saran terhadap kondisi pertanian saat ini :

Lampiran 17. Dokumentasi Kegiatan



Wawancara dengan Responden



Kegiatan Memasak Keluarga Responden yang Masih Memanfaatkan Kayu Bakar



Hewan Ternak Milik Responden



Salah Satu Bahan Pangan Responden



Proses Persiapan Lahan



Proses Penyebaran Benih





Proses Pemanenan Padi



Kerusakan Padi yang Siap Panen Akibat Hujan Deras



Kondisi Sungai yang Tercemar Limbah Tambang PT Gemilang Limpah Internusa



Responden Penelitian